

Junaidi ▪ Wahyudi  
Ishomuddin ▪ Tri Sulistyanyingsih

# Relasi Media Cetak DENGAN PEMERINTAH PROVINSI



**RELASI MEDIA CETAK DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI**



**Junaidi ▪ Wahyudi**  
**Ishomuddin ▪ Tri Sulistyaningsih**

# **Relasi Media Cetak DENGAN PEMERINTAH PROVINSI**

Copyright ©2023, Bildung  
*All rights reserved*

Relasi Media Cetak dengan Pemerintah Provinsi

Junaidi  
Ishomuddin  
Wahyudi  
Tri Sulistyaningsih

Desain Sampul: Ruhtata  
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Relasi Media Cetak dengan Pemerintah Provinsi/Junaidi, Ishomuddin, Wahyudi, Tri  
Sulistyaningsih/Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2023

x + 162 halaman; 15,5 x 23 cm  
QRCBN: 62-2578-3586-213

Cetakan Pertama: Desember 2023

Penerbit:

**Bildung**

Jl. Raya Pleret KM 2  
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791  
Email: bildungpustakautama@gmail.com  
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit dan Penulis

# KATA PENGANTAR

**A**lhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah, Swt yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan, sehingga buku yang berjudul Relasi Pers Lokal dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Meningkatkan Branding akhirnya dapat selesai.

Tidak lupa ucapan sholawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah penyampai risalah kepada umat manusia karena berkat ajaran yang dibawa beliau sebagai sumber inspirasi dan motivasi sehingga kita berbahagia di dunia ini dan selamat di akhirat kelak.

Adapun tujuan kajian dalam tugas akhir ini, untuk memahami relasi media cetak lokal dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan Branding dan memahami pers dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ishomuddin, Prof. Wahyudi, dan Ibu Prof. Dr. Tri Sulistyanyingsih, selaku tim penulis yang selama ini telah beker-

jasama dengan baik. Terima kasih juga kepada Rektor UMPR Dr. H. Muhammad Yusuf, M.AP dan Dekan Fisipol UMPR Dr. Irwani, M.AP, yang telah mendorong dan memfasilitasi peneliti hingga selesai. Begitu juga kepada kawan-kawan seperjuangan S3 Sosiologi UMM dan kawan-kawan dosen Fisipol UMPR. Tak ketinggalan istri tercinta, Hujaipah, S.Ag., serta anak-anak, Nafa Aqla Islami, S.Sos dan Diva Aqla Adzkia yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan buku ini.

Peneliti yakin buku ini banyak terdapat kekurangan baik dari tata cara penulisan, metode maupun keilmiahannya karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mohon masukannya demi penyempurnaan kajian berikutnya.

Malang, November 2023

Peneliti

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I MEDIA CETAK DAN PENGARUHNYA.....	1
A. Relasi Media Cetak dan Pemerintah Daerah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Metode Kajian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	16
A. Kajian Terdahulu.....	16
B. Tinjauan Pustaka.....	21
1. Pers.....	21
2. Pers Menurut Para Ahli dan Tokoh.....	22
3. Fungsi Pers.....	23
4. Pers Otoriter.....	25
5. Pemerintah Povinsi.....	26

6. Model Media Cetak Lokal dengan Pemerintah Daerah ...	29
7. Kontribusi Pers bagi Tumbuhnya Demokrasi .....	30
8. Pengertian, Tujuan, Unsur dan Jenis-jenis Branding .....	32
9. Pembingkaian Berita atau Framing .....	34
C. Landasan Teori .....	35
BAB III HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Gambaran Umum .....	41
B. Subyek dan Informan Kajian.....	51
C. Relasi Media Cetak Lokal dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.....	99
D. Media Massa Lokal Dalam Menjalankan Fungsinya .....	124
BAB IV RELASI PERS DENGAN PEMERINTAH PROVINSI .....	135
A. Relasi Pers dengan Pemerintah Provinsi Kalteng .....	135
B. Media Cetak Lokal dalam Menjalankan Fungsinya .....	142
BAB V PENUTUP .....	150
A. Kesimpulan .....	150
B. Saran .....	151
C. Implikasi Teoritik .....	151
D. Keterbatasan Kajian .....	153
DAFTAR PUSTAKA.....	154
LAMPIRAN.....	159
DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA.....	159

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran Kerjasama Media Massa .....	103
Tabel 2.	Media yang melakukan kerjasama dengan Pemprov Kalteng Tahun 2020 .....	103
Tabel 3.	Relasi Media Cetak Lokal dengan Pemprov Kalteng dalam Meningkatkan Branding. ....	148

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemberitaan Kontrak Pada Kalteng Pos .....	122
Gambar 2. Pemberitaan Kontrak Pada Tabengan.....	123
Gambar 3. Pemberitaan Kontrak Pada Palangka Post .....	124

# BAB I

## MEDIA CETAK DAN PENGARUHNYA

### A. Relasi Media Cetak dan Pemerintah Daerah

**D**i negara demokratis seperti Indonesia, kehadiran media sangatlah penting. Pentingnya fungsi media sendiri dinilai dapat menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menekankan pilar keempat demokrasi: eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers. Media merupakan forum khas yang berkembang di masyarakat dan diketahui mempengaruhi masyarakat, namun masyarakat juga mempengaruhi media.

Media mempengaruhi pemerintah, tetapi pemerintah juga mempengaruhi publik (Djuroto, 2002). Media juga memainkan peran penting dalam memastikan dan menegakkan demokrasi. Dalam perwujudan demokrasi, media memainkan fungsi kontrol dalam masyarakat demokratis sebagai perantara publik bagi penyelenggaraan negara. Hal ini mengingatkan keberadaan pers sebagai media yang menyebarkan informasi kepada massa.

Aktivitas dan peran media yang begitu penting dalam kehidupan demokrasi tentunya tidak boleh bertentangan dengan

mekanisme hukum. Rujukan terhadap regulasi pers dan peran pers yang berlandaskan etika profesi tentu sangat strategis untuk mengatur harmoni dan peran media massa. Pasal 40 (Pasal 3) UU Pers (Republik, 1999) menyebutkan bahwa fungsi media pers adalah sebagai media transmisi informasi, media hiburan, media pendidikan, dan control sosial. Wujudkan fungsi tersebut melalui berbagai bentuk pemberitaan di media massa.

Konvergensi media telah memungkinkan banyak perusahaan untuk memenuhi fungsi ini. Ini adalah model baru dalam evolusi industri media dengan menggabungkan berbagai jenis media menjadi satu perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, konvergensi media mengalami kemajuan guna menangkal fenomena media kertas yang oplahnya semakin berkurang sementara biaya produkis semakin tinggi. Bahkan sejumlah media cetak termasuk media yang sebelumnya dikategorikan media besar terpaksa menghentikan produknya dalam bentuk cetak. Perkembangan kesadaran fungsi media bervariasi dari waktu ke waktu. Sebelum kemerdekaan, era kemerdekaan orde lama bergeser ke orde baru, dan menjadi era reformasi saat ini.

Demikian pula, hanya ada tiga surat kabar di Kalimantan Tengah sebelum Reformasi: Pelita Pembangunan, Dinamika Pembangunan dan Palangka Raya Post. Namun, setelah reformasi, puluhan media cetak diterbitkan. Terutama mingguan dan bulanan. Dalam perkembangannya, media ini mengikuti proses alamiah dalam perkembangan pasar dan masyarakat makin banyak pilihan media massa yang berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, persaingan media semakin ketat di seluruh Indonesia, baik media cetak maupun elektronik. Selain itu, munculnya media online dirasakan atau tidak dirasakan berdampak pada pemasaran media cetak. Situasi ini membahayakan kelangsungan perusahaan dan kesejahteraan jurnalis. Di sisi lain,

biaya media cetak melonjak, dan secara umum dikatakan sebagai industri padat modal. Mulai dari kenaikan harga kertas, perawatan mesin press yang mahal, hingga distribusi ke pasar dan pembiayaan lainnya. Akibatnya, beberapa media menjadi bangkrut. Ini termasuk media nasional yang dulunya hebat tetapi sekarang tidak berdaya dan terpaksa ditutup.

Situasi ini juga mempengaruhi media lokal. Terjadi penurunan penjualan yang signifikan. Dalam situasi ini, diperlukan terobosan-terobosan inovatif dan kreatif untuk meningkatkan penjualan. Setidaknya mereka bisa bertahan dan perusahaan pers akan tetap bisa hidup. Di sisi lain, pemimpin daerah memerlukan media massa untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat, visi dan misinya, program yang telah tercapai.

Agar kepala daerah mendapatkan dukungan masyarakat, seorang pemimpin lokal harus mempunyai brand yang baik. Buah dari pemberitaan media terhadap keberhasilan yang telah dicapai kepala daerah.

Supaya memiliki brand yang baik di tengah masyarakat tidak hanya muncul begitu saja. Tetapi perlu pengaturan yang bagus. Termasuk agenda setting. Agenda setting adalah penyusunan artikel berita sesuai dengan kepentingan produser (Pawito, 2009). Idenya adalah bahwa editor menempatkan foto berita dan kegiatan di halaman yang mudah dibaca oleh masyarakat umum, atau membuka tajuk berita dan pesan. Dengan menetapkan agenda, berita terkini, berdebat dan mempengaruhi pendapat pembaca tentang pemimpin daerah. Citra diperkuat melalui agenda setting dan framing atau pbingkaian berita.

Menyadari bahwa media massa, khususnya media cetak, dapat meningkatkan branding, maka Kepala Daerah mengembangkan hubungan atau relasi dengan media massa dalam bentuk kerjasama berita, adventorial, iklan, dan kontrak halaman melalui

anggaran resmi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Upaya tersebut merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Karena bagi media dapat mendukung keberlangsungan media dan menopang penjualan. Di sisi lain, bagi pemerintah daerah, semua program dan kebijakan daerah serta kegiatan lainnya dapat dibagikan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan branding pemerintah daerah.

Begitu pula setelah pasangan H Sugianto-H Habib Ismail dinyatakan sebagai pemenang Pilkada 2016 oleh KPU Kalteng dan diresmikan oleh Presiden pada 25 Mei 2016, Pemprov Kalteng memutuskan Pelaksanaan program pembangunan telah dimulai. Visi dan misi dikomunikasikan kepada publik selama kampanye.

Dalam menjalankan roda pemerintahan pemerintahan dan pembangunan, Gubernur dengan Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugasnya, dibantu para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi kemasyarakatan, keagamaan adat. Termasuk perlunya dukungan kerjasama dengan lembaga, pemuda, guru, pimpinan partai, TNI-Polri, instansi vertikal, BUMN dan yang tak kalah pentingnya adalah dengan media massa.

Dalam bekerja sama dengan media massa, kebijakan saat periode pertama Gubernur Sugianto adalah membuka relasi yang luas dengan pihak. Baik dengan media cetak, elektronik maupun online. Karena dengan kerjasama ini semua informasi tentang keberhasilan pembangunan berjalan dengan baik dan branding meningkat.

Keberhasilan pembangunan selama periode 2016-2021, kepemimpinan Sugianto – H. Habib Ismail mengalami perkembangan yang maju di berbagai bidang (Muhammad Syakir dan Akhirudin, 2021). Kemajuan ini lah yang menjadi bahan berita oleh media yang menjalin relasi dengan Pemrpov Kalteng . Ke-

majuan telah dicapai di berbagai bidang itu antara lain. Di bagian ini dipaparkan sekilas tentang keberhasilan gubernur di berbagai bidang tersebut setiap bidangnya.

Di bidang ekonomi, berhasil membuat rekor emas dalam perekonomian Kalteng. Sejak tahun pertama ia sudah membukukan angka pertumbuhan ekonomi gemilang. Tahun 2016 ekonomi Kalteng tumbuh 6,37 persen dari tahun sebelumnya. 2017, pertumbuhan ekonomi provinsi ini bertengger di level 6,74 persen atau mengalami kenaikan 0,28 persen dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan yang berdampak positif terhadap perekonomian yang secara kumulatif tumbuh hingga 6,45 persen pada tahun 2022. Fluktuasi persentase tersebut tentunya pengaruh dari peran dominan sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan peranan dari lapangan usaha lainnya.

Dalam sektor ekonomi, terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu dua tahun terakhir. Berdasarkan data tahun 2020, Kalimantan Tengah memiliki total 893,04 kilometer jalur infrastruktur, di mana 70,20 kilometer dari total tersebut (1.272,08 kilometer) berada dalam kondisi stabil. Perkembangan ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu jalur baik sepanjang 644,16 kilometer dan jalur menengah sepanjang 248,88 kilometer. Terdapat juga 379,04 kilometer jalur yang tidak stabil, 29,80 kilometer jalur yang rusak ringan, dan 115,56 kilometer jalur yang rusak berat.

Data terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah secara bertahap membangun infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk pembangunan dua jembatan yang menghubungkan Provinsi Barito Selatan dengan Provinsi Barito Timur dan Barito Utara. Selain itu, Jembatan Bukit Rawi juga telah dibangun di perbatasan antara Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.

Prestasi Sugianto Sabran di bidang kesehatan. Salah satunya telah mencapai usia harapan hidup. Tahun 2016 hingga tahun 2017 menjadi 69,53 tahun, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 69,59 tahun. Berdasarkan data yang ada, sebesar 53,34% pada tahun 2016 dan 60,78% pada tahun 2017. Naik menjadi 83,46% pada tahun 2018, dan pada akhir tahun 2019 menjadi 84,97%. Indikator keberhasilan lainnya adalah berkurangnya angka gizi buruk. Sejak tahun 2016, proporsi penduduk kekurangan gizi terus menurun, dari 24,7% menjadi 23,6%, dan pada tahun 2018 menjadi hanya 5,5%.

Di bidang pendidikan, Sugianto telah menorehkan prestasi baik pada dua periode kepemimpinannya selama hampir 10 tahun terakhir. Berbagai prestasi berhasil mengharumkan Kalimantan Tengah di level nasional dan banyak sekali bantuan yang diberikan yang diberi nama “Beasiswa Kalimantan Tengah Berkah”. Selain itu, hasil kajian siswa-siswi dari Kalteng yang berprestasi di kancah internasional. Prestasi tersebut antara lain pada kedua periode tersebut merupakan prestasi terbaik yang dibarengi dengan prestasi akademik di bidang ilmu pengetahuan.

Keberhasilan-keberhasilan inilah yang diberitakan oleh Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post sebagai bentuk relasi antara media cetak lokal dengan pemerintah daerah. Penempatan beritanya ada yang menjadi berita utama, berita di posisi tengah, posisi kuping dan ada juga berita di posisi kaki (bawah) untuk tulisan feature. Sebagian besar berita itu berada di halaman 1 dan setiap hari terbit kecuali hari libur.

Selama masa pemerintahan Gubernur Sugianto-Habib Ismail telah menganggarkan dana yang cukup besar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebelum anggaran diputuskan, diskusi dilakukan antara eksekutif dan legislatif. Pemprov mengambil beberapa langkah untuk menentukan nilai kontrak kerja sama, pengajuan penawaran media, inventirasi media, negosiasi, dan keputusan.

Dalam perjalannya kerjasama ini tidak selamanya berjalan lancar. Terbukti ada media yang melakukan pemutusan hubungan kerjasama. Salah satu penyebabnya tidak ada kesepakatan anggaran antara pihak Pemprov dengan pemilik media.

Berdasarkan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Diskominfisantik Kalteng anggaran anggaran Kerjasama Media Massa APBD 2019 kontrak media massa Rp. 5.080.900.000,- Pada APBD 2020 sebesar Rp. 6.721.365.000,- dan pada`APBD 2021 sebesar 3 Rp. 16.447.745.814.

Relasi dalam bentuk kerjasama ini diharapkan oleh kedua belah pihak media dan pemerintah daerah berjalan dengan tidak melanggar aturan. Supaya keharmonisan ini tetap berjalan, bisa jadi fungsi-fungsi pers yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 yang memuat khusus fungsi kontrol sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya ketika ada kepala daerah yang kebijakannya melakukan pelanggaran peraturan dan hukum.

Bahkan ketika ada masyarakat yang menggelar demo selama beberapa hari memprotes kebijakan kepala daerah dan ada juga seorang bupati yang dijadikan tersangka oleh KPK, hanya media tertentu saja yang memberitakan. Sementara media yang menjalin relasi dengan Pemda tidak memberitakannya. Padahal di media sosial baik facebook, Instagram, whatsapp dan twitter ramai diperbincangkan. Padahal informasi di medsos tidak selalu benar. Hal ini tidak mengimplementasikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar melalui media massa. Dengan cara ini mereka mencoba untuk menjaga satu sama lain dalam kerangka transaksional yang saling menguntungkan. Dengan adanya relasi tersebut mempengaruhi kenetralan media masa terutama saat melakukan fungsinya sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintah daerah dan pada sebagian media membuat media “tidak berdaya” dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat

kontrol sosial.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk memahami hubungan relasi antara media cetak lokal dan pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Teori pertukaran sosial digunakan sebagai dasar utama dalam mengeksplorasi masalah ini. Mengingat pembahasan teori pertukaran sosial, mengungkapkan perubahan sosial dan memandang sosiologi sebagai perspektif sosiologis yang menggambarkan perubahan dan stabilitas sebagai rangkaian interaksi dengan orang lain dan organisasi. Teori ini juga berhipotesis bahwa keterikatan orang muncul karena didasarkan pada apa yang diperoleh untuk kebaikan atau kejahatan atau keuntungan dan kerugian.

Berdasarkan fenomena yang terjadi antara kerjasama antara media lokal dengan pemerintah daerah yang saling menguntungkan tersebut, muncul permasalahan yang ingin saya teliti adalah: Bagaimana relasi media cetak lokal dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Membranding Kepemimpinan Kepala Daerah? Bagaimana media cetak lokal menjalankan fungsinya yaitu fungsi informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial?

## **B. Penegasan Istilah**

Kajian ini mengambil judul adalah “Relasi Media Cetak Lokal dengan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Branding”. Supaya memiliki pemahaman yang sama dalam memaknai judul dan permasalahan dari buku ini peneliti menyampaikan istilah dari judul yaitu:

Media cetak lokal merupakan media cetak harian yang cetak di daerah dan distribusi pemasarannya di daerah serta isinya 80 persen berita, laporan, tulisan dan sajian gambar tentang daerah tersebut. Dalam kajian meneliti relasi tiga media cetak yang terbit di Kalimantan Tengah yaitu Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post.

Pemerintah daerah (Pemda) merupakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kajian ini yang dimaksudkan Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai kepala daerah, Wakil Gubernur, Sekda dan perangkatnya.

Branding sebagai upaya mempengaruhi opini masyarakat dalam meningkatkan pencitraan kepala daerah bahwa telah berhasil melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan, melalui proses agenda-setting pembingkai berita di media massa cetak (Hamad, 2004).

## **C. Metode Kajian**

Dalam bab ini, penulis memberikan kerangka umum dalam kajian tentang interaksi antara cetak lokal dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menguraikan paradigma, pendekatan dan jenis kajian yang digunakan dalam buku ini.

### **1. Paradigma Kajian**

Studi ini menggunakan paradigma definisi sosial sesuai dengan hasil yang diharapkan dari tujuan dan analisisnya. Tulisan aksi sosial Talcott Parsons dan Weber (Umanailo, 2019) menjadi model untuk paradigma ini. Fokus perhatian Weber dalam definisi sosial adalah pada bagaimana aktor sosial mendefinisikan keadaan sosial dan bagaimana definisi sosial ini mempengaruhi bagaimana mereka bertindak dalam interaksi sosial. Wawancara mendalam dan teknik observasi sering digunakan dalam kajian yang mengikuti paradigma definisi sosial.

Pemahaman tentang paradigma definisi sosial melibatkan pemikiran individu sebagai aktor bebas yang memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka mampu membangun dan menentukan makna serta interaksi sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa tindakan dan interaksi individu selalu dipengaruhi oleh struktur sosial dan institusi dalam masyarakat. Paradigma

definisi sosial menekankan peran individu dan aktivitas mereka sebagai fokus utama. Bagi pendukung paradigma ini, tantangan mendasar adalah bagaimana proses tindakan dan interaksi muncul dari kemauan individu.

Dalam kerangka paradigma definisi sosial, tujuan dan tindakan individu cenderung bersifat subjektif daripada objektif ketika mempertimbangkan realitas sosial dalam berbagai aspek. Paradigma ini menekankan bahwa realitas sosial lebih ditentukan oleh tindakan individu yang sebenarnya daripada oleh struktur sosial itu sendiri. Lebih dari itu, tindakan sosial dianggap bergantung pada definisi kolektif atau makna yang telah disepakati oleh anggota masyarakat.

Dalam definisi sosial mengandung dua konsep dasarnya yaitu konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode menerangkan yang pertama (Ritzer, 2014).

## **2. Pendekatan Kajian**

Pertimbangkan paradigma studi ini sambil memutuskan apakah pendekatan kualitatif tepat. Tujuan kajian kualitatif adalah untuk secara metodis menyusun deskripsi, gambar, atau lukisan berdasarkan aktual dan aktual dari peristiwa yang diteliti. Menurut (Yin, 2013) kajian kualitatif didefinisikan sebagai “suatu proses penyelidikan untuk memahami suatu masalah sosial atau manusia berdasarkan konstruksi gambaran yang kompleks dan holistik, dibentuk dengan kata-kata, menyajikan kembali pandangan rinci dari informan, dan dilakukan secara alami lingkungan”.

Sudut pandang ini mengarah pada kesimpulan bahwa paradigma yang mengatur kajian kualitatif dicirikan sebagai "serangkaian kajian untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan membangun gambaran yang komprehensif dan kompleks yang diberikan dalam kata-kata, menyampaikan sudut pandang

secara rinci yang dikumpulkan dari sumber informasi."

### 3. Jenis Kajian

Pendekatan studi kasus digunakan dalam kajian ini. Bogdan dan Bikien (Bogdan & Bikien, 1992) mendefinisikan studi kasus sebagai analisis komprehensif dari satu lokasi, satu topik, satu tempat penyimpanan dokumen, atau satu peristiwa tertentu. Sedangkan (Yin, 2008) berfokus pada kualitasnya sambil menawarkan batasan yang lebih teknis.

Berdasarkan batasan-batasan tersebut, jelaslah bahwa studi kasus memiliki batasan-batasan sebagai berikut: (1) sasaran kajian dapat berupa orang, peristiwa, latar, dan dokumen; dan (2) tujuan tersebut dipelajari secara mendalam secara menyeluruh sesuai dengan setting atau konteksnya masing-masing dengan tujuan untuk memahami berbagai hubungan yang ada antar variabel.

### 4. Lokasi Kajian

Kajian dilakukan di Kota Palangka Raya. Kota Palangka Raya dipilih sebagai lokasi kajian karena merupakan tempat pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah berada dan sebagai ibu kota provinsi. Selain itu, ini adalah lokasi di mana media cetak, elektronik, dan online dapat ditemukan.

### 5. Subjek dan Informan Kajian

Untuk mendapatkan informasi lebih akurat maka dalam pengambilan data peneliti memakai teknik *purposive*. Pemberi informasi sebagai sumber data yang digunakan dalam kajian ini sesuai keperluan yaitu orang yang menjadi subyek yang mempunyai relevansi dan paham untuk menyampaikan, mengungkapkan dan menyatakan relasi media cetak lokal dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan branding. Dalam pengambilan subyek dibatasi ketika sudah mencapai kejenuhan data.

Sumber data pada kajian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer berdasarkan fokus kajian ini, maka sumber data di peroleh dari Informan (sumber Informasi), pemilihan informasi pokok didasarkan prinsip *purposive*.

Informan adalah mereka yang memberikan informasi tentang data yang peneliti butuhkan yang relevan dengan kajian yang dilakukan dalam kajian kualitatif, juga dikenal sebagai subjek kajian.

Subyek kajian yang dikumpulkan dari informan kunci meliputi pemilik perusahaan media massa yang menetapkan kebijakan, manajemen, pemimpin redaksi yang menetapkan kebijakan redaksional, redaktur, dan jurnalis lapangan. Tak kalah pentingnya adalah jajaran bisnis percetakan, pemasaran yang membawahi pemasaran surat kabar, divisi periklanan yang biasanya memegang pesanan iklan, kontrak halaman dan pembuat kebijakan dalam liputan berita berbayar.

Informasi juga dicari dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi, tokoh adat dan akademisi. Gubernur yang membuat kebijakan bersama dengan media dan dapat menjelaskan konteks dan pentingnya kerjasama, adalah sumber informasi berikutnya. Sebagai organisasi teknis yang mengawal dan mengendalikan kerjasama dengan media, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Biro Humas Pemprov Kalteng.

Sebagai organisasi yang bekerja sama dengan eksekutif dalam perencanaan dan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang antara lain menyetujui anggaran untuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan media lokal, informasi dari pimpinan DPRD Kalteng juga dibutuhkan.

## **6. Instrumen Kajian**

Peneliti merupakan instrumen utama karena posisi seorang peneliti sebagai instrumen adalah kemampuan dalam meneliti-

ya. Di samping itu sebagai instrumen penunjang dalam mendapatkan data di lapangan diperlukan sebuah alat bantu seperti hand-phone agar informasi yang didapat dari berbagai sumber dapat ditangkap secara utuh dan sempurna sehingga memudahkan peneliti dalam menyajikan data kajian.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat memanfaatkan beberapa strategi atau pendekatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Peneliti membutuhkan informasi yang relevan untuk memahami interaksi antara pers lokal dan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan studi mereka.

Daftar berikut mencakup beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan ini.

### a. Observasi

Agar pendekatan pengumpulan data dari observasi berguna untuk kegiatan kajian, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Pola berpikir ilmiah tentunya memerlukan observasi dalam mencermati fenomena yang ada di lapangan (Suyanto, 2015). Suatu kegiatan pengamatan yang sistematis, satu dengan tujuan yang jelas, yang dapat diatur dan diverifikasi validitas dan reliabilitasnya, yang dapat dicatat sebagai sistematis, dan yang terkait dengan proposisi yang luas adalah semua syarat untuk dimasukkan dalam kajian. (Nazir, 1985: 234)

Teknik observasi non partisipan digunakan, dimana peneliti hanya mengamati fenomena yang diteliti. Observasi langsung dilakukan untuk memahami sepenuhnya fokus kajian. Catatan lapangan adalah kumpulan temuan observasi. Informasi catatan lapangan disajikan dalam bentuk pertemuan yang biasa, temporal, kejadian, dan interpretasi dari pengalaman tersebut.

## b. Wawancara

Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data atau informasi yang melibatkan berbicara dengan informan secara tatap muka untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai prosedur pengumpulan data, klaim Rachmat (Kriyantono, 2014). Kegiatan pelacakan dokumentasi sering digunakan bersamaan dengan teknik observasi, angket, dan wawancara. untuk mengumpulkan pengetahuan yang akan membantu dalam analisis dan interpretasi data.

## 8. Cara Pengambilan Data Studi Kasus

Peneliti merujuk pada pendapat Yin (Yin, 2013) menjelaskan bahwa dalam studi kasus, ada enam cara pengumpulan data, yaitu: 1) dokumen, 2) rekaman arsip, 3) wawancara terbuka, 4) pengamatan langsung, 5) pengamatan sebagai peserta, dan 6) perangkat fisik atau budaya. Yin mengatakan bahwa untuk mendapatkan manfaat maksimal dari keenam sumber data tersebut, ada tiga prinsip yang perlu diikuti, yaitu: (1) menggabungkan data dari berbagai sumber; (2) membuat data dasar studi kasus seperti catatan, dokumen, dan bahan naratif; (3) menjaga kelangsungan bukti-bukti tersebut.

Dalam kaitanya dengan analisis dalam studi kasus, Yin(Yin, 2013) Teknik-teknik ini membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari studi kasus. Berikut adalah tiga teknik analisis yang dibahas oleh Yin: 1) Analisis Data Bukti, Ini adalah teknik analisis yang berfokus pada pengumpulan dan analisis bukti-bukti yang relevan dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan dalam studi kasus. Data bukti termasuk dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan, dan sumber data lainnya. Peneliti harus mengumpulkan semua bukti

yang relevan dan kemudian menganalisisnya untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan tema-tema yang muncul. Analisis data bukti membantu dalam membangun narasi yang kuat tentang studi kasus yang sedang diteliti. 2) Analisis Pola (*Pattern Matching*), Teknik ini melibatkan perbandingan pola-pola yang muncul dalam data dengan kerangka teoretis atau konsep-konsep yang telah didefinisikan sebelumnya. Peneliti mencoba mencocokkan pola-pola yang ditemukan dalam data dengan konsep-konsep atau teori yang relevan. 3) Analisis Penjelasan (*Explanation Building*), Analisis penjelasan adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun penjelasan yang mendalam tentang fenomena dalam studi kasus. Peneliti mencoba untuk mengidentifikasi penyebab, hubungan sebab-akibat, dan faktor-faktor yang menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dalam kasus yang sedang diteliti. Ini melibatkan analisis yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih dalam tentang kasus, dan peneliti sering harus menggali lebih dalam dalam data untuk mencapai penjelasan yang memuaskan. Dalam praktiknya, peneliti seringkali menggunakan lebih dari satu teknik analisis, tergantung pada kompleksitas kasus dan tujuan kajian. Penggunaan yang tepat dari teknik analisis ini membantu peneliti dalam memahami, menjelaskan, dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kasus yang diteliti.

Penggunaan kombinasi dari bentuk-bentuk pengumpulan data ini akan membantu peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang studi kasus yang sedang diteliti. Yin menekankan pentingnya triangulasi, yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memastikan keabsahan dan keandalan hasil kajian studi kasus.

## BAB II

# KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

### A. Kajian Terdahulu

Untuk dijadikan sebagai rekomendasi dan referensi bagi kajian selanjutnya, peneliti membuat daftar beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan judul kajian. Para peneliti membahas beberapa temuan dari studi sebelumnya yang melihat bagaimana pers dan media massa berinteraksi di bawah ini.

Pertama, studi (Ngadino, 2010) menunjukkan bagaimana perubahan media mempengaruhi bagaimana masyarakat dan negara berinteraksi. Menurut negara, batasan diperlukan untuk kemajuan media massa yang mendukung kebebasan pers. Larangan ini dibenarkan dengan adanya ilmu yang berbahaya bagi kemaslahatan bersama. Untuk memajukan tujuan nasional, kebebasan pers dan media penyiaran dibatasi secara konstitusional.

Kedua, investigasi (Soraya et al., n.d.) terhadap penggunaan media oleh DPRD Kabupaten Temanggung. Bagi khalayak, pesan ditransformasikan melalui media. Organisasi pemerintah menggunakan teknik ini untuk mengkomunikasikan temuan dan kebi-

jakan lain sehingga masyarakat umum mengetahui kinerja mereka. Media itu sendiri perlu berperan dalam proses ini. Media, di sisi lain, membutuhkan informasi ini karena peran media itu sendiri berperan dalam upaya untuk mempublikasikan peristiwa yang memiliki unsur berita, termasuk apa pun yang terkait dengan kebijakan dan lainnya yang terkait dengan instansi pemerintah. Lembaga atau pihak yang membutuhkan media, bagaimanapun, dapat dengan mudah mengubah pesan. Lembaga legislatif berperan dalam pengawasan dan pengendalian eksekutif. Karena cara kerja legislatif, media cukup tertarik dengan topik ini.

Legislatif diharuskan untuk memantau operasi badan eksekutif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Legislatif, di sisi lain, berfungsi sebagai suara rakyat dan mengeluarkan ide-ide yang berkembang secara dinamis di masyarakat. Legislatif memiliki peran penting dalam masyarakat, baik sebagai penyalur ambisi rakyat saat berpartisipasi dalam forum untuk membuat kebijakan maupun sebagai kepala eksekutif check and balance. Tentu saja, media membantu masyarakat menerima informasi dengan cepat dan tepat. Melalui media, masyarakat umum dapat belajar tentang informasi dan kinerja legislatif. Akibatnya, media sangat penting dalam hal ini. Legislatif dapat memberi tahu publik tentang apa saja dengan menggunakan media, yang berfungsi sebagai pengganti saluran informasi tradisional. Anggota parlemen dan media terlibat dalam masalah ini.

Kajian ke tiga (Gobang, 2014). Kolaborasi antara pemerintah daerah dan media lokal untuk mendukung efektifitas pemerintahan daerah di Provinsi NTT. Bagaimana media lokal dan otoritas regional bekerja sama untuk mendukung tata kelola lokal yang efektif adalah masalah yang ingin dipecahkan oleh studi ini. Dapatkah media lokal mempengaruhi pemerintah daerah? Berurusan dengan pemerintah dan pemilik kekayaan adalah media lokal yang independen? Tentang bagaimana media lokal dan otoritas berint-

eraksi, peneliti mengumpulkan data. Informasi tekstual, informasi kognitif, dan informasi latar belakang sosial dikumpulkan. Peneliti ini meneliti kognisi sosial dan setting sosial selain teks. Analisis sikap media lokal harus memperhatikan teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tujuan pemilik media dan pemerintah daerah dapat mempengaruhi realitas media lokal. Keadaan ini menunjukkan bahwa media lokal tidak sepenuhnya objektif. Akibatnya, dalam menilai perspektif media, pembaca atau masyarakat umum harus lebih kritis.

Artikel keempat oleh (Mulyadi, 2017) dan membahas tentang strategi media relations pemerintah kota Sukabumi. Kajian ini mencakup strategi komunikasi media relations dari Humas Pemerintah Kota Sukabumi. Setiap institusi membutuhkan humas karena merupakan salah satu taktik yang digunakan untuk membentuk citra perusahaan, baik secara positif maupun negatif. Pemerintah Kota Sukabumi merupakan lembaga yang memiliki ikatan media yang kuat, sehingga setiap berita baik dari dalam maupun luar pemerintahan akan cepat sampai ke masyarakat. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi taktik komunikasi yang digunakan oleh Humas Pemerintah Kota Sukabumi, serta cara berkomunikasi dengan publik melalui media cetak dan elektronik.

Selaras dengan hal tersebut Arief Hidayatullah tentang perilaku jurnalis saat memegang pers di Bima adalah yang kelima (Hidayatullah, 2017) . “Perilaku Jurnalis dalam Penyelenggaraan Pers di Bima” menjadi judul kajian ini. Indonesia saat ini sedang memasuki era keterbukaan menyusul “Revolusi Mei 1998” yang menggulingkan pemerintahan Orde Baru.

Pers dan masyarakat Indonesia juga mulai menggunakan hak kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat. Organisasi kontrol media, sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Penerangan, dibubarkan. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga melaku-

kan perubahan terhadap UU Pers.

Negara yang melarang pers dihilangkan, memaksimalkan jendela kesempatan untuk pembentukan pers. Sebagai salah satu kota administratif di Pulau Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bima tidak diragukan lagi memiliki organisasi pers yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Pers sangat penting bagi perkembangan Bima (Kota Bima dan Kabupaten Bima), terutama dalam hal penyebaran informasi. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sikap jurnalis dalam kaitannya dengan manajemen pers di Bima.

Kajian (Buluamang, 2017) tentang transparansi komunikasi dalam birokrasi pemerintahan, diterbitkan dalam *Jurnal Kajian dan Pengembangan Pers*, vol. 21, adalah yang keenam. Setiap organisasi pemerintahan harus menggunakan prinsip keterbukaan dalam berbagai bidang kehidupan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi komunikasi digunakan dalam birokrasi pemerintahan. Pendekatan studi kasus digunakan dalam metodologi kajian kualitatif. Kelompok fokus dan observasi partisipan digunakan sebagai metode pengumpulan data selama periode dua tahun. Menurut temuan studi, kinerja, belanja, dan kebijakan komunikasi publik terus menimbulkan masalah bagi transparansi komunikasi birokrasi pemerintah.

Kajian ketujuh dilakukan oleh (Yusuf, 2011) dipublikasikan dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, vol.14 no.3, *Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah*. Eksistensi media lokal sebagai subsistem politik lokal memerlukan landasan profesionalisme dan idealisme yang kokoh. Tanpa profesionalisme, sulit bagi media untuk menjaga kepercayaan publik. Media lokal harus meningkatkan standar manajemennya sebagai lembaga komersial untuk mendukung seluruh organisasi dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Artikel ini akan membahas

tiga isu terkait: pengamatan teoretis tentang hubungan media, demokrasi, dan proses menuju demokratisasi lokal; merespon otonomi daerah dan peran media lokal dalam otonomi daerah dalam memediasi pemimpin politik dan konstituen; dan pentingnya peran media lokal dalam proses demokratisasi Indonesia, serta memberikan alternatif bagaimana seharusnya media lokal di masa depan, baik sebagai pengganti demokrasi.

Kajian (Ghassani & Sukowati, 2016) tentang bagaimana media berinteraksi dengan pemerintah dalam kaitannya dengan perannya dalam kontrol sosial adalah yang kedelapan. Pemerintah dan pers memiliki hubungan yang saling menguntungkan. kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai mitra, media diharapkan dapat mempublikasikan inisiatif pembangunan dan menginformasikan kepada masyarakat umum tentang setiap kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk mengkomunikasikan informasi mengenai tindakan pemerintah secara efektif, penting bagi pemerintah dan media untuk menjalin hubungan yang baik. Melalui penyampaian berita yang jujur, berimbang, tidak mencemarkan nama baik, dan mengikuti kode etik jurnalistik bagi Indonesia, pers diharapkan mampu meraih persahabatan masyarakat.

Surat Kabar Sebagai Media Penyampaian Informasi Politik Partisipasi Politik Masyarakat, studi kesembilan (Suharyanto, 2016) dimuat dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Magister Ilmu Administrasi Negara, UGM. Meskipun mungkin sulit untuk meyakinkan seseorang untuk terlibat, ada beberapa orang yang ragu-ragu untuk melakukannya, terlepas dari kenyataan bahwa keterlibatan masyarakat dalam membentuk kebijakan pemerintah mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ini akan diproduksi dengan baik. Namun, jika masyarakat atau warga memilih pemimpin yang buruk—yaitu pemimpin yang tidak jujur—maka rakyat sendiri yang dirugikan. Akibatnya, keputusan akhirnya berada di

tangan komunitas kita sendiri; jika kita memilih pemimpin yang baik, maka hasilnya akan menguntungkan mengingat Indonesia adalah negara demokrasi, yang berarti diperintah oleh, untuk, dan oleh rakyat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa surat kabar sebagai sarana penyebarluasan informasi politik memiliki pengaruh yang besar terhadap seberapa besar individu berpartisipasi dalam politik (Bungin, 2018).

Hubungan antara pers dan pemerintah daerah melalui hubungan masyarakat, di mana pemerintah daerah melakukan pencitraan (Wahyudin & Erlandia, 2018). Peran media dalam mendorong partisipasi politik, dan peran media dalam menyebarluaskan informasi ahli kepada masyarakat umum, semuanya dibahas dalam sembilan kajian sebelumnya.

Demikian sejumlah kajian terdahulu berkaitan dengan relasi pers dengan pemerintah daerah. Adapun kajian saya melengkapi dari kajian sebelumnya. Dimana relasi yang terjadi antara media cetak lokal dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditandai dengan adanya kontrak halaman dituangkan dalam MoU. Pihak pertama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban membayar sejumlah anggaran kepada pihak kedua media cetak lokal. Sementara pihak kedua berkewajiban memberitakan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalteng setiap hari di halaman yang telah disepakati.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pers**

Pengertian pers adalah lembaga sosial/media massa yang melakukan kegiatan jurnalistik berupa tulisan, gambar, suara, dan grafik dengan memanfaatkan media cetak atau media elektronik dalam penyebarannya. Pengertian pers dalam arti sempit adalah semua media yang berbentuk media cetak seperti surat kabar, ma-

jalat, tabloid, dan berbagai buletin kantor berita. Sedangkan pers dalam arti luas (Surbakti, 2016) mencakup semua media massa yang ada seperti media online, radio, televisi, media cetak, dan radio.

Menurut etimologinya, kata press berasal dari kata bahasa Inggris Press, yang berarti tekanan, pengepresan, dan mesin cetak. Dalam hal ini, pers disebut sebagai alat cetak yang mencetak konten tekstual ke dalam lembaran kertas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pengertian pers adalah lembaga sosial dan alat komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gambar dan suara, gambar dan grafik, serta dalam bentuk lain dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan semua saluran lain yang tersedia (Republik, 1999).

## 2. Pers Menurut Para Ahli dan Tokoh

Pers adalah sebuah bentuk media massa yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, berita, pendapat, dan komunikasi kepada masyarakat. Pers secara umum didefinisikan oleh sejumlah individu dan spesialis, termasuk:

1. Menurut Kustadi Suhandang (Suhandang, 2023) mencari, mengumpulkan, mengolah, mensintesis, dan menyajikan berita tentang kejadian sehari-hari adalah seni atau kemampuan yang dimiliki pers untuk memuaskan hati nurani khalayak.
2. Menurut J.C.T. Simorangkir, pengertian pers mencakup pengertian pers dalam arti yang seluas-luasnya maupun pengertian yang lebih khusus. Surat kabar harian, terbitan mingguan, dan majalah adalah satu-satunya yang termasuk dalam definisi "pers" dalam konteks ini.
3. Menurut Marshall McLuhan, adalah media yang langsung menghubungkan satu tempat dan satu peristiwa ke peristiwa lainnya.

4. Raden Mas Djokomono mendefinisikan pers sebagai kekuatan yang membentuk opini publik melalui publikasi artikel di surat kabar.

### 3. Fungsi Pers

Pers melayani berbagai tujuan, termasuk sebagai media informasi, alat pendidikan, sumber hiburan, lembaga ekonomi, dan alat kontrol sosial. Namun ada tiga tujuan pers, menurut Harold D. Lasswell dan Charles R. Wright (Lasswell, 2009):

1. Sebagai alat pengawat sosial. Sebuah organisasi yang mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang berbeda dan pandangan yang tidak bias tentang peristiwa yang terjadi di sekitar mereka adalah pers atau media massa.
2. Sebagai sarana sosialisasi. Pers dan media massa dapat berfungsi sebagai wahana sosialisasi dan transmisi nilai-nilai sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Sebagai Alat Korelasi Sosial (*Social Correlation*). Pers dapat berfungsi sebagai kekuatan pemersatu bagi berbagai kelompok sosial ekonomi.

Hal ini dapat dicapai dengan menyebarluaskan berbagai sudut pandang saat ini untuk mencapai konsensus. Sesuai dengan konsep yang diberikan di atas, pers dapat dikenali dari beberapa ciri.

Ciri-ciri umum pers adalah sebagai berikut:

#### 1. Keteraturan

Jika suatu kelompok atau organisasi dapat secara rutin dan berkala mempublikasikan berita dan informasi, maka dapat disebut sebagai pers. Jadwal publikasi, ritme, dan konsistensi diprioritaskan berdasarkan periodisitas.

## 2. Promosi

Kemampuan menyampaikan berita atau informasi kepada khalayak dengan sasaran yang beragam, baik dari segi psikografis maupun lokasi sangat dibutuhkan oleh pers.

## 3. Realisme

Siaran pers harus selalu menyertakan peristiwa terkini dan terkini serta unsur keunikan.

## 4. Globalisasi

Ini menyiratkan bahwa kita memandang pers secara objektif dan sebagai kumpulan informasi yang beragam. Pers umumnya menyebarkan banyak informasi, namun topik tertentu selalu menjadi headline utama.

## 5. Relativitas

Baik media cetak maupun media internet, setiap media massa harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika ini dalam bekerja. Secara umum, ada dua jenis media massa: media massa lama dan media massa modern. Berikut justifikasinya:

### a) Media Massa Tradisional

Pers dan media massa tradisional keduanya merupakan bentuk media massa otoritatif dengan struktur organisasi yang berbeda. Surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan televisi layar lebar adalah beberapa contoh media massa konvensional. Terdapat prosedur untuk memilih, menerjemahkan, dan menyebarkan informasi di media massa tradisional. Pers atau media massa hanya berfungsi sebagai perantara dan mendistribusikan informasi melalui jalur-jalur tertentu. Interaksi antara pemberi berita dan penerima informasi relatif minim. Penerima informasi adalah anggota masyarakat dan dapat memilih informasi yang diterima.

## b) Media Massa Modern

Istilah "media massa" saat ini mengacu pada media dengan otoritas dan organisasi media serta media tanpa otoritas. Ada beberapa outlet media massa kontemporer yang tersedia sekarang, termasuk blog, media sosial, program obrolan, dan situs berita online. Di antara ciri-ciri media massa kontemporer adalah: Sejumlah pihak, baik individu maupun organisasi, dapat berkontribusi pada substansi informasi atau pesan. Sumber informasi dapat mengirimkan pesannya ke penerima melalui internet atau pesan SMS. Pertemuan individu sering terjadi ketika informasi didistribusikan tanpa perlu perantara, dan penerima informasi dapat memilih durasi interaksi.

## 4. Pers Otoriter

Teori otoriter merujuk (Iqbal, 2020) pada konsep pers yang berfungsi sebagai alat ekstensi dari kebijakan pemerintah yang berkuasa, bertugas melayani negara. Konsep ini muncul seiring dengan perkembangan mesin cetak, terutama dalam konteks perkembangan pers komunis Soviet. Teori otoriter dapat ditelusuri kembali ke abad ke-15 hingga ke-16 pada masa pemerintahan absolut, di mana kebenaran dianggap sebagai hak prerogatif dari sejumlah kecil penguasa. Pada periode tersebut, peran utama pers adalah mengkomunikasikan pandangan yang berasal dari puncak kekuasaan ke seluruh lapisan masyarakat.

Lebih jauh, (Iqbal, 2020) mengungkapkan bahwa pada awalnya, dasar dan teori pers mendukung serta berfungsi sebagai perpanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan berperan dalam melayani negara.

Teori pers otoriter, sebagaimana diakui oleh (Waluyo, 2012), dianggap sebagai teori pers tertua yang muncul pada abad ke-16. Teori ini bersumber dari falsafah kenegaraan yang mempertahankan

ankan kekuasaan absolut, dengan pendekatan yang mendasar dari atas ke bawah. Dengan demikian, peran pers dalam kerangka ini adalah mendukung kebijakan pemerintah dan melayani negara. Kebebasan pers diarahkan atau diatur untuk memenuhi kepentingan penguasa.

Sistem teori pers otoriter, sebagaimana disorot oleh (Rahmi, 2019), adalah suatu kerangka di mana pers berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk melayani kepentingan Negara, dan seluruh media massa beroperasi di bawah kendali pemerintah.

## 5. Pemerintah Povinsi

### a) Pengertian Provinsi

Penyelenggara negara di tingkat provinsi adalah pemerintah provinsi. Provinsi dalam bahasa Belanda adalah asal kata "provinci". Namun, *provinciae* Latin, yang berarti wilayah, adalah asal kata provinsi sebenarnya. Daerah administratif yang merupakan bagian dari wilayah nasional disebut sebagai provinsi di Indonesia. Ada banyak kabupaten dan kota di provinsi ini. Di Indonesia, seorang gubernur bertanggung jawab atas setiap provinsi (Suryana, 2012).

Kabupaten dan kota dibagi di antara setiap provinsi. Salah satu mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintah provinsi yang biasa disebut dengan pemerintah daerah. Badan pemerintahan dalam suatu daerah yang tidak lebih besar dari suatu negara, di mana negara Indonesia adalah negara-negara yang wilayahnya dibagi menjadi provinsi-provinsi, disebut pemerintah daerah.

Wilayah kabupaten dan kota selanjutnya dipisahkan menjadi wilayah provinsi. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang tunduk pada pembatasan hukum. Pemerintah daerah disebut sebagai kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang membawahi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di bawah penguasaan daerah otonom dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan publik oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan asas otonomi dan tanggung jawab perbantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka dan prinsip negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah Gubernur, Bupati, atau Walikota yang dipilih secara demokratis masing-masing menjabat sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di setiap daerah. Seorang wakil kepala daerah, yang dikenal sebagai wakil gubernur untuk provinsi, wakil bupati untuk kabupaten, dan wakil walikota untuk kota, menjabat sebagai asisten kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama memiliki tanggung jawab, wewenang, dan larangan. Selain itu, kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan DPRD.

Gubernur menjembatani dan memperpendek rentang kendali dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, termasuk mendorong dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota, karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat dalam pemerintahan provinsi yang bersangkutan. Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat.

Sebagai agen pemerintah di daerah otonom, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi, dan pendampingan. Desentralisasi adalah pelaksanaan tugas yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang sekarang dialihkan ke pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus berbagai urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, dekonsentrasi adalah penerimaan transfer wewenang pemerintahan oleh Gubernur atau instansi vertikal dalam wilayah tertentu dari Pemerintah pusat untuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu.

Tugas pembantuan merujuk pada pelaksanaan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah, baik kepada daerah maupun desa, oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa dengan tujuan pelaksanaan tugas tertentu. Sementara itu, desentralisasi adalah pelaksanaan tugas yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, yang kini dialihkan ke pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah penerimaan pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di beberapa daerah untuk pelaksanaannya. Co-administrasi memerlukan pelaksanaan semua tugas yang didelegasikan oleh pemerintah federal ke negara bagian, teritori, atau desa; oleh pemerintah provinsi kepada provinsi, kabupaten, atau desa; dan oleh pemerintah kabupaten atau kota ke desa.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, berbeda dengan pemerintahan pusat, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan mutlak, dalam rangka memenuhi tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berbagi

tanggung jawab atas urusan pemerintahan yang merangkap. Prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional menjadi landasan pemisahan tanggung jawab.

Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada masalah pemerintahan. Urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Dua kategori urusan pemerintahan itu harus urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar.

## **6. Model Media Cetak Lokal dengan Pemerintah Daerah**

Pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurut undang-undang, kebebasan pers juga merupakan semacam kedaulatan rakyat yang dibangun di atas cita-cita demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat yang demokratis sangat dipengaruhi oleh media massa (pers) (Mahmud, 2020; Raharjo, 2023)

Trias politika, atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, masih berlaku di negara kita. Tujuan dari bentuk komunikasi massa lainnya adalah untuk menginformasikan masyarakat dan mendorong partisipasi dan kontribusi bagi pembangunan negara. Setelah pemerintah, yudikatif, dan legislatif, media kerap menjadi salah satu kekuatan politik keempat. Selain media elektronik dan online, Kalteng sudah memiliki tiga publikasi cetak, yakni Kaltng Pos, Tabengan, dan Palangka Pos. Ketiganya menjalankan tugasnya sesuai dengan politik media dan realitas media.

Media massa ini harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat maupun pelosok dan menyampaikan informasi yang tidak bias. Jaringan internet, distribusi pasar, dan pembatasan re-

gional mencegah semua orang mengakses informasi ini. Keadaan seperti ini tidak diragukan lagi mempengaruhi seberapa baik media melakukan tugas konstitusionalnya semaksimal mungkin. Hal tersebut berpengaruh pada posisi media massa dimana media menjadi entitas independen yang memiliki kewenangan untuk menyebarluaskan informasi seiring dengan berlangsungnya reformasi politik yang menuntut transparansi informasi.

Media dapat meningkatkan wawasan masyarakat dalam menyikapi pembangunan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah dengan mengambil sikap yang tidak memihak dan transparan dalam pemberitaan dan penyiaran. Pemerintah dapat menggunakan media untuk mensosialisasikan proyek-proyek pembangunan hingga ke pelosok pedesaan dengan bantuan media massa yang peduli terhadap program-program tersebut di daerah (Mahmud, 2020).

## **7. Kontribusi Pers bagi Tumbuhnya Demokrasi**

Sejak tumbangannya pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan reformasi 1998, pers berkembang cukup pesat. Secara khusus, kebebasan pers menawarkan lebih banyak kesempatan bagi media untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan negara yang sepenuhnya demokratis.

Kebebasan pers adalah jenis kebebasan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Novlizal, 2017). Ia mendasarkan penegasan ini pada perjuangan yang terjadi pada tahun 1998, yang salah satunya tertuang dalam pasal 2 sampai dengan 4 UU tersebut. Menurutnya, kebebasan pers memberikan kontribusi yang signifikan bagi demokrasi bangsa. Kerangka demokrasi yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dapat diperkuat dengan mempromosikan kebebasan berbicara, opini publik, dan transparansi informasi. Dia menggunakan kebebasan berekspresi sebagai ilustrasi.

Kebebasan berekspresi secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran masyarakat, yang akan menghasilkan nilai-nilai yang bermanfaat. Hal ini penting karena tanpa adanya kebebasan berekspresi akan terjadi miskomunikasi yang berujung pada konflik, perselisihan di dalam kelompok atau pribadi. Cabang lain dari demokratisasi adalah partisipasi rakyat dalam negara dan penyediaan hak-hak dasar. Singkatnya, kebebasan dapat didefinisikan sebagai hak masyarakat umum untuk berbicara, didengar, dan untuk mengadopsi sikap dan pendapat baik dalam konteks sosial dan artistik.

Demokrasi adalah kebebasan seseorang untuk memilih cara hidupnya sendiri; tidak ada sistem yang menjajah mereka, dan keragaman damai terjadi tanpa campur tangan dari luar. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, seperti mengumpulkan, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik dan dalam bentuk lain, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan saluran yang tersedia.

Ketika membahas demokrasi, lebih baik mengedepankan prinsip-prinsip normatif yang ideal untuk diterima oleh rakyat. Namun, ada situasi ketika keputusan seperti itu tetap buntu tanpa kesimpulan yang jelas. Bahkan ketika negosiasi terhenti, sangat penting bahwa publik diberi tahu dan disadarkan tentang situasi melalui media. Untuk beberapa kelompok, kebebasan pers berikutnya mungkin menawarkan tempat untuk mengakomodasi pengejaran intelektual. Selain itu, media massa dapat menjalankan fungsi sosial yang sangat penting bagi pengembangan demokratisasi penuh melalui informasi yang disampaikan.

Orang mungkin tidak ingin mengambil tindakan di permukaan, tetapi mereka telah disadarkan akan informasi yang sudah

ada dalam pikiran mereka. Orang dapat memutuskan tindakan atau sikap untuk tuntutan sosial mereka sebagai akibat dari puncak informasi. Dari perspektif yang luas, tampak bahwa media memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi populasi.

## 8. Pengertian, Tujuan, Unsur dan Jenis-jenis Branding

### 1) Pengertian Branding

Sebuah nama, kata, tanda, simbol, atau desain, sendiri atau dalam kombinasi, yang berfungsi untuk membedakan sekelompok produk atau jasa penjual dari para pesaing dikenal sebagai branding (Kotler & Keller, 2009). Jika dilakukan dengan benar, branding dapat membantu perusahaan menciptakan citra merek yang luar biasa—persepsi yang dimiliki konsumen tentang merek tertentu—selain berfungsi sebagai alat untuk membangun identitas korporat yang khas.

Pernyataan tentang siapa (identitas), apa yang dilakukan (produk/jasa yang diberikan), dan mengapa merek harus dipilih disebut sebagai branding (hak istimewa). Merek adalah reputasi, dan merek dengan reputasi yang baik adalah merek yang akan dipercaya dan disukai publik (Neumeier, 2003).

### 2) Fungsi dan Tujuan Branding

Jika dilakukan dengan benar, branding dapat membantu perusahaan menciptakan citra merek yang luar biasa—persepsi yang dimiliki konsumen tentang merek tertentu—selain berfungsi sebagai alat untuk membangun identitas korporat perusahaan. Pernyataan tentang identitas merek, tindakan, dan pembenaran untuk dipilih disebut sebagai branding (hak istimewa).

Reputasi merek menentukan kelangsungan hidupnya, dan merek dengan reputasi yang baik menginspirasi kepercayaan dan dukungan publik (Neumeier, 2003). Muchlisin Riadin (Riadi, 2017) mengklaim bahwa rincian berikut dapat digunakan untuk meng-

gambarkan bagaimana fungsi branding:

- a. Diferensiator Awal. Jika suatu produk memiliki merek yang kuat, ia akan menonjol dari para pesaingnya dan mudah dibedakan dari merek lain.
- b. Daya Tarik dan Promosi. Produk dengan merek yang kuat akan lebih efektif diiklankan dan menarik perhatian. Dengan menunjukkan lambang perusahaan, sebuah merek dapat dengan mudah memasarkan barang-barangnya.
- c. Membangun citra, keyakinan diri, jaminan kualitas, dan prestise. Sebuah merek berkontribusi pada pembentukan citra dengan memberikan sarana identifikasi awal kepada orang-orang. Kepercayaan, kualitas, dan prestise suatu produk akan tertanam dalam sebuah merek berkat pengalaman dan pengetahuan tentang produk tersebut.
- d. Manajemen Pasar. Merek yang kuat tidak akan kesulitan mengendalikan pasar. Merek akan berfungsi sebagai peringatan bagi bisnis pesaing untuk mengikuti setiap gerakan yang dibuatnya, dan publik akan diberikan akses ke lebih banyak informasi dengan cepat berkat pengakuan merek.

### 3) Unsur-unsur Branding

Nama dagang atau merek adalah komponen yang paling penting dari sebuah merek. Namun, jika komunikasi pemasaran merek hanya didukung oleh satu simbol atau simbol identifikasi visual yang digunakan secara konsisten dan metodis di berbagai media, itu akan gagal. Berikut ini adalah beberapa komponen branding:

- a. Nama merek
- b. Logo: bendera, monogram, logo, dll.
- c. Daya tarik visual, meliputi desain kemasan, produk, seragam, bangunan, dan kendaraan.

- d. Juru bicara termasuk orang terkenal, pemimpin bisnis, pencipta, dan maskot.
- e. Kata-kata seperti slogan, tagline, akronim, dan jingle.
- f. Audio: musik, lagu tema, suara simbol atau nada.

#### 4) Jenis-jenis Branding

Ada berbagai macam branding, antara lain sebagai berikut:

- a. Merek Produk. Bentuk branding yang paling umum adalah branding produk. Merek atau produk yang berhasil membujuk pelanggan untuk memilihnya daripada merek lain dianggap berhasil.
- b. Merek Individu. Orang-orang publik, seperti politisi, musisi, selebriti, dan lainnya, menggunakan personal branding sebagai strategi pemasaran mereka yang paling populer sehingga mereka dapat memproyeksikan pendapat mereka sendiri kepada publik.
- c. Reputasi perusahaan. Branding perusahaan sangat penting untuk membangun reputasi perusahaan di pasar. Ini harus mencakup semua bidang bisnis, dari barang dan jasa yang diberikan hingga tanggung jawab sosial personel.
- d. Pemasaran Regional. Ketika seseorang mendengar nama suatu lokasi, branding geografis atau regional berusaha memunculkan citra suatu barang atau jasa.
- e. Pencitraan budaya. Pencitraan budaya membangun reputasi untuk lingkungan dan penduduk negara atau lokasi tertentu (Riadi, 2017).

### 9. Pembingkai Berita atau Framing

Dalam sebuah teks komunikasi, pembingkai adalah pemilihan banyak fitur realitas yang diakui yang menyoroti suatu kejadian. Menempatkan informasi dalam konteks tertentu untuk

memprioritaskan isu-isu tertentu di atas yang lain dikenal sebagai framing (Amilia & Andung, 2022). Baterson pertama kali mengusulkan konsep framing pada tahun 1955. Bingkai awalnya digambarkan sebagai kerangka konseptual atau seperangkat asumsi yang mengatur opini politik, peraturan, dan wacana dan menawarkan kategori seragam untuk memahami realitas. Goffman memperluas ide ini pada tahun 1974, dengan asumsi bahwa frame berfungsi sebagai strip perilaku (*strips of behavior*) yang membantu orang memahami realitas (Sobur, 2002). Sebagai metode membuat dan menganalisis berita, Pan dan Kosicki mendefinisikan framing. Alat kognitif yang digunakan dalam pengkodean informasi, interpretasi peristiwa, rutinitas, dan konversi generasi berita (Eriyanto, 2001).

Menurut Pan dan Kosicki, ada dua gagasan framing yang saling berhubungan, yaitu: Pertama, dalam cara psikologi dikonseptualisasikan, pemrosesan informasi internal dan eksternal seseorang dijelaskan dalam kerangka skema tertentu. Kedua, konsepsi sosiologis mengacu pada berbagai perspektif yang digunakan orang untuk menganalisis peristiwa (Poloma Margaret, 2010).

### **C. Landasan Teori**

Hipotesis pertukaran sosial, yang digunakan dalam kajian ini, membuat asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh hasil kontak sosial dengan individu lain yang menawarkan kemungkinan penghargaan, penghargaan, atau hukuman.

Teori ini memberikan kerangka kerja untuk menganalisis perilaku sosial yang berpusat pada pertukaran. Berikut ini adalah keseluruhan nilai dan hubungan pengorbanan dan penghargaan yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan studi ini tentang pertukaran sosial: Menurut perspektif pertukaran sosial, orang menentukan nilai keseluruhan koneksi dengan mengurangi harga yang dibayarkan dari imbalan yang diterima (Monge et al., 2003). Dalam hal ini, teori merupakan alat untuk memahami, membaca,

dan memaknai hubungan antara pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pers lokal. Dengan bantuan teori ini, tujuan dari kajian ini dapat lebih mudah dicapai. Anggapan bahwa orang cenderung mengulangi perilaku mereka jika perilaku masa lalu mereka dihargai sebagai hasil dari interaksi interpersonal adalah salah satu prinsip dasar teori ini.

Seseorang cenderung tidak mengulangi suatu tindakan atau perilaku jika itu mengarah pada interaksi yang tidak menguntungkan, di sisi lain teori pertukaran sosial milik suatu kelompok yang mendasarkan premis-premisnya pada gagasan bahwa orang-orang adalah makhluk rasional yang bertindak dan berperilaku sesuai dengan pertimbangan yang diperhitungkan secara rasional. Studi psikologi dan ekonomi keduanya saat ini menggunakan teori pertukaran sosial secara ekstensif. Namun, sosiolog tradisional George Homans mengembangkan dasar-dasar teoretis dari konsep ini. Gagasan ini diilhami oleh sebuah esai oleh Homans berjudul "Perilaku Sosial sebagai Pertukaran." Hipotesis ini kemudian diperluas oleh sosiolog Richard Emerson dan Peter Blau. Teori pertukaran sosial secara konsisten dicirikan sebagai teori mikro-sosiologis dalam sosiologi.

Psikolog John Thibaut dan Harlod Kelley (1959), sosiolog George Homans (1961), ekonom Richard Emerson (1962), dan psikolog Peter Blau (1962) adalah beberapa individu yang mendirikan teori pertukaran sosial (Ritzer & Stenisky, 2019). Teori pertukaran sosial George C. Homan diterapkan dalam kajian ini. Dalam inti teori pertukaran George Homans, terdapat beberapa proposisi dasar yang ada. Meskipun beberapa dari proposisi ini terkait dengan interaksi dua individu atau lebih, Homans dengan hati-hati menjelaskan bahwa prinsip-prinsip psikologis menghasilkan proposisi-proposisi.

Menurut Homans, ada alasan-alasan psikologis yang mendasari pandangan ini. Pertama, proposisi-proposisi ini biasanya

diajukan dan dicoba oleh individu yang mengidentifikasi diri sebagai psikolog. Kedua, yang lebih penting, sifat psikologis dari proposisi-proposisi ini terkait dengan tingkat individu dalam masyarakat. Meskipun Homans membangun dasarnya pada prinsip-prinsip psikologi, ia tidak menganggap individu sebagai entitas yang terisolasi. Dia mengakui sifat sosial manusia dan pengaruh interaksi sosial yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Upayanya adalah untuk menjelaskan perilaku sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologis, dan dia mengasumsikan bahwa proposisi-proposisi psikologi umum, yang berbicara tentang dampak hasil pada perilaku manusia, tetap berlaku saat ini ini berasal dari manusia lain daripada lingkungan fisik (Ritzer & Stenisky, 2019).

Homans tidak menyangkal pendirian Durkheimian bahwa sesuatu yang baru muncul dari interaksi. Sebagai gantinya, dia berargumen bahwa sifat-sifat yang muncul itu dapat dijelaskan oleh prinsip-prinsip psikologi; proposisi-proposisi sosiologi yang baru tidak perlu menjelaskan fakta-fakta sosial. Sebagai ilustrasi, dia menggunakan konsep sosiologi dasar mengenai norma. Homans merincikan rencana untuk mengembalikan orang-orang ke bidang sosiologi, sambil berupaya membangun teori yang menitikberatkan pada psikologi, individu, dan aspek-aspek dasar kehidupan sosial. Menurut pandangan Homans, teori ini mengkonsepsikan perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas yang dapat berwujud atau tidak, dengan imbalan yang dapat berupa keuntungan atau kerugian, antara paling tidak dua orang. (1961:13). Secara lebih umum, teori pertukaran menurutnya mengenai teori pertukaran, menjelaskan perilaku sosial elementer dalam kerangka penghargaan dan kerugian. Di sisi lain, Koleganya, Talcott Parsons, berhasil memotivasinya dalam teori-teori fungsional-struktural. Dia berargumen bahwa teori-teori demikian memiliki segala kebajikan kecualli dalam menjelaskan apa saja (Ritzer & Stenisky, 2019).

Bagi Homans, fungsionalis struktural melakukan sesuatu yang sangat berbeda dengan menciptakan kategori dan skema konseptual. Homans mengakui bahwa sosiologi sains memerlukan kategori-kategori ini, namun sosiologi juga memerlukan serangkaian proposisi umum tentang hubungan antar kategori, karena tanpa proposisi-proposisi ini penjelasan tidak mungkin dilakukan. Tanpa proposisi tidak ada penjelasan (1974: 10). Oleh karena itu, Homans merumuskan proposisi yang berfokus pada aspek psikologis, dan berawal dari ini lah yang menjadikan dasar teori pertukaran.

Proposisi keberhasilan adalah konsep yang dijelaskan oleh Homans pada tahun 1974, yang menyatakan bahwa semakin sering seseorang mendapatkan penghargaan untuk suatu tindakan, semakin mungkin mereka akan mengulangi tindakan tersebut. Dalam konteks contoh yang diberikan oleh Homans di sebuah kantor, konsep ini mengimplikasikan bahwa seseorang akan lebih cenderung mencari nasihat dari orang lain jika mereka telah diberi penghargaan sebelumnya atas nasihat yang bermanfaat. Selain itu, semakin sering seseorang menerima nasihat yang bermanfaat di masa lalu, semakin besar kemungkinan mereka akan mencari nasihat lebih sering.

Hal yang sama berlaku untuk orang yang memberikan nasihat. Mereka akan lebih bersedia memberi nasihat dan melakukannya lebih sering jika mereka sering mendapatkan penghargaan dalam bentuk persetujuan dari tindakan mereka di masa lalu. Secara umum, konsep keberhasilan mencakup tiga tahap: pertama, tindakan seseorang; kedua, hasil yang mendapatkan penghargaan; dan akhirnya, pengulangan tindakan atau tindakan serupa, setidaknya dalam beberapa aspek.

Homans juga mengemukakan beberapa hal penting tentang konsep keberhasilan. Pertama, meskipun penghargaan yang diberikan secara konsisten dapat meningkatkan frekuensi tinda-

kan, ada batasan pada sejauh mana hal ini dapat terjadi. Pada titik tertentu, individu mungkin tidak dapat terus mengulangi tindakan seperti yang sering dilakukan. Kedua, semakin cepat penghargaan diberikan setelah tindakan dilakukan, semakin besar kemungkinan tindakan tersebut akan diulang. Sebaliknya, semakin lama jarak waktu antara tindakan dan penghargaan, semakin rendah kemungkinan tindakan tersebut akan diulang. Akhirnya, Homans menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan secara tidak teratur lebih cenderung menghasilkan pengulangan perilaku daripada penghargaan yang diberikan secara teratur. Penghargaan yang diberikan secara teratur dapat menyebabkan kebosanan dan kejenuhan, sementara penghargaan yang tidak teratur lebih mungkin mendorong pengulangan perilaku.

Penghargaan yang memiliki nilai tinggi akan mengalami penurunan nilai jika aktor-aktor menganggap bahwa mereka sulit untuk mendapatkannya. Sebaliknya, penghargaan yang memiliki nilai rendah akan meningkat nilainya jika dianggap sangat mungkin untuk diperoleh. Dengan demikian, terdapat interaksi antara nilai penghargaan dan peluang untuk mencapainya. Penghargaan yang paling diinginkan adalah yang memiliki nilai tinggi dan mudah dicapai. Sedangkan, yang paling tidak diinginkan adalah penghargaan yang memiliki nilai rendah dan kemungkinan besar tidak dapat dicapai.

Misalnya dalam bidang psikologi, George C. Homans terkenal dengan teorinya tentang perdagangan sosial di tingkat mikro. Menurutnya, tidak seperti mesin, tubuh manusia tidak berkembang secara organik atau dengan cara yang tidak terpikirkan oleh seseorang. Suatu perilaku atau tindakan manusia itu sendiri yang berdampak pada tindakan dan pikiran seseorang adalah sesuatu yang berlaku. Sesuai dengan Homans, seseorang akan lebih cenderung untuk melakukan suatu tindakan tertentu jika diberi imbalan lebih sering daripada aktivitas lainnya. Kemungkinan suatu

tindakan diulangi meningkat seiring dengan betapa berharganya hasil dari aktivitas tersebut bagi orang tersebut.

Keadilan Distributif, atau aturan yang menyatakan bahwa pengembalian harus sepadan dengan investasi, adalah prinsip dasar pertukaran sosial. Seseorang dalam hubungan pertukaran dengan orang lain akan mengantisipasi bahwa masing-masing pihak akan berbagi imbalan sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan; semakin besar pengorbanannya, semakin besar pahalanya; dan bahwa masing-masing pihak juga akan berbagi keuntungan secara proporsional dengan investasi; semakin besar investasi, semakin besar keuntungannya.

# BAB III

## HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini ditulis tentang terkait dengan setting lokasi kajian yang terdiri dari profile dan sejarah singkat tentang tiga media cetak harian yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian dipaparkan hasil kajian dalam bentuk wawancara kepada subjek kajian maupun informan. Pada bagian akhir diungkapkan tentang pembahasan hasil kajian.

### A. Gambaran Umum

#### 1. Profil Surat Kabar Harian Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post

##### a. Kalteng Pos

Kalteng Pos didirikan pada bulan September 1993 dengan sebuah nama koran yang sangat mendukung daerah asalnya, yaitu Provinsi Kalteng. Awalnya, nama ini menimbulkan kritik tajam dari Departemen Penerangan (Deppen) karena izin usaha penerbitan (SIUP) koran tersebut awalnya menggunakan nama "Pelita Pembangunan" dan bukan "Kalteng Pos." Namun, ketika nama ko-

ran diubah menjadi "Pelita Pembangunan," ternyata nama tersebut tidak diminati oleh pembaca.

Lebih dari lima tahun terbit dengan nama "Pelita Pembangunan" dengan angin segar, reformasi telah selesai dan Orde Baru telah digulingkan. Batasan hukum pers telah berubah total. Untuk membuka surat kabar tidak perlu lagi memiliki SIUP, cukup berbadan hukum, siapapun bisa. Pastikan juga untuk mengubah nama menjadi SIUP. Sekedar pemberitahuan, prosedur ganti nama sudah ditangani pihak Pengaduan, kami kembali menggunakan nama yang sangat dekat dengan daerah. "Kalteng Pos", sekitar tahun 1998 hingga sekarang.

Latar belakang berdirinya Kalteng Pos berasal dari situasi di era 1990-an ketika Kalimantan Tengah (Kalteng) menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan jumlah "surat kaleng" yang banyak dikirimkan oleh warganya ke Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Presiden. Hal ini mendorong Gubernur Suparmanto (alm) pada saat itu untuk mempertimbangkan perlunya wadah yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengurangi frekuensi pengiriman "surat kaleng" ke pemerintah pusat. Gubernur Suparmanto (alm) kemudian menghubungi Menteri Penerangan pada saat itu, yang dijabat oleh Harmoko, dan menyampaikan keinginannya agar di Kalimantan Tengah ada surat kabar harian. Menyikapi permintaan tersebut, Menpen Harmoko segera menghubungi Dahlan Iskan dan mendorongnya untuk berinvestasi sebagian dana pribadinya dalam mendirikan surat kabar harian di Kalimantan Tengah.

Hasil survei secara profit tidak layak saat itu mendirikan koran harian, namun karena ada kepentingan yang lebih besar, akhirnya sepakat membangun koran harian di Kalteng dengan pemegang saham adalah Jawa Pos, Pemda Kalteng, dan Yayasan Pelita Press.

Hasil survei yang dilakukan oleh Jawa Pos pada tahun 1993 menunjukkan bahwa sebuah koran baru dapat mencapai keun-

tungan jika memiliki sirkulasi sebanyak 6000 eksemplar atau lebih. Jika sirkulasinya berada dalam kisaran 6000, koran masih hanya cukup untuk menutupi biaya produksinya, namun jika sirkulasinya kurang dari itu, maka perusahaan pasti akan mengalami kerugian. Dengan demikian, dapat dipahami seberapa sulitnya tantangan dalam memasarkan koran saat itu. Bahkan hanya untuk mencapai angka sirkulasi sebanyak 1000 eksemplar saja merupakan tugas yang sangat berat, sehingga pada saat itu, harapan utama ada pada dukungan Pemerintah Daerah. Seiring waktu, Kalteng Pos ternyata bisa tumbuh, walau sangat pelan, tapi pasti. Tiras kita terus bertumbuh, omzet iklan juga menaik. Ini adalah tanda bahwa masyarakatnya sudah paham memakai sepatu.

Keberadaan saham milik Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalteng Pos selama ini dianggap mempengaruhi netralitas pemberitaan, namun sebenarnya hal tersebut tidak benar. Meskipun dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak tercantum bahwa pemegang saham memiliki kendali penuh atas kebijakan dan arah redaksi, Kalteng Pos tetap menjalankan praktik bisnisnya secara profitabel setiap tahunnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta pertumbuhan kinerja perusahaan tetap terjaga setiap triwulan. Meskipun demikian, persepsi ini telah membuat Kalteng Pos merasa tidak nyaman. Sejak tahun 2000, Kalteng Pos telah berusaha melepaskan kepemilikan saham oleh Pemda, namun belum menemukan cara yang tepat untuk melakukannya. Di era Gubernur Asmawi Agani, muncul keinginan untuk cabut saham Pemda di Kalteng Pos, terutama karena Gubernur merasa bahwa Kalteng Pos tidak bersahabat dalam pemberitaannya menurut pandangannya. Hal serupa terjadi pada era Gubernur Teras Narang dalam periode pertamanya. Meskipun Kalteng Pos tidak dapat sepenuhnya menghindari keterlibatan birokrasi, perannya sebagai media sosial kontrol telah membuatnya tetap diminati oleh pembaca.

Dalam perjalanannya, muncul permintaan dari koran-koran kecil agar Pemerintah Daerah (Pemda) bersikap adil dan menarik kembali kepemilikan sahamnya di Kalteng Pos. Pada saat itu, ada anggapan bahwa Kalteng Pos akan mengalami kesulitan. Namun, pada kenyataannya, Kalteng Pos merasa senang dan bersyukur atas tindakan tersebut. Tidak memerlukan usaha berlebihan, saham tersebut segera ditarik kembali. Mendekati akhir empat tahun kepemimpinannya di Kalteng, Teras Narang memutuskan untuk mencabut saham Pemda. Oleh karena itu, Kalteng Pos merasa bersyukur karena kini telah bebas dan dapat lebih independen dalam menjalankan operasinya.

SKH Kalteng Pos adalah nama produknya. Penerbitnya adalah PT Kalteng Pos Press. Percetakannya kini terpisah, tidak lagi bergabung penerbit. Maka produk SKH Kalteng Pos itu dicetak pada percetakan PT Kalteng Media Grafika. Pemisahan antara penerbit dan percetakan ini penting supaya perusahaan sehat dan tidak saling membebani. Sebagai anak perusahaan Jawa Pos, Dirut Kalteng Pos saat itu dijabat langsung oleh Dahlan Iskan. Seiring waktu, ketika media grup Jawa Pos se-Indonesia bertumbuhan, Dahlan Iskan akhirnya menyerahkan posisi direktur utama kepada H.Zaenal Muttaqin, yang juga dirut Kaltim Post, Radar Banjarmasin, Radar Sampit, dan Radar Sulteng.

Kemudian perkembangan beberapa tahun terjadi peralihan kepemilikan Jawa Pos Group termasuk Kalteng Pos. Dahlan Iskan dan beberapa orang kepercayaannya tidak lagi memimpin Jawa Pos Group. Sekarang ini Kalteng Pos Group memiliki media online, radio dan TV. (Sumber Kalteng Pos).

## **b. SKH Tabengan**

Harian Tabengan yang dimodali oleh keluarga Narang dengan Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan Andrey L. Narang, dimaksudkan sebagai jembatan informasi bagi masyarakat Ka-

limantan Tengah. Jembatan informasi aktual, dan penting (bahkan vital) dalam menumbuhkan spirit membangun masyarakat Kalteng.

Tanggal 12 Oktober 2009 di Kalteng telah lahir sebuah surat kabar harian baru di antara tiga suratkabar Harian lainnya yaitu Kalteng Pos, Palangka Post dan Dayak Pos. Harian baru itu diberi nama Tabengan, yang berarti titian, sebuah nama khas Dayak. Kata titian atau tabengan itu sendiri sudah melukiskan peran kehadiran di tengah masyarakat yaitu menyambung tebing-tebing yang sebelumnya terpisah satu sama lain, entah tebing itu bernama komunitas, etnik atau kelompok atau kelas-kelas sosial. Surat kabar Harian Tabengan melalui kehadirannya ingin menghilangkan sekat-sekat, menyambungkan ruang pemisah itu. Merekatkan mereka jadi satu sebagai Uluh Kalteng melalui informasi dan opini yang ia bawakan. Melalui berita dan opini mencerahkan karena memang salah satu fungsi media massa memang bersifat edukatif. Ketika ruang pemisah atau sekat-sekat itu tersambung oleh sebuah tabengan ide, ketika kesadaran Uluh Kalteng lahir, maka pertanyaan berikutnya: Mau ke mana dan mau apa Uluh Kalteng itu? Harian Tabengan menjawabnya dengan motto yang selalu tertera saban terbit bahwa ide atau spirit itu ditujukan untuk “Membangun Kalteng”.

Harian umum Tabengan hadir menambah jumlah harian-harian umum yang sudah ada sebelumnya : Kalteng Pos, Palangka Post, Dayak Post, Sinar Kalteng dan Bidik Kalteng serta beberapa Tabloid seperti Bawi, Detak, dan lain-lain.(Sumber Tabengan)

### **c. SKH Palangka Post**

Beberapa tahun tahun lalu, persaingan media massa tak seramai sekarang. Kala itu, belum ada media sosial, apalagi media daring. Selain dari televisi dan radio, satu-satunya pilihan masyarakat untuk memperoleh informasi terkini adalah media cetak.

Jumlah media cetak sangat terbatas. Hanya ada satu koran yang terbit setiap hari, selebihnya merupakan koran mingguan, dwimingguan, bahkan kebanyakan koran yang terbit sekali sebulan alias koran bulanan. Akibatnya masyarakat cukup kesulitan memperoleh informasi teraktual yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berangkat dari niat untuk menyajikan informasi teraktual, faktual, akurat, dan rutin setiap hari, sekelompok orang mulai merancang media baru yang diharapkan akan membuka wawasan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Mereka diantaranya Haji Abdul Rasyid AS, HM Ruslan AS, Ir B Saptanoesa Wenthe MM (almarhum), Drs Hidayatullah S Kurik MBA (almarhum), Muhammad Hatta (almarhum), Syaifuddin BP (almarhum), dan Esmada Ugang (almarhum).

Untuk memuluskan rencana menerbitkan koran harian, mereka membuat perusahaan penertbitan yang diberi nama PT Media Palangka Pabelum. Ada banyak calon nama media cetak yang hendak diterbitkan kala itu. Namun, pilihan dijatuhkan pada Palangka Post yang eksis hingga kini.

Singkat cerita, terbitlah koran Palangka Post untuk pertama kali tanggal 15 November 2001. Meski legalitas sebagai perusahaan penerbitan media cetak baru diperoleh satu bulan berikutnya, tepatnya berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977 T.01.01.TH.2001, tanggal 24 Desember 2001.

Drs Hidayatullah S Kurik MBA didaulat sebagai komisaris utama, dan Ir B Saptanoesa Wenthe MM sebagai pemimpin umum sekaligus pemimpin. perusahaan. Sedangkan Esmada Ugang dipercaya memangku jabatan sebagai wakil pemimpin perusahaan.

Syaifuddin BP atau akrab disapa Bang Udin didaulat sebagai pemimpin redaksi. Adapun Muhammad Hatta, TT Suan, dan Ir B Saptanoesa Wenthe MM merupakan dewan redaksi yang pertama

di Palangka Post.

Saat pertama kali terbit, harian umum Palangka Post ber Kantor di Jalan Kutilang. Belum memiliki mesin percetakan sendiri. Kala itu pencetakan koran Palangka Post masih menumpang di PT Tunjung Nyaho Mitra Raya. Perusahaan yang berdiri atas kerja sama antara Universitas Palangka Raya dan pengusaha Abdul Raszyd AS.

Sarana dan prasarananya sangat minim. Awak redaksi terpaksa bergantian menggunakan komputer yang hanya tersedia beberapa unit. Sistem pengiriman berita dari koresponden tak secanggih sekarang. Hanya faksimili satu-satunya fasilitas pengiriman berita dari daerah.

Palangka Post bahkan harus mempekerjakan petugas khusus sebagai tukang ketik ulang berita kiriman dari koresponden. Namun keterbatasan itu, tak menyurutkan semangat untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kalimantan Tengah.

Terbit setebal 16 halaman, Palangka Post mulai menyapa pembaca dengan menyajikan berita-berita terbaru dan faktual. Palangka Post diisi dengan sejumlah halaman berwarna hadir setiap hari menyapa pembacanya.

Di bawah komando Bang Udin sebagai pemimpin redaksi kala itu, Palangka Post mulai menyajikan berita-berita dari berbagai penjuru Kalimantan Tengah sebelum pemekaran kabupaten.

Berita sosial, politik, olahraga, kriminal, kesehatan, pendidikan, disajikan sedemikian rupa agar masyarakat yang berada di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kecamatan Administratif Barito Timur, memperoleh informasi yang terbaru yang akurat.

Pada tataran majemen, Palangka Post beberapa kali melakukan pergantian. Tahun 2003 Pemimpin Umum yang dijabat Saptanoesa Wenthe, dipercayakan kepada Hidayatullah S Kurik. Namun tahun 2005, Hidayatullah S Kurik meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Akhirnya jabatan Pemimpin Umum dikembalikan kepada Saptanoesa Wenthe.

Pergantian Pemimpin Umum tahun 2005, diiringi pulang dengan pergantian Pemimpin Redaksi. Ketika Syaifudin BP dipercaya menjadi Wakil Pemimpin Umum. Sedangkan Pemimpin Redaksi dipercayakan kepada Muhammad Hatta. Waktu terus berlalu, Palangka Post mulai melakukan pembenahan.

Dalam upaya melakukan pembenahan, struktur organisasi Palangka Post kembali berubah. Itu diawali dengan Syaifudin BP yang membangun sebuah media televisi. Beliau memutuskan untuk menyerahkan jabatan Wakil Pemimpin Umum kepada manajemen. Selanjutnya, perubahan kembali terjadi tahun 2008.

Pemimpin Umum Palangka Post Saptanoesa Wenthe, meninggal dunia akibat sakit. Tak ayal, struktur organisasi di Palangka Post kembali terjadi perubahan. Pemimpin Umum dipercayakan kepada Muhammad Hatta, sekaligus sebagai Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan. Tidak berselang lama, jabatan Pemimpin Redaksi dipercayakan kepada Zulfirman Tanjung.

Struktur organisasi Palangka Post, kembali mengalami perubahan pada tahun 2012. Ketika itu, Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi dipercayakan kepada Masliansyah. Sedangkan Pemimpin Perusahaan masih dijabat Muhammad Hatta. Tidak lama berselang, jabatan Pemimpin Redaksi dipercayakan kepada Muhammad Zainal.

Kepemimpinan Masliansyah hanya berlangsung beberapa bulan. Rapat umum pemegang saham memutuskan, jabatan Pemimpin Umum ditiadakan. Manajemen Palangka Post dipimpin seo-

rang Head of Media. Jabatan baru tersebut dipercayakan kepada Yohanes Widada. Pemimpin Redaksi tetap dipercayakan kepada M Zainal, sedangkan Pemimpin Perusahaan dijabat Revy Apriani.

Perubahan pada tataran manajemen, kembali terjadi tahun 2016. Ketika itu, rapat umum pemegang saham memutuskan untuk mengganti Head of Media. Yohanes S Widada memasuki usia pensiun. Jabatan Head of Media dipercayakan kepada Revy Apriani hingga sekarang. Sedangkan pada jabatan Pemimpin Redaksi, mengalami pergeseran.

M Zainal yang menjabat sebagai Pemimpin Redaksi sejak tahun 2012, mengundurkan diri. Manajemen melakukan lelang jabatan Pemimpin Redaksi. Seleksi Pemimpin Redaksi diikuti tiga orang M Haris Sadikin, Hairil Supriadi, dan Pariyanto. Tahun 2019 manajemen mempercayakan jabatan Pemimpin Redaksi kepada M Haris Sadikin hingga sekarang.

Dalam perjalanannya, Palangka Post sering kali berpindah kantor. Mulai dari kantor pertama di Jalan Kutilang, bergeser ke ruko di Jalan RTA Milono (seberang SPBU), kemudian pindah lagi ke Jalan RTA Milono Km 4 (komplek perumahan Betang).

Tak lama berselang, karyawan harus angkut-angkut lagi ke kantor baru di salah satu ruko di seberang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasinya masih di Jalan RTA Milono. Terkini, Palangka Post menempati ruko berlantai tiga di Jalan G Obos.

Begitu pun dengan jumlah halamannya. Dimulai dari 16 halaman per eksemplar, sempat berkembang menjadi 24 halaman. Tapi suatu ketika Palangka Post pernah menukik menjadi delapan halaman. Kini Palangka Post konsisten terbit 20 halaman setiap hari. Jumlah halaman itu dianggap ideal untuk mengakomodasi informasi terbaru yang terjadi di Kalimantan Tengah.

Di tengah derasnya arus persaingan media mainstream, Palangka Post membuktikan kekokohnya. Sebagai salah satu pionir media cetak harian di Bumi Tambun Bungai, Palangka Post tetap bertahan hingga kini, meski sudah tak terhitung media serupa yang sudah tumbang.

Beberapa halaman Palangka Post bahkan dikontrak pemerintah daerah dan instansi pemerintah. Himpitan zaman di era digital saat ini tak membuat Palangka Post tergerus. Persaingan yang dahsyat di tengah kecanggihan teknologi informasi bahkan membuat Palangka Post semakin tegak berdiri.

#### **Pemimpin Umum dari masa ke masa:**

B Saptanoesa Wenthe	(2001-2003)
Hidayatullah S Kurik	(2003-2005)
B Saptanoesa Wenthe	(2005-2008)
Muhammad Hatta	(2008-2012)
Masliansyah	(2012)
Yohanes Widada	(2012-2016)
Revy Apriani	(2016-Sekarang)

#### **Pemimpin Redaksi**

Syaifudin BP	(2001-2005)
Muhammad Hatta	(2005-2009)
Zulfirman Tanjung	(2009-2012)
Masliansyah	(2012)
M Zainal	(2012-2018)
M Haris Sadikin	(2019-Sekarang)

#### **Pemimpin Perusahaan**

B Saptanoesa Wenthe	(2001-2003)
Hidayatullah S Kurik	(2003-2005)

B Saptanoesa Wenth	(2005-2008)
Muhammad Hatta	(2008-2012)
Revy Apriani	(2012-Sekarang)

### **Redaksi Palangka Post**

Jalan Kutilang Palangka Raya	(2001-2004)
Jalan RTA Milono km 2 Palangka Raya	(2004-2007)
Jalan RTA Milono km 4 Palangka Raya	(2007-2012)
Jalan RTA Milono km 5 Palangka Raya	(2012-2014)
Jalan G Obos No 30 kav 1-2 Palangka Raya	(2014-Sekarang)

## **B. Subyek dan Informan Kajian**

Dalam kajian ini terdiri dari sembilan subyek peneltiian yakni tokoh yang merupakan para aktor yang memiliki dan berhubungan langsung dengan relasi pers sedangkan infroman dalam kajian ini ada enam orang yang memiliki keahlian atau pengalaman mereka yang relevan dengan topik kajian.

### **1. Subyek Kajian**

#### **a) Ir. H. Abdul Razak**

Nama	: Ir H Abdul Razak
Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Kalteng/Ketua Dewan Pembina Golkar Kalteng
Umur	: 73 Tahun
Alamat	: Jl. S Parman (Gedung DPRD Kalteng)
Wawancara	: - 04 Desember 2021 Pukul 09.00-09.45 Wib - 12 Desember 2021 Pukul 07.15-09.11 Wib

Ir. Abdul Razak adalah Wakil Ketua DPRD Kalteng periode 2019-2024. Lahir di Pangkalan Bun, 10 November 1949. Alamat tinggal Jalan G.Obos nomor 45 Palangka Raya. Jabatan strategis dari eksekutif hingga legislatif pernah didudukinya antara lain se-

bagai bupati Kotawaringin Barat, ketua DPD Golkar Kalteng, Wakil Ketua DPRD, Ketua Bappeda kabupaten hingga Bappeda Kalteng.

Selama ini menurutnya selama tiga periode sebagai Wakil Ketua DPRD, perhatian dan bantuan dari media cetak, elektronik terhadap upaya memberikan informasi kepada masyarakat itu sangat baik. Sehingga dengan informasi yang diberikan masyarakat bisa mengetahui perkembangan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng, banyak membantu memberikan informasi yang benar, jadi masyarakat tahu apa yang dilakukan Pemprov yang berkaitan dengan legislatif DPRD Provinsi Kalteng, sehingga masyarakat tahu, dan bisa menilai pelaksanaan pembangunan kota.

“Saya kira secara umum kontrol sosial itu objektif, artinya kalau memang perlu dikritik ya dikritik. Jadi media profesional aja lah intinya”.

#### **b) H. Habib Ismail Bin Yahya**

Nama : H. Habib Ismail Bin Yahya  
Jabatan : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ke-8  
Umur : 53 Tahun  
Alamat : Jalan G Obos XIV Nomor 057 Palangka Raya  
Wawancara : -15 Desember 2020 Pukul 11.12 – 12.00 Wib  
- 29 Desember 2020 Pukul 08.14 – 09.45 Wib

Habib H. Ismail bin Yahya merupakan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ke-8 periode 2016-2021 berpasangan dengan Gubernur H Sugianto Sabran. Lahir di Banjarmasin pada 4 Desember 1970. Alamatnya Jalan G Obos XIV Nomor 057. Sebelumnya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2015. Dengan perolehan suara sebesar 182.251. Di tengah perjalanan sebagai senator asal Kalteng dia diminta Sugianto untuk mendampinginya sebagai wakil gubernur.

Sebelumnya ayah enam anak ini dikenal sebagai ustaz dan pendiri dan pembina Majelis Taklim Balghaist Alwasilah yang berpusat di Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Mulanya beliau merintis majelis taklim ini hanya diikuti Jemaah yang masih relative sedikit, namun dalam perkembangannya dalam waktu yang tidak lama jemaah pengajian berkembang pesat bahkan mencapai ribuan Jemaah. Tidak hanya dari penduduk Kuala Kapuas saja, tetapi juga datang dari berbagai penjuru bahkan dari kabupaten lain. Menurut Habib setiap hari besar keagamaan Islam, beliau keliling diminta masyarakat untuk menyampaikan tausyiah. Mungkin karena banyaknya jemaah dan masyarakat yang mengenal dan tertarik kepada beliau maka pada banyak masyarakat yang meminta Habib menjadi wakil rakyat atau anggota DPRD Kalteng pada 2004.

“Alhamdulillah, saya diminta oleh masyarakat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kalteng dari daerah pemilihan (dapil) 2 yaitu Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Alhamdulillah karena Rahmat Allah, Swt saya terpilih sebagai wakil rakyat,” jelas Habib Ismail.

Habib Ismail terpilih dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Istimewanya beliau satu-satunya wakil rakyat yang terpilih dari partai tersebut di tingkat Provinsi Kalteng dan tidak ada satu pun yang terpilih di 14 kabupaten/kota se Kalteng. Berbeda dengan partai lain, kalau duduk di dewan tingkat provinsi pasti ditopang perolehan suara partai di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, berkat kepercayaan masyarakatlah khususnya dari Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau lah yang menghantarkannya jadi wakil rakyat dan dimulainya beliau duduk di panggung politik.

Saat duduk di DPRD Kalteng itu, menurut Habib Bersama dengan anggota DPRD dari partai lain untuk bergabung dalam sebuah fraksi. Pasalnya beliau hanya sendiri dari dari PKNU dan belum memenuhi syarat untuk membentuk fraksi sendiri. Saat itu

lah, kata Habib, dia berjuang menyalurkan aspirasi masyarakat asal daerah pemilihannya yaitu dari Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Sementara untuk memperjuangkan aspirasi seluruh masyarakat dari 14 kabupaten/kota melalui komisi DPRD Kalteng melalui mitra kerja komisi yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (PPD) Provinsi Kalteng.

Saat menjadi anggota DPRD Kalteng beliau banyak bergaul dengan rekan-rekan media. Kerjasama dengan media saat itu sangat harmonis. Dia berkesan dengan kinerja wartawan dalam menyampaikan aspirasi dan keberhasilan perjuangan yang beliau lakukan kepada masyarakat.

“Hubungan saya dengan kawan kawan jurnalis sangat baik waktu saya menjadi anggota DPRD Kalteng dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kadang saya yang mengundang mereka tetapi sering juga mereka yang datang untuk mewawancarai saya maupun kawan-kawan anggota dewan yang lain,”ucapnya.

Setelah lima tahun menjadi wakil rakyat maka atas permintaan masyarakat dia melanjutkan perjuangan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Provinsi Kalimantan Tengah.

Menjadi anggota DPD RI, kata Habib ternyata berhenti di tengah jalan. Seyogyanya lima tahun 2014-2019, tetapi baru satu tahun, tepatnya 2015 dia mengundurkan diri sebagai anggota DPD RI. Karena diminta oleh partai pengusung H Sugianto, mendampingi sebagai wakil gubernur untuk maju pada Pemilu kepala daerah 2016.

Sejak dilantik menjadi Wakil Gubernur, kami bersama membuka diri kepada seluruh masyarakat. Berupaya jangan ada sekat antara pendukung calon pasangan yang kalah dan saatnya untuk bersama-sama membangun Kalteng. Termasuk dengan semua ka-

langan media untuk melakukan kerjasama. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan untuk memajukan perkembangan media di Bumi Tambun Bungai ini.

Menurutnya Pers sangat bermanfaat untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan di pemerintahannya. Pertama pihaknya bisa menginformasikan tentang kinerja mereka tentang program-program pembangunan, imbauan-imbuhan serta peraturan-peraturan yang diproduksi oleh pemerintah provinsi bersama DPRD Kalteng.

Melalui Kerjasama dengan pers lokal juga bisa mengetahui tentang keadaan Kalteng secara keseluruhan. Jadi pihaknya sadar bahwa pers ini sangat penting, karena lewat pers juga mereka bisa menegtahui apresiasi masyarakat tentang kinerja-kinerja yang telah dihasilkan dari pemerintahan ini.

Oleh sebab itu, tentunya pemprov ini juga sangat mendukung dan sangat terbuka terhadap media karena disadari keberadaan pers merupakan pilar demokrasi. Dijamin kebebasan berpendapat dalam menyampaikan informasi -informasi akurat. Tentunya informasi itu bukan informasi abal-abal dan persnya juga bukan abal-abal, makanya Pemprov selama kami menjabat periode 2016-2021 juga sangat selektif dalam memilih media yang akan dijadikan mitra. Hal itu dilakukan karena keuangan Pemprov untuk melakukan Kerjasama itu terbatas dan harus dipertanggung jawabkan.

Pihaknya juga sering mengimbau dan meminta kepada pers atau media, khususnya media yang memang ada kerjasama dgn pemprov untuk juga bisa menuangkan berita yang bisa mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik. Misalnya kita melalui media menyebarkan imbauan misalnya tentang prokes.

Menurutnya, pihaknya dalam menyampaikan informasi ini mengadakan kontrak dengan beberapa media cetak. Kerjasama

ini tidak hanya dengan media besar saja tetapi juga merangkul media-media kecil. Baik media cetak besar maupun online. Karena melalui media ini kita harapkan komunikasi dengan antara pemerintah dengan masyarakat jadi positif.

Dia menyadari, bahwa masyarakat dan pemerintah tidak bisa langsung dan berbicara langsung dengan luasnya. Apalagi daerah pelosok, jadi lewat media lah kita berkomunikasi. Masyarakat mungkin mengeluarkan statement-statementnya terkait aspirasi dan keinginan-keinginannya melalui media. Setelah itu pihaknya simak dan menjawab permintaan masyarakat tersebut melalui media juga.

Untuk membantu pengembangan media ini, menurutnya Pemprov telah memberikan bantuan dengan media ini cukup signifikan. Apalagi saat kondisi covid, perusahaan media banyak yang bisa terbantu dan bertahan untuk tetap terbit karena didukung oleh pemprov.

Begitu pun sebaliknya, apa yang telah diberikan media kepada pemprov sebagian sudah sesuai harapan dari pemprov. Pihaknya tidak pernah membatasi pemberitaan yang harus baik-baiknya saja. Silahkan sampaikan kritik-kritik tapi dengan cara yang baik.

“Media ini bagi saya, bukan hanya untuk memberitakan tentang kinerja aparat pemerintahan kinerja pejabat-pejabat yang ada, tapi juga saya sangat senang andaikata media ini juga memberitakan atau mencatumkan kritik-kritik yang sifatnya membangun. Bukan fitnah. Artinya kritik yg disertai dengan solusinya,” katanya.

Memang diasadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Begitu pun dengan pemberitaan. Pernah juga ada terbit berita yang tidak sesuai kenyataan namun pihaknya klarifikasi melalui humas bahwasanya itu tidak benar. Kita kan punya hak jawab.

“Iya kadang-kadang kita bingung ya. Kita sudah kerjasama, kita sudah saling membina, ternyata masih ada juga yang miss dari pemberitaan,” ucapnya.

Sebenarnya pihaknya berharap, walaupun mitra pemerintah media tidak selalu memuji. Tetapi juga sebagai pengawas jalannya pembangunan, pengawas infrastruktur yang ada dan sebagai pembanding atau boleh dikatakan supaya ada balance, keseimbangan dalam pemberitaan.

Sehingga benar-benar memberitakan tentang keadaan masyarakat yang sesungguhnya dan juga sebaliknya keadaan pemerintah yang sesungguhnya. Terkait masih adanya informasi yang tidak benar diperlukan tabayun dan konfirmasi.

Dia juga mengharapkan fungsi pers itu antara lain sebagai fungsi informasi, pendidikan dan kontrol sosial semuanya semestinya berjalan dengan baik. Pihaknya sekali lagi tidak anti terhadap kritik yang penting konstruktif, ada cek dan ricek, faktual. Jangan mendengar berita sepihak cuma karena kepentingan-kepentingan tertentu saja.

Media bisa dikatakannya juga lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Jadi semuanya itu harus faktual, bukan hanya pencitraan saja.

Dia juga meminta pemberitaan itu tidak hanya pejabat tertentu saja tetapi bisa dilakukan secara merata untuk pejabat yang berwenang. Karena yang melakukan kontrak dengan media itu uang rakyat bukan uang gubernur dan wakil gubernur. Jangan sampai pejabat tertentu saja yang diberitakan sementara pejabat lain tidak diberitakan karena tendensi politik tertentu. Padahal banyak juga kegiatan yang dilaksanakan dan layak untuk dipublikasikan.

“Dan satu hal lagi jangan takut untuk mengungkapkan kebenaran, karena kita tahu dari dulu dikatakan bahwa media ini jendela dunia agar masyarakat dan kita semua benar-benar bisa

membuka jendela tersebut dan melihat bagaimana keadaan dunia sekarang lewat media,” katanya

Tujuan akhirnya relasi dengan media ini adalah mengawal, mendorong bersama-sama untuk mewujudkan Kalteng berkah. Untuk mewujudkan itu semua, walaupun sudah bagus menurutnya perlu ditingkatkan lagi. Kedepan media ini bisa memberikan berita-berita yang aktual, mendidik, mencerahkan, tidak menjelekkan atau menjatuhkan seseorang, dan berita-berita yang seimbang

**c) Husin A Latif**

Nama : Husin A Latif  
Jabatan : Pemimpin Redaksi Kalteng Pos  
Umur : 32 Tahun  
Alamat : Jalan AMD Nomor 14 Petuk Ketimpun  
Palangka Raya  
Wawancara : - 24 Maret 2022 Pukul 11.14-12.30 Wib  
- 10 Maret 2022 Pukul 09.12-10.30 Wib

Subyek kajian berikutnya adalah Husin A Latif sekarang ini menduduki jabatan sebagai Pemimpin Redaksi Kalteng Pos. Lahir di Tumbang Manjul 27 Juli 1991 dan tinggal di Jalan AMD no 14 A, Kelurahan Petuk Katimpun, Palangka Raya.

Dia menceritakan awal karirnya sebagai wartawan harian saat masih duduk sebagai mahasiswa semester akhir di salah satu universitas negeri di Palangka Raya pada tahun 2011. Awalnya dia tertarik ikut pelatihan jurnalistik yang digelar oleh Kalteng Pos. Kebetulan ada membaca pengumuman di koran Kalteng Pos bahwa ada pembukaan pelatihan jurnalistik di koran tersebut.

“Pertengahan tahun 2011 saya iseng membaca koran Kalteng Pos, dan ternyata ada pengumuman bahwa Kalteng Pos menggelar pelatihan jurnalistik dan terbuka bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk ikut pelatihan tersebut”.

Setelah mengikuti pelatihan tersebut, pihak Kalteng Pos merekrut di antara peserta pelatihan dan salah satunya Husrin. Di awal direkrut berstatus sebagai reporter dan mencoba menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pelatihan seperti teknik mencari dan menulis berita, teknik wawancara, Bahasa Indonesia jurnalistik, fotografi, undang-undang pers dan kode etik jurnalistik.

Ketika terjun ke lapangan ternyata menurutnya, tidak semudah apa yang dibayangkan ketika pelatihan. Terutama ketika habis liputan dan menghadapi computer untuk memulai merangkai kata menjadi kalimat sehingga sempurna menjadi berita. Namun, setelah seminggu liputan ke lapangan kesulitan yang dihadapi mulai berkurang.

Dia menceritakan, liputan pertama bersama-sama reporter baru khusus di liputan kriminal seperti di kepolisian, rumah sakit, pengadilan termasuk berita-berita hukum, kecelakaan, kebakaran maupun demo.

Setelah tiga bulan bekerja sebagai reporter dengan status uji coba, berlaku seleksi alam, awalnya ada beberapa kawan-kawan yang semangat ternyata satu demi satu menyatakan mengundurkan diri. Hanya tinggal beberapa orang termasuk dirinya memutuskan untuk tetap menekuni profesi wartawan.

Mulai saat itulah dia menandatangani kontrak kerja untuk masa selama satu tahun dengan sejumlah poin kesepakatan dan ditempatkan di pos baru liputan olahraga. Mungkin pertimbangan pemimpin redaksi waktu itu menempatkan di pos olahraga karena sesuai dengan pendidikan S1 yang dia geluti yaitu program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga (PJKO).

Melakukan liputan di pos olahraga menurut Husrin, tidak sesulit waktu meliput di pos kriminal. Karena selain memang sesuai dengan jurusan kuliahnya juga sudah berpengalaman untuk melakukan liputan.

“Memang benar menurut para senior kalau sudah lulus untuk bisa liputan dikriminal maka akan mudah untuk liputan ke pos lain. Karena ujian awal menjadi wartawan adalah liputan kriminal dan disinilah banyak calon repoter yang banyak balik kanan untuk memilih profesi lain,” jelas Husrin.

Banyak suka dukanya menjadi wartawan olahraga ini, sukanya karena sering keluar kota untuk meliput *event* regional maupun nasional. Sehingga yang sebelumnya belum pernah ke satu kota akhirnya bisa dikunjungi secara gratis dan banyak pengalaman liputan di tingkat nasional. Agenda olahraga seperti PON dan lain-lain ada terus setiap tahunnya.

Selain ada sukanya ada juga dukanya, yaitu bahwa kegiatan olahraga misalnya disuatu *event* cabangnya banyak. Sehingga sepanjang hari terus melakukan liputan disetiap perkembangan lomba atau pertandingan di setiap cabang dan itu harus diliput semua. Sehingga nyaris waktu yang seyogyanya bisa untuk isitirahat harus dikorbankan untuk membikin berita dengan cepat dan akurat untuk disajikan kepada pembaca.

Dia menjelaskan, menjadi wartawan di lapangan hari berganti hari digelutinya dengan tekun selama kurang lebih tiga tahun. Berkat ketekunannya tersebut maka dia diangkat dan mendapat kepercayaan dari Pemimpin Redaksi Kalteng Pos menjadi asisten redaktur sejak 2013. Mendapat tugas baru menambah kepercayaan dirinya semakin memantapkan di dunia jurnalistik. Mulai saat itu dia mendapat tugas tambahan selain meliput juga melakukan pengeditan berita wartawan olahraga lainnya. Bermodalkan pengalaman selama menjadi wartawan olahraga dan pelajaran yang diberikan redaktur olahraga selama ini sangat membantu dalam menjalankan tugas barunya tersebut.

“Menjadi asisten redaktur ternyata mengasyikan juga. Saya bisa berinteraksi dengan kawan-kawan wartawan untuk melakukan pengeditan berita serta memilih foto-foto yang menarik untuk

mendukung pemberitaan tersebut,” kata Husrin.

Ketika ada masalah dengan berita wartawan, seperti berita yang berpotensi menjadi masalah di tengah masyarakat maka dia berkoordinasi dengan redaktur untuk memutuskan. Termasuk kalau ada hal-hal teknis seperti penulisan kata yang semestinya baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dia mengungkapkan, sebagai wakil redaktur ada tantangan tersendiri. Dia harus bisa ke bawah dengan wartawan untuk melakukan koordinasi pengeditan dan penugasan liputan. Sementara ke atas dia banyak berkoordinasi dengan redaktur tentang program liputan yang akan dilakukan wartawan setiap harinya.

Setelah menilai kinerjanya selama satu tahun menjadi asisten redaktur baik dan komitmen tinggi, maka pada tahun 2014 dia diangkat menjadi redaktur olahraga. Saat itu secara penuh menangani halaman olahraga. Semua tanggungjawab halaman terkait berita olahraga baik itu pengeditan, penyusunan perencanaan dan evaluasi liputan ditangani sepenuhnya.

Selain wajib mengikuti rapat setiap akhir pekan bersama seluruh manajemen untuk menentukan arah kebijakan redaksi dan pengembangan usaha, dia juga melakukan rapat dengan wartawan dua kali sehari. Pagi melakukan rapat perencanaan peliputan dengan para wartawan sementara sore rapat evaluasi tentang pemberitaan yang sudah dimuat untuk melakukan perbaikan maupun lanjutan pemberitaan.

Setelah satu tahun menjadi redaktur tepatnya 2015, maka karir Husrin terus menanjak dia diangkat menjadi koordinator liputan 2015-2016 yang bertanggungjawab membagi tugas-tugas liputan semua wartawan. Kalau sebelumnya membagi tugas wartawan pos olahraga saja, tetapi sekarang wartawan di semua pos seperti pos kriminal, politik, ekonomi, eksekutif, legislatif, hiburan dan pos lainnya.

Setahun kemudian jabatan yang lebih tinggi diraihnya, pada 2016 diangkat lagi menjadi redaktur pelaksana. Tugas ini lebih berat lagi tanggungjawabnya karena harus mengkoordinir para redaktur di pos masing-masing.

Intensitas rapat semakin padat. Tidak hanya rapat di kalangan redaksi saja tetapi juga ikut rapat keseluruhan manajer untuk ikut ambil bagian dalam memutuskan kebijakan redaksi dan perusahaan. Seorang redaktur pelaksana, menurut Husrin, tidak hanya menangani masalah keredaksian saja tetapi juga berkoordinasi dengan para redaktur untuk menentukan arah kebijakan redaksi dan perusahaan. Dalam koordinasi dengan redaktur ini tidak selamanya mulus, karena terkadang terjadi kendala psikologis karena ada beberapa redaktur senior yang dari usia lebih tua.

“Ya sekali-kali kadang kita perlu lebih ekstra hati-hati untuk berkomunikasi dengan para redaktur terutama redaktur senior karena ada yang jauh lebih tua dari saya. Supaya mereka tidak tersinggung karena merasa diperintah atau dikritik. Namun saya tetap profesional dan tegas ketika ada satu bagian sistem di redaksi atau kebijakan perusahaan yang sudah ikut terganggu”.

Setelah jabatan redaktur pelaksana selama satu tahun dia emban dengan sukses, maka pada 2017 dia diangkat menjadi Kepala Biro Kalteng Pos di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Sebuah kabupaten yang maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Sumber ekonomi itu berasal dari sektor perkebunan terluas ke dua di Kalteng, sektor tambang dan perkayuan. Belum lagi geliat sektor jasa yang termasuk menyangga Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah itu.

Tugas menjadi kepala biro cukup berat. Tujuan pihak manajemen menempatkan dia di daerah maju tersebut supaya mampu menompang omzet perusahaan melalui langganan koran yang

semakin meningkat, kontrak halaman, iklan maupun bentuk lain yang sah.

Menjadi kepala biro di sebuah daerah, kata Husrin, mempunyai tanggungjawab keseluruhan. Tidak hanya di bidang redaksi dengan memberikan dorongan dan program liputan kepada wartawan tetapi juga di bidang pemasaran dan iklan. Kesemuanya itu untuk meningkatkan omzet perusahaan.

Setelah setahun menjalankan tugasnya sebagai kepala biro, maka pada tahun 2018 dia diangkat manajemen menjadi Wakil Pemimpin Redaksi Kalteng Pos ke Palangka Raya. Posisi tersebut karena keberhasilannya menjadi kepala biro. Posisi sebagai orang nomor dua di redaksi, setelah pemimpin redaksi, membuat dia harus ekstra meluangkan waktu kerja dengan rapat koordinasi dengan pemimpin redaksi dan menejer lainnya yang tergabung dalam manajemen Kalteng Pos. Segala persoalan yang muncul di redaksi yang teknis maupun non teknis dia selesaikan dengan baik.

“Alhamdulillah, selama setahun menjadi wakil pemimpin redaksi, kemudian 2019 saya diangkat menjadi Pemimpin Redaksi Kalteng Pos. Sejak itulah semua tanggungjawab keredaksian dari liputan hingga dampak dari pemberitaan itu ada di tangan saya,” ungkapnya.

Sebagai pemimpin redaksi tentu tidak saja mengurus intern redaksi tetapi juga membuka diri melakukan kerjasama dengan pihak luar. Terutama memperluas jaringan kepada semua pihak. Termasuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemkab/Pemkot 14 kabupaten/kota se Kalteng.

Ayah dari dua anak ini, selain sebagai pemimpin redaksi juga aktif di beberapa kepengurusan organisasi seperti bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Persatuan Bola Basket (Perbasi) Seluruh Indonesia dan sebagai Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Ko-

tawaringin Timur (Kotim).

Menurutnya, selama ini kerja sama Surat Kabar Harian Kalteng Pos sudah berjalan. Baik dengan Pemerintah Provinsi Kalteng maupun kabupaten/kota.

“Kita memberikan *speech* pemberitaan publikasi berjangka. Ada yang berbulan, pertriwulan, enam bulan maupun yang tahunan. Jadi tergantung masing-masing kerjasamanya. Kita memberikan kontribusi berita kemudian Pemerintah Provinsi memberikan finansial ekonomi. Selama ini berjalan cukup efektif.”

Pertama karena di tengah pandemi selama menunjang keberlangsungan media. Kerjasamanya melalui MoU menyesuaikan anggaran yang disiapkan Pemerintah Daerah mereka sudah ada budget masing-masing. Misalnya satu halaman sekian ratus juta, seperempat halaman sekian puluh juta dan jumlah terbitnya berapa kali dan dihalaman berapa itu sudah ada hitungan sesuai kesepakatan. Contohnya Pemerintah Provinsi misalnya setengah halaman sudah ada dalam MoU itu. Untuk tiga tahun terakhir kerjasama kita lakukan perspace. Jadi kita punya pekerjaan 100 juta misalnya, cuman hitungannya dinilai berapa sekali terbit dikalikan jumlah berita misalnya selama dua bulan. Terbitnya setiap hari Senin sampai Jumat.

Untuk lima tahun tahun terakhir kerjasama Pemprov Kalteng dengan Kalteng Pos sudah berjalan dan kabupaten/kota sebagian daerah saja. Pemberitaan yang masuk dalam kerjasama adalah kegiatan-kegiatan gubernur, wakil gubernur, sekda maupun pejabat yang mewakili gubernur. Sementara kegiatan dinas/badan itu berada diluar dari kerjasama dengan Pemprov karena mereka mempunyai anggaran SOPD sendiri.

Kerjasama saling membantu. Kendala yang dihadapi selama ini yaitu ketika masa covid mewabah. Apa yang disepakati dalam

kerjasama tersebut bisa terjadi pergeseran nilai. Bahkan ada juga kerjasama yang sudah berjalan dan selesai tahun ini dibayar pada tahun depan. Kendala dalam menjalankan liputan sepertinya tidak terlalu dirasakan wartawan di lapangan. hanya saja ketika ada berita-berita yang berbau negative, mengkritik maupun sifatnya bisa menyudutkan Pemerintah Provinsi disitulah idealism diuji. Diberitakan atau tidak.

“Selama ini ada yang memang kita terbitkan beritanya atau yang tidak. Biasanya sebelum diturunkan dirapakan terlebih dahulu di jajaran redaaksi. Melakukan analisa apa dampaknya kalau berita itu diturunkan dan bagaimana dampaknya kalau tidak kita terbitkan. Biasanya kalau sudah viral dan masyarakat luas sudah tahu maka berita itu sudah pasti kita terbitkan. Tinggal kewajiban kita melengkapi berita itu dari sisi kode etik jurnalistiknya, di halaman berapa dan posisi mana. Untuk menjaga itu. Melalui ulasan atau redaksional yang kata-katanya halus. Bagi berita yang tidak diturunkan di media cetak, maka kita ada juga group-group media lain seperti online yang tidak ada kerjasamanya maka berita kita terbitkan disana. Ketika ada orang yang menanyakan kenapa di Kalteng Pos tidak terbit, maka kita bisa menjawab bahwa sudah diterbitkan di online kita. Walaupun di MoU tidak ada yang memuat perjanjian bahwa berita-berita kritik atau miring untuk tidak dimuat.”

Untuk wartawan yang meliput di Pemprov tidak kita larang untuk membuat berita apapun. Tapi berdasarkan SOP sebelum diedit oleh redaktur ada list-berita disitu kita melihat dan kita bedah apakah berita wartawan ini sudah memenuhi kaidah jurnalistik dan potensi kemitraan. Wartawan selama sudah mengerti berita yang harus mereka liput beritanya. Dalam perjalanannya di masa gubernur sebelumnya walaupun kita melakukan kritik tetap juga

mendapat kerjasama walaupun dalam jumlah relatif lebih kecil dibandingkan media utama lainnya.

**d) Victor Giroth**

Nama : Victor Giroth  
Umur : 52  
Alamat : Jalan Antang 221 Palangka Raya  
Jabatan : Pemimpin Redaksi Harian Tabengan  
Tanggal : -23 Maret 2022 Pukul 10.20 – 12.13 Wib  
- 05 Juni 2022 Pukul 16.00- 17.22 Wib

Victor Giroth, Samarinda, 17 Agustus 1969, Jalan Antang No. 221 Palangka Raya, Kalteng, Pendidikan Terakhir SMEA Negeri 2 Samarinda (1988-Berijazah) dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIK) Mahakam Samarinda Jurusan Jurnalistik (Semester Akhir Thn 1993), Pengalaman Organisasi : Humas Senat STIK Mahakam Samarinda (1989), Organisasi Kosgoro (1990), PWI Kaltim (Tahun 1994-1996), PWI Kalteng (Tahun 1999-2023).

Menurut Victor, Harian Tabengan telah melakukan kerjasama pemberitaan dalam bentuk kontrak halman dengan Pemerintah Provinsi sejak dua periode pertama Gubernur A Teras Narang 2005-2010, 2010-2015. Dilanjutkan dengan periode pertama Gubernur Sugianto 2016-2021. Sementara periode kedua sampai penelitian ini dilakukan Mei 2022 kerjasama belum dilanjutkan.

Kerjasama dalam bentuk kontrak halaman dengan Pemerintah Provinsi sangat bagus kita silaturahmi dengan Pemerintahan Daerah, dalam mendukung program visi misi pembangunan melalui pemberitaan-pemberitaan pembangunan. Asalkan tidak ada syarat-syarat lain. Dengan kerjasama kesannya kita memanng berteman. Kalau berteman tidak bisa dikriti. Sehingga dari sisi negatifnya kita akan sulit dari kerjasama ini. Kalau ada syarat.

Kerjasama sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Pihak Pemprov bisa menyampaikan informasi dan dikawal.

Sementara pihak media mendapat keuntungan ekonomi untuk melanjutkan keberlanjutan perusahaan. Kami juga belajar yang dilakukan media besar lainnya. Cuma disini lain, kerja sama ini menurunkan semangat kerja wartawan karena tidak ada lagi tantangan dan lemahnya kreativitas dan sekarang beritanya hanya standar, apa adanya. Tidak kepada market orientet tapi prudok orientit. Dibuak beritanya diterima. Kalau market tidak sesuai permintaan pasar. Padahal menghadapi seperti ini seharusnya kreatif persnya dan yang ini juga bisa memhami kebutuhan pers ini adalah pasar menjadi kesimbangan, tapi ini yang sulit. Dan membuat-wartawan malas. Pernah mengkritisi kami pun pernah diputus.

Apakah kerjasama dilihat dari profesionalisme, ternyata ada melihat “hal-hal lain” seperti kepemilikan dan ideologi. Sekarang Tabengan tidak ada lagi kontrak. Pemberitaannya mengkritisi. Kalau bekerjasama berarti teman. Kalau teman harus saling menjaga. Kalau media miring redaksi harus konfirmasi dulu. Walaupun tidak ada kerjasama masih ada berita Pemerintah Provinsi namun tidak sebanyak saat ada kontrak.

Kerjasama sangat mempengaruhi membuat media tidak bisa kritis. Kerjasama juga bisa mematikan koran-koran daerah. Kerjasama juga membuat media itu manja. Walaupun memang kebutuhan dalam satu bulan untuk operasional media cetak itu cukup besar. Fungsi pers khususnya kontrol sosial bisa jadi kurang tajam dan menghambat kreativitas. Semestinya bisa saja kerjasama dilakukan tetapi ketika ada hal yang kurang bagus dilakukan pemerintah daerah kita kasih petunjuk bahwa ada ini yang kurang bagus dan beritanya dibalancekan (kesimbangan) atau konfirmasi sehingga orang melihat pemeberitaan ini secara positif.

Sesungguhnya berita kontrak itu adalah konten pesanan dan sumbernya hanya satu. Bukan news (berita) jadi dibedakan mana berita dan konten. Kalau kami mengkritisi maka berdasarkan fakta saja tanpa tendensi.

### e) Haris Sadikin

Nama	: Haris Sadikin
Jabatan	: Ketua PWI Cabang Kalteng/Pemimpin Redaksi Palangka Post
Umur	: 42
Alamat	: Jl/ Mufakat 1 RTA Milono Km 6 Komplek Griya Menara Asri no.7A, Kelurahan Langkai Pahandut, Palangka Raya
Wawancara	: - 18 November 2022 Pukul 09.00 - 10.30 Wib - 09 Desember 2022 Pukul 11.00 – 12.21 Wib

HM Haris Sadikin adalah Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Palangka Post. Dia menjadi penanggungjawab keseluruhan keredaksian. Dari wartawan dalam mencari berita, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan berita. Sampai kepada persoalan hukum kalau ada pemberitaan yang dinilai merugikan dan digugat masyarakat.

Bapak dua anak ini lahir di Banjarmasin 9 Agustus 1981 dan tinggal sekarang Jalan Mufakat 1 RTA Milono km 6 Gang Berkah II No 7A Palangka Raya. Sebelum menggeluti dunia jurnalistik dia merintis di bidang entertainment selama beberapa tahun di Kalimantan Timur. Selama bekerja di bidang ini menambah wawasan dan pengalaman termasuk menambah jaringan kerja.

Setelah itu, menurut dia Kembali ke kampung halaman di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat pada tahun 1999. Sejak itu dia menceritakan memulai pekerjaan sebagai seorang jurnalis sebagai wartawan surat kabar mingguan Kotawaringin. Sebuah koran yang terbit seminggu sekali di Pangkalan Bun. Koran umum yang memuat berbagai macam jenis berita dari politik, kriminal, olahraga, hiburan dan lain-lain.

Selama menjadi wartawan awalnya perlu penyesuaian, relatif sulit dan dihadapkan pada tantangan setiap harinya. Namun,

berkat arahan para senior dan kemauan untuk belajar baik secara teknis maupun non teknis semuanya bisa dilakukan dengan baik dan mudah.

Berbeda dengan koran harian yang besar setiap wartawan ditugaskan secara khusus di pos masing-masing. Sementara di koran mingguan satu wartawan merangkap di beberapa pos. Seperti dirinya yang ditempatkan di pos kriminal di kepolisian, pengadilan dan kejaksaan juga di pos politik dan pemerintahan seperti di kantor DPRD Kobar dan kantor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Setelah tiga tahun menjadi wartawan maka pada tahun 2001 dia diberi kepercayaan menjadi Redaktur Pelaksana. Dengan jabatan baru itu menurutnya mempunyai tugas yang bertambah berat. Tidak hanya mencari berita saja, tetapi juga melakukan koordinasi dan mengarahkan semua wartawan di semua pos liputan untuk bisa menghasilkan berita berkualitas dan dibutuhkan masyarakat.

Dia mengungkapkan, menjadi redaktur pelaksana adalah jabatan yang harus bisa menjembatani antara kepentingan ruang redaksi dengan ruang ekonomi atau bisnis dari perusahaan di tempat dia bekerja. Kesenergian tugas menurutnya, sangat penting agar kebijakan dari redaksi dan perusahaan harus selaras. Sehingga, dia harus focus untuk melakukan tugasnya. Dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi di ruang keredaksian.

Tugasnya sebagai redaktur pelaksana juga harus memperluas jejaring kepihak eksternal. Dalam upaya pengembangan keredaksian dan usaha. Seperti melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat. Tidak hanya masalah liputan tetapi juga peluang-peluang kerjasama dalam memperoleh iklan, advertorial serta maupun kemungkinan kontrak halaman,

Setelah tiga tahun lebih menjadi redaktur pelaksana pada Mingguan Kotawaringin, maka pada tahun 2006 dia hijrah menja-

di wartawan Harian Palangka Post. Sebuah koran harian yang terbit di Palangka Raya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak saat itu tugasnya kembali turun kelapangan sebagai wartawan namun dengan jangkauan liputan yang lebih luas. Kalau sebelumnya hanya bertugas di sebuah kabupaten saja tetapi sekarang ke ibu kota provinsi.

Dia ditugaskan di pos kriminal terutama di Polda Kalteng. Setiap hari dia mangkal di Humas Polda Kalteng dan menjalin hubungan baik dengan pihak humas. Setiap kejadian yang terkait penanganan oleh Polda dan layak diberitakan tak luput dari pemberitaannya. Di Polda tidak hanya berita kriminal saja tetapi juga terkait dengan segala kegiatan yang ada di kantor tersebut diberitakan seperti kegiatan hari Bhayangkara.

Selama enam tahun dia menjadi wartawan, setelah itu pada tahun 2012 dia mendapat kepercayaan menjabat sebagai redaktur pelaksana. Sebuah jabatan yang pernah diembannya ketika masih di Pangkalan Bun sebagai Redaktur Pelaksana SKM Kotawaringin. Bermodalkan pengalamannya tersebut, dia tidak sulit untuk melaksanakan tugasnya sebagai redaktur pelaksana di Palangka Post. Pada prinsipnya pelaksanaan tugas redaktur pelaksana antara koran besar dan kecil sama saja. Membedakannya hanya dari jumlah wartawan yang lebih banyak dan persoalan yang relatif kompleks karena wilayah liputan yang semakin luas.

Selama enam tahun juga mengemban tugas sebagai redaktur pelaksana maka pada tahun 2018 Haris mendapat kepercayaan sebagai orang nomor satu di jajaran redaksi sebagai Pemimpin Redaksi Palangka Post. Sebuah tanggungjawab yang sangat besar ada dipundaknya.

Sejak saat itu dia bertanggungjawab penuh secara keseluruhan masalah keredaksian. Dari perekrutan wartawan, penempatan pos liputan samapai kepada penyajian hingga terbitnya koran tersebut.

Bukan itu saja, dia juga harus bertanggungjawab mensinergikan bidang redaksi yang dia pimpin dengan pihak perusahaan. Supaya antara kebijakan redaksi dengan kebijakan pihak perusahaan bisa berjalan bersamaan.

Sampai sekarang sebagai pemimpin redaksi dia juga menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak.

Dia juga menjalin hubungan yang baik dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai bentuk relasi antara Pemprov Kalteng dengan Pers lokal. Tidak hanya soal pemberitaan tetapi juga terkait perkembangan perusahaan seperti melakukan koordinasi dengan pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan dan keputusan di bidang periklanan. Dalam melakukan kerjasama ini dia sebagai pemimpin redaksi sangat berperan besar agar selalu berjalan dengan baik antara kepentingan redaksi, perusahaan dan pihak Pemerintah Provinsi Kalteng.

Menurutnya, kerja sama dengan pemerintah selama inikan berjalan baik, memang ada keuntungan dari kedua belah pihak. Kerjasama itu misalnya dalam bentuk iklan, advertorial maupun kontrak halaman, Dari sisi pemerintah juga memanfaatkan keberadaan media untuk melanjutkan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakannya. Dari sisi media juga mendapatkan benefit dari perjanjian-perjanjian kerja sama itu,. Cuma memang mekanisme kerja samanya itu yang memang kita perlu ada pembenahan-pembenahan lagi.

Kerjasama yang dilakukan dengan Pemprov itu dilakuksn secara resmi dan dipayungi dasar hukum. Baik Undang-undang 40 tahun 1999 tentang Pers maupun system kuangan daerah atau negara. Setelah diajukan pihak media kemudian disetujui pihak pemrov. Selanjutnya oleh Pemprov Kalteng sebagai eksekutif diajukan ke DPRD Kalteng. Kemudian dibahas oleh komisi terkait. Setelah rampung akhirnya disetujui anggaran kerjasama tersebut yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jadi menurutnya karena bentuk kerjasama selama ini mempunyai dasar dan sah, maka selama ini tidak ada temuan. Memang dulu pernah ada temuan-temuan tetapi sistemnya yang diperbaiki. Karena dulu sempat temuan itu karena mekanisme pembelanjaannya yang tidak dibenarkan, sehingga ada item-item yang dihapus. Item-item yang dihapus itu yang tidak diperbolehkan lagi itu seperti belanja iklan, itu tidak diizinkan lagi. Kemudian ada belanja sosialisasi tapi dalam bentuk tertentu itu tidak diizinkan lagi.

Sekarang yang diizinkan adalah bentuk penyaluran informasi, itu yang lebih di kedepankan. Walaupun pada realitanya pemerintah pusat juga belanja iklannya juga besar.

“Cuman ga tahu bahasanya kalau di pemerintah pusat itu mereka lebih ke layanan sosial. Jadinya seharusnya konsep iklan itu pun masih memungkinkan kalau berbentuk layanan sosial. Cuma layanan sosial itu dari segi media merugikan karena harganya juga murah, habisnya besar nmun harganya murah,”

Bentuk kerja sama selama ini menurutnya, kalau dari media sebetulnya pelayanan informasi. Pelayanan informasi itu paling banyak sekarang yaitu melalui naskah, melalui tayangan sosialisasi, melalui siaran. Sementara yang diberikan Pemprov kontrak halaman yang lebih poplarnya sebenarnya kontrak halaman, tapi jujur kalau kontrak halaman ini saya lebih agak kurang setuju. Tapi yang lebih pantas itu menggunkan mekanisme kerja sama sistem billing. Kerja sama billing itu mereka memberikan bahan lalu pihak media yang menayangkan lalu mereka bayar. Begitu jadi lebih ideal. Jadi ibaratnya sama kita perlu pulsa listrik, kita beli begitu. Kalau selama ini seperti pembelian space koran pembelian itu agak kurang etis juga sebetulnya.

Menurut informasi Diskominfo Kalteng sudah memulai sistem billing itu. Jadi dia lebih ke target artinya setahun mereka

punya kuota misalkan untuk media online itu setahun 300 berita, dalam setahun itu harus dihabiskan 300 berita dan mereka bayar sejumlah berita tersebut. Jadi tidak space lagi mereka belinya dan di Pemkab Kotawaringin Barat juga itu sudah mulai. Jadi di Palangka Post itu meskipun cetak kami di targetkan dalam 3 bulan menyelesaikan 68 berita. Jadi hitungannya mereka menjual berita. Bahasanya mereka itu mengeluarkan suatu produk dipasang ditempat kita. Jadi lebih pantas seperti itu. Kalau kita target 68 berita itu halaman itu kita termakan banyak, bisa seperempat dan bisa juga setengah halaman.

Dengan begitu lebih efektif. Jadi dalam sehari itu tidak harus plat seperempat halaman dan itu juga saling menguntungkan jadinya. Halaman space juga tidak terlalu banyak terpakai. Jadi kalau misalkan 68 berita itu habis dalam 3 bulan maka sudah selesai.

Kalau bahasanya kontrak halaman sepertinya beli halaman itu ekstrem kayaknya koran itu dibeli sama mereka.

Sementara untuk materi yang biasanya yang ditayangkan lebih kepada sosialisasi, kebijakan-kebijakan pemerintah, informasi pembangunan, apa-apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan.

Dia juga menyebutkan, walaupun sudah dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, tidak semua berita yang diminta oleh Pemerintah Provinsi itu dimuat. Contohnya, ketika DPRD Kalteng memberikan dukungan terhadap rencana Pemekaran Provinsi Kotawaringin. Padahal kegiatan itu didukung oleh Pemprov, namun tidak diberitakan mengingat bisa menimbulkan keadaan yang kurang kondusif karena ada sebagian masyarakat yang menolak pemekaran provinsi tersebut.

Walaupun demikian, ternyata sikap Pemerintah Provinsi bisa memahami untuk kepentingan yang lebih besar.

#### **f) Sirajul Rahman**

Nama : Sirajul Rahman  
Jabatan : Anggota DPRD Kalteng  
Umur : 51 Tahun  
Wawancara : - 1 Juni 2022 Pukul 11.00-12.30 Wib  
- 14 Juli 2022 Pukul 07.45-08.59 Wib

Sirajul Rahman adalah anggota DPRD Kalteng, menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kalteng. Lahir di Puruk Cahu, 18 Mei 1972 dan tinggal di Jalan. G. Obos XII, Jl. Kecubung No. 80 Palangka Raya Kalteng.

Menurutnya, sebelum sebagai menjadi wakil rakyat, profesi awalnya setelah kuliah adalah sebagai karyawan perusahaan HTI PT Perwata Rimba pada tahun 1986 sampai tahun 2000. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2001 sebagai karyawan HTI Purwa Permai (2000-2001).

Setelah menjadi karyawan pada dua perusahaan tersebut, maka dia mencoba mencalon sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui partai PKS. Dari coba-coba tersebut, alhamdulillah dari perolehan suara oleh KPU Hulu Sungai Tengah (HST) ditetapkan sebagai anggota DPRD periode 2004-2009. Selama menjadi wakil rakyat dia sudah melakukan interaksi dengan pihak media dan berjalan dengan harmonis. Terutama dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya dan hasil pembangunan yang telah dicapai bersama mitra kerjanya di eksekutif.

Setelah merampungkan satu periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2004-2009), kemudian dia pulang ke kampung halaman di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Di Kabupaten ini dia mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Kabupaten Murung Raya 2009.

Bermodalkan pengalaman sebelumnya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka berhasil duduk

sebagai wakil rakyat di Kabupaten Murung Raya periode 2009-2014. Kemudian periode berikutnya Pemilu 2014 dia mencoba lagi mencaleg dan berhasil duduk untuk ke dua kalinya untuk periode 2014-2019.

Setelah dua periode duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Murung Raya, maka berdasarkan dorongan konstituenya untuk maju lagi sebagai wakil rakyat di lembaga yang lebih tinggi lagi di DPRD Kalteng dari daerah pemilihan (dapil) IV yang meliputi Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Murung Raya dari partai yang sama yaitu PKS.

Berkat perjuangannya dan kerja keras untuk mendapat dukungan masyarakat di empat kabupaten tersebut maka pada 2019 dia terpilih sebagai anggota DPRD dan duduk sebagai sekretaris komisi 1. Komisi ini antara lain, membidangi masalah pers sebagai mitra kerjanya sehingga masalah yang berhubungan dengan pers termasuk anggaran kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalteng dengan pers lokal ini.

Selama kurang lebih sudah empat tahun menjadi wakil rakyat yang membidangi salah satunya masalah pers dia menilai peran tiga media lokal yaitu Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post dalam mengawal pembangunan di daerah ini sudah cukup baik. Salah satunya Setiap ada kegiatan misalnya di DPRD baik di internal maupun di pemerintah daerah, mereka selalu ada.

Begitu juga ketika ada permasalahan yang terjadi di masyarakat, mereka harus angkat, mereka minta pendapat DPRD, bagaimana peristiwa ini dan sebagainya. Intinya hubungan pers dengan dewan selama ini bagus. Untuk bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal khususnya dalam meliput pemberitaan di dewan, maka disediakan ruangan khusus pers. Di tempat ini bisa pihak dewan yang menggelar jump pers maupun tempat mereka menggali berita.

Sepanjang yang dia amati, dalam pemberitaan selama ini misalnya terkait dengan pemerintah provinsi ada juga kritik-kritik tetapi tidak vulgar. Mereka memenuhi etika dengan menggunakan bahasa yang halus. Walaupun sepanjang pengetahuannya ada kerjasama antara pemerintah provinsi dengan media tersebut.

Dalam kerjasama ini, menurutnya, pihak pemerintah provinsi sudah menyiapkan anggaran dan anggaran tersebut diajukan ke pihaknya di dewan di dalam RAPBD dan sesuai tupoksi komisi dewan bersama eksekutif yang membidangi hal tersebut dibahas bersama-sama. Dewan membantu media dengan menyetujui terus dengan partisipasi media, hal itu guna mendukung media tersebut dengan pembagian yang proporsional.

Anggaran yang disiapkan Pemprov ini untuk media sebagai konsekuensi dari ada kerjasama itu karena media telah membantu menyampaikan informasi dari pemprov ke masyarakat, tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta biaya yang telah dikeluarkan oleh media tersebut.

Dia mengharapkan agar media ini independent. Di samping memberitakan yang baik-baik untuk pemerintah, tentu juga perlu media ini menyampaikan hal-hal yang sifatnya membangun. Hal ini pentingnya juga ini untuk masyarakat, karena masyarakat juga ingin tahu apa yang akan diperbaiki ke depan. Sifatnya mengontrol. Media ini kita menjadi sumber informasi untuk masyarakat. Sampaikan fakta secara objektif, mungkin dengan menggunakan bahasa yang santun.

Begitu pun ketika pihaknya melakukan fungsi pengawasan ke eksekutif hasil dari reses ke dapil tetap dimuat oleh media misalnya masih ada pembangunan yang mangkrak di daerah yang bersumber dari APBD dan kita minta untuk segera diselesaikan.

Sirajul yang juga Ketua DPW PKS Kalteng ini meminta kedepannya perlu pemerataan informasi. Digali dari semua dapil. Pent-

ing ke depannya berimbang karena di dewan ini kan perwakilan dari dapil-dapil. Saya berharap adil dalam ke-5 dapil itu. Lakukan lah secara adil karena uangnya juga dari rakyat

Ada juga wartawan yang wawancara terkait parpol karena posisinya sekarang ini sebagai Ketua DPW PKS Kalteng tetapi kenyataannya beritanya tidak terbit. Tapi baginya tidak masalah sepanjang komunikasi tetap terjaga dengan kawan-kawan media.

Kepada media agar untuk ikut menyukseskan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mendukung pemerintah daerah, melihat kondisi real di masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat, faktanya gimana, bantulah masyarakat, bersinergi bersama-sama, semua dengan lembaga parpol, organisasi, tokoh masyarakat karena kita harus bersinergi dalam melakukan kesejahteraan masyarakat. Apalagi pasca pandemi ini, banyak keluhan masyarakat pada saat ini, terutama ekonomi.

Selain itu bersama-sama melakukan kontrol kepada pemerintah. Memberi masukan kepada pemerintah provisi dan kabupaten. Semuanya untuk kebaikan bersama untuk mewujudkan Kalteng Berkah.

Terkait dengan dampak pemberitaan media selama ini, menurutnya pemberitaan oleh media selama ini menunjukkan keberhasilan pembangunan di sejumlah sektor dan mendapat tanggapan positif sebagian besar masyarakat.

**g) Annisa B Wahdah, SH**

Nama : Anisa B Wahdah

Jabatan : Wartawan Kalteng Pos

Umur : 29 Tahun

Alamat : Jalan Dunis Tuwan Nomor 15 Kota  
Palangka Raya

Wawancara : - 20 Juni 2022 Pukul 11.00 Wib-12.22 Wib

- 28 Juni 2022 Pukul 09.00 Wib-11.30 Wib

Anisa Bahri Wahdah adalah wartawan Harian Kalteng Pos yang bertugas meliput pemberitaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Lahir Lumajang 18 Desember 1994 dan tinggal Jalan Tjilik Riwut Kilometer 10, Gang Dunis Tuwan, Rumah Nomor 185.

Dia menceritakan masuk sebagai karyawan Kalteng Pos, bukan langsung menjadi wartawan tetapi sebagai layout/desain koran di Kalteng Pos, mulai Bulan Mei Tahun 2016. Sekitar Tahun 2017 dia ditawari menjadi wartawan, tidak tahu persis alasan redaksi waktu itu kenapa memintanya menjadi wartawan.

Mungkin salah satu alasannya karena saat itu dia masih kuliah jurusan Ilmu Hukum di UPR dan dianggap jurusan ini sangat berpotensi bisa menjadi wartawan karena sering bersinggungan dengan masalah hukum.

Namun saat itu dia menolak karena masih aktif perkuliahan di kampus. Pada 2018 saat dia menyusun skripsi dan tidak ada mata kuliah lagi otomatis waktu luang semakin banyak. Saat itu dia ditawari lagi dari pemimpin redaksi maka dia terima. Mulai saat itu berubah pekerjaannya yang biasanya sebagai layout atau desain perwajahan koran sekarang setiap hari meliput berita.

Di sisi lain, menurutnya kesenangannya membaca puisi dan suka menulis menjadi modal untuk menjadi seorang wartawan. Dulu awal masuk kuliah saya dua kali mendaftar sebagai mahasiswa jurusan bahasa dan sastra namun dua kali daftar tidak lolos dan lolos di jurusan Ilmu Hukum. Karena saya memang suka menulis dan ingin menjadi penulis. Jadi ketika menjadi wartawan dia merasa bahwa cita-cita yang belum terwujud terjawab melalui tawaran menjadi wartawan.

Dia menyebutkan, setelah menggeluti dunia wartawan kurang lebih lima tahun banyak pengalaman yang menyenangkan dan ada juga sedihnya. Dia tergolong orang yang suka mencari

tahu dan suka penasaran. Membahagiakan ketika menemukan jawaban dari apa yang menjadi penasaran selama ini.

“Nah dengan saya jadi wartawan wawasan saya semakin luas. Saya bisa mempelajari tentang sejarah, budaya dan hal-hal yang ingin saya ketahui. Selain itu saya suka jalan-jalan. Dengan saya jadi wartawan, bisa melakukan perjalanan ke sejumlah kota yang belum pernah saya kunjungi dengan gratis, ketika mengikuti liputan pejabat perjalanan dinas,” katanya.

Selama menjadi wartawan. Sebagian besar tugasnya meliput berita di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Baik itu kegiatan gubernur, wakil gubernur, sekda, para asisten sekda, kepala biro maupun kepala dinas atau badan yang berada di lingkungan Pemprov Kalteng sejak tahun 2018.

Di Kalteng Pos menurutnya, setiap hari diwajibkan untuk membuat berita terkait berita Pemprov Kalteng. Kalau misalnya tidak ada agenda pemprov setiap harinya, maka dia akan menggali berita sendiri dengan melakukan wawancara kepada pejabat yang berwenang terhadap peristiwa atau fenomena baik yang ada di tengah masyarakat maupun terkait dengan tugas pokok dan fungsi pejabat tersebut baik secara teknis maupun kebijakan.

Dia mengungkapkan, untuk liputan pemprov biasanya terkadang di tempatkan di halaman utama hanya isu-isu pemprov yang menarik, baik narasumbernya gubernur atau jajaran di bawahnya. Selain itu ada halaman tersendiri sebagai kontrak kerjasama antara Pemprov dengan Kalteng Pos. Namun untuk gubernur tidak selalu halaman utama, apabila isu tidak terlalu menarik masuk di halaman kontrak.

Dalam meliput dia tidak ada mendapat arahan agar pemimpin redaksi atau redpel hanya berita-berita kegiatan gubernur yang positif saja. Sementara berita-berita miring untuk tidak diliput. Baginya hanya meliput dengan mengedepankan kode etik

jurnalistik. Baik itu berita positif atau negatif. Untuk kewenangan penerbitan menjadi tanggungjawab redaksi.

Menurutnya dalam meliput di Pemprov kalau ada kejadian atau fakta yang bernada miring atau mengkritik Pemprov tetap diberitakan. Misalnya sedang ramai diperbincangkan yakni penonaktifan tenaga kontrak Pemprov Kalteng. Penonaktifan ini banyak dinilai tidak baik dan merugikan karena ada seribu lebih tekon kehilangan pekerjaan. Jika ini diberitakan maka tentu Pemprov juga akan dinilai tidak baik oleh masyarakat. Namun berita ini tetap diliput dan diterbitkan. Sementara sikap Pemprov Kalteng termasuk kepala dinas atau kepala badan terbuka dengan isu-isu yang ditanyakan wartawan.

Terkait hubungan Pemprov dengan Kalteng Pos menurut ibu dari satu anak ini, selama ini sudah berjalan dengan baik kerjasama yang terjadi dan citra Pemprov menurut yang saya dapatkan informasi dari masyarakat sudah bagus.

Dia menyarankan ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa dihadiri oleh media karena hal-hal tertentu. Tetapi, wartawan dituntut untuk tetap mendapat berita terlebih untuk isu-isu yang ada, sebaiknya diberikan fasilitas untuk jumpa pers dan tetap melayani media. Selama ini sudah berjalan demikian tetapi masih jarang dan terkadang hanya mendapat rilis tertulis, terkadang kurang puas karena ada beberapa hal yang biasa ingin ditanyakan untuk penggalan informasi lebih dalam.

Menyinggung masalah fungsi pers sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, control social dan Lembaga ekonomi. Menurutnya, semua fungsi itu selama ini sudah berjalan dengan baik Dari semua fungsi itu yang terberat adalah melakukan control social dan sudah tersentuh karena ada dinas terkait yang memang aktif menjalankan tupoksinya.

Menyikapi adanya kerjasama kontrak halaman dikaitkan dengan peningkatan pendapatan tentu berdampak positif karena untuk menambah omzet. Bagi wartawan juga berdampak positif, karena ada kerjasama maka setiap ada isu yang perlu dikonformasi lebih mudah, karena sudah bekerjasama dengan baik dan menjalin silaturahmi dengan baik.

#### **h) Jomangkar, S.H**

Nama : Jomangkar, S.H  
Jabatan : Kasubag Penjaringan Informasi Biro  
Humas Setda Kalteng  
Umur : 57 Tahun  
Alamat : Alamat Jl. Menteng 16 No. 38 Palangka raya  
Wawancara : - 24 Maret 2022 Pukul 12.22 - 13.52 Wib  
- 5 Juni 2022 Pukul 08.32- 09.45 Wib

Jomangkar, SH adalah. Lahir Goha, 8 Juli 1965 dan beralamat Jalan Menteng 16 No. 38. Karirnya diawali sebagai jurnalis di RRI Palangka Raya sejak 1 Februari 1987 sampai dengan 31 Desember 2011. Kemudian terhitung tanggal 1 Januari 2012 pindah status kepegawaiannya ke Pemerinrah Provinsi Kalimantan dan bertugas di Biro Humas Setda Kalteng. Sementara organisasi yang digeluti adalah sebagai Pengurus Persatuan Wartawan Indoensia (PWI) Kalteng dan Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalteng.

Menurutnya relasi antara Pemerintah Provinsi dengan media selama ini sudah cukup baik. Karena relasi antara pemerintah dan media ini sudah terbangun sejak awal yaitu sejak zaman orde baru dan saling punya kepentingan.

Media, kata Jomangkar, merespon tuntutan public akan hal informasi, dari segi isinya baik keberhasilan maupun kekurangan pemerintah. Ada juga beberapa media yang ingin independen tapi sulit, termasuk pada zaman reformasi pun media tidak bisa melepaskan diri dari pemerintah, meskipun dia mengakui independen

tapi sangat sulit.

Untuk di Pemerintah Provinsi, menurutnya selama saya kurang lebih 8 tahun di bidang humas ini, relasi sudah berjalan dengan baik. Karena pemerintah menyampaikan informasi melalui media mengenai strategis pembangunan pada masyarakat. Sehingga media ini tidak bisa dilepaskan sama sekali baik dari segi pembangunan, politik, maupun pribadi.

Keuntungan akibat relasi ini banyak yang di dapat media. Misalnya seperti kerjasama sifatnya hibah, kontrak halaman. Selain dengan media lokal bermitra juga dengan media nasional. Dananya porposional secara variasi dalam hibah bentuk kontrak halaman. Ibaratnya seperti dua mata uang, saling membutuhkan. Tergantung media itu berkolaborasi dengan pihak manajemennya.

Selama menangani masalah pemberitaan di Biro Huimas menurutnya pernah kecewa karena pemberitaan, tapi tidak ekstrem. Karena ada dua hal yang berbeda, dari sisi pemberitaan media punya otoritas, apakah dia mau keras, lunak. Itu kan otoritas redaksi bersangkukan. Beda dengan kontrak, dia tergantung isi beritanya, kontennya. Itu kebijakan redaksi. Kita tidak bisa intrepensi, walaupun ada tidak sesuai mungkin secara persuasive dan komunikasi yang baik untuk mendinginkan suasana.

Humas selama ini dalam konteksnya kerjasama dengan media, secara spesifik untuk kontennya kami hampir tidak pernah melakukan klarifikasi, kami masih normal-normal saja, tidak gejolak.

“Mungkin ada satu-dua, tapi mungkin langsung pak Gubernur langsung klarifikasi tidak lewat humas, biar tidak bias. Humas memfasilitasi karena itu kewenangan humas, tapi pak gubernur yang menyampaikan”

Kalau komitmen kerjasama ini tidak ada secara tertulis, kita serahkan kepada kebijakan media, karena menurut saya mereka

paham saja. Untuk kontrak media itu tiap tahun, secara angka dia menyatakan kurang tahu karena itu urusan keuangan. Untuk humas secara komunikasi saja. Humas tidak melibatkan diri, karena kebijakan diatas oleh kepala biro.

Dia mengharapkan kedepan relasi ini tetap terbangun dengan baik, karena pemerintah tidak bisa lepas untuk menyiarkan dan menjembatani dalam kaitannya program pembangunan. Tanpa media masyarakat tidak akan tahu apa yang diprogramkan pemerintah. Mungkin sekarang sudah terbuka dengan media sosial. Tapi masih tidak bisa lepas dengan media mainstream, karena media tersebut masih berpatokan dengan kode etik jurnalis, beda dengan media sosial yang bebas.

**i) H. Sutransyah**

Nama : H. Sutransyah  
Jabatan : Tokoh Pers (Ketua PWI Kalteng Tiga Periode dan Ketua SMSI Kalteng  
Umur : 57 Tahun  
Alamat : Tumenggung Husin Palangka Raya  
Wawancara : - 4 Desember 2021 Pukul 09.56 – 11.03 Wib  
- 15 Desember 2021 Pukul 11.09- 12.34 Wib

Pria kelahiran 1965 merupakan wartawan senior yang sangat fokus dalam bidangnya. Karirnya diawali sejak 1989 sebagai wartawan Harian Banjarmasin Post. Di samping menjalani profesinya sebagai wartawan Sutransyah juga seorang PNS di Kantor Departemen Penerangan Kota Palangka Raya. Kemudian untuk lebih fokus menjalani profesi wartawan pada tahun 1993 mengundurkan diri sebagai PNS.

Kepiawaiannya dalam menjalankan profesi tidak hanya mampu menulis berita yang dibutuhkan masyarakat tetapi juga mampu mendidik beberapa mahasiswa menjadi wartawan profesional bahkan kini sudah ada yang menjadi direktur di koran besar

di daerah dan media milik pemerintah.

Dalam organisasi profesi. Sutransyah pernah tiga kali menduduki jabatan sebagai Ketua PWI Kalteng. Dia tercatat sebagai ketua PWI Kalteng terlama. Kemudian menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DKD) PWI Kalteng yang bertugas mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik oleh seluruh wartawan di Kalteng yang bergabung di PWI. Sambil merangkap sebagai Ketua Umum Serikat Media Siber Seluruh Indonesia (SMSI) sampai sekarang, di samping sebagai Pemimpin Redaksi Surat Suara Kalteng dan Mata Kalteng.co.id.

Selain aktif sebagai orang nomor satu di organisasi wartawan dia juga aktif di sejumlah organisasi sosial dan keagamaan seperti pernah sebagai ketua HMI Cabang Palangka Raya, Ketua KAHMI, PW Muhammadiyah Kalteng dan ICMI Kalteng.

Dia menilai relasi pers dengan Pemerintah Provinsi Kalteng dari tahun ke tahun hubungan antara pers dengan Pemerintah Provinsi Kalteng cukup harmonis, dukungan yang diberikan misal dalam hal pemberitaan namun juga tetap dengan koridor dan bingkai yang ada mengacu UU no 40 tahun 1999 tentang Pers sendiri. Kemudian berita yang disajikan sesuai dengan kode etik jurnalistik, bukti nyata setiap media cetak online, televisi, radio itu selalu mendapat perhatian, mendapat dukungan dana, melakukan kontrak halaman, media apapun. Ini sudah berjalan terus. Tentunya kontrak yang dilaksanakan itu sesuai dengan dasar hukumnya untuk menghidupkan media itu sendiri.

HAK Namun keberadaannya kita tetap melakukan pemberitaan yang bersifat control sosial, edukasi, pendidikan dan hiburan. Artinya kami tidak mau diatur, kalau salah kami tetap katakan salah. Media juga memberikan solusi jalan keluar juga, misalnya pembangunan jalan anggaran 10 km tapi yang berjalan terealisasi hanya 9 km, 1 km mungkin itu diperubahan jadi control kami akan

melakukan ini dan masukan itu berharga semua aspek di Kalteng. Intinya sudah harmonis karena saling memahami topoksi masing-masing. Kami menjaga berita itu tidak sara, fitnah, dan tidak merugikan siapapun.

Dalam memberitakan control sosial tidak ada perjanjian mengenai pemberitaan, berita tetap disajikan dengan seimbang, tetapi kami juga minta konfrimasi/tanggapan, misalnya pemberitaan yang ada sebab-akibatnya juga dengan cek-ricek, ibaratnya seperti dicubit sedikit tapi satu badan terasa dengan bahasa yang santun, mudah dimengerti dan tidak membuat kegaduhan.

Selama ini narasumber memiliki hak jawab dan hak sanggah, kalau sehari tidak bisa dilakukan klarifikasi bisa dilakukan di kemudian hari, kan ada senggang waktu selama sepekan supaya tidak sampai kea rah hukum.

Ada saja kekecewaan, pasti saja, mungkin karena beritanya kurang puaslah misalnya diminta foto dimuat 3 tetapi di pemberitaan hanya ada 2. Itu merupakan hak redaksi untuk menyunting namun setelah diberikan penjelasan kenapa bisa terjadi begitu tetapi maksud tujuan tetap dipublikasikan.

Yang penting media itu memiliki badan hukum, misalnya terverifikasi di dewan pers, kalau sudah mengikuti aturan mainnya ada kejelasan badan hukum, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masing-masing saling mendukung saja.

Hubungan media dengan politik, untuk menentukan sebuah keputusan yang terbaik untuk kepentingan media, pemerintah itu mempunyai legislatif dan eksekutif melalui mekanisme, misalnya diajukan ke pemprova minta persetujuan legislatif dan eksekutif juga, setelah mengetahui pertimbangan yang ada.

“Saya tidak melihat orang tidak berjasa dengan orang gubernur, karena semua media itu kan berjasa demi

kepentingan orang banyak. Buktinya apa yang diajukan bisa terpenuhi, besar-kecil nilainya itu ya masing-masing lah,”.

Harapan saya kerjasama disamping subsidi dari pemerintah, berita-berita itu lebih ditingkatkan lagi promosi Kalimantan Tengah hasil-hasil pembangunan, tetapi tetap control sosial, edukasi, dan sebagainya harus tetap.

## 2. Informan Kajian

### a) Dr. R. Biroum Bernardianto, M.Si

Nama : Dr. R. Biroum Bernardianto, M.Si  
Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalteng  
Umur : 54 Tahun  
Alamat : Jalan Cumi-Cumi Nomor 324 Palangka Raya  
Wawancara : - 25 November 2022 Pukul 09.00 -11.04 Wib  
- 3 Desember 2022 Pukul 11.34-12.56 Wib

R Biorum Bernardianto lahir di Cepu 1969 tinggal di Jalan Cumi-Cumi nomor 324 Palangka Raya. Dia menamatkan S1 Kehutanan pada Universitas Lambung Mangkurat 1995, S2 Administrasi Publik di Universitas Merdeka Malang dan S3 Adiministrasi Publik Universitas Brawijaya Malang 2015.

Sebelum menduduki jabatan sebagai Ketua Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Tengah, dia juga pernah sebagai dosen Universitas PGRI sejak 1996-2015, Ketua Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya 2015 sampai dengan 2019 dan Dosen Luar Biasa Universitas Terbuka sebagai Tutor TTM dan Pembimbngan Tugas Akhir Magister Administrasi Publik 2017 sampai sekarang.

Biroum juga aktif di sejumlah organisasi di antaranya Sekretaris Gerakan Banteng Muda Indonesia 1991-1993, anggota PGRI

1996 sampai sekarang, Pengurus Muhammadiyah Kota Palangka Raya 2016-sekarang, Wakil Ketua Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI) Kalteng 2018-2023 dan Sekretaris Komisi Kerukunan Antar Ummat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalteng 2018-2023.

Menurutnya, pada dasarnya sama mengetahui fungsi pers itu media informasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait fenomena yang terjadi. Ada prinsip-prinsip kerja pers diantaranya fakta, klarifikasi, dan lain-lain, sehingga berita yang diberitakan seyogyanya berita yang berkesesuaian di lapangan dan fakta. Ada kepentingan juga pers itu untuk memberikan memberitakan tentang pembangunan maupun birokrasi maupun yang lainnya.

Bergeser dari hal tersebut, banyak bermunculan fenomena perjanjian kerjasama antara lembaga pers dengan instansi pemerintah pelayanan publik. Namun Kita perlu juga berhati-hati bahwasanya integritas instansi pers itu dipertaruhkan dengan fenomena kerjasama ini, karena pers sebagai lembaga informasi pemberitaan tentunya perlu modal dana finansial untuk keberlangsungan industri pers mereka, sedangkan pemerintah punya kepentingan juga untuk memberitakan hasil-hasil pembangunannya. Secara teori tidak hanya hasil pembangunan bahkan praktik-praktik pelayanan publik belum tentu sesuai aturan yang berlaku.

“Nah, fenomena ini akan menjadi titik yang krusial. Kalau saya boleh katakan agak berbahaya bagi integritas, kredibilitas pers karena secara logika saja, secara teori rasional kita berpikir seseorang yang berjasa kepada orang lain dan yang menerima jasa merasa berhutang budi, cenderung mereka tidak melakukan hal hal mungkin saja menyakiti rekan mereka yang telah memberikan keberuntungan finansial kepada seseorang”.

Dia mengatakan, kalau di administrasi publik itu ada teori tentang keterbukaan, keadilan dan lain-lain, tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah pers itu bisa menjaga kredibilitasnya ketika mereka dihadapkan dengan pemberitaan dari sebuah lembaga dalam tanda kutip kerjasama. Dibalik kerjasama itu terdapat keuntungan finansial untuk keberlanjutan industrinya, disinilah perlu pemahaman baik dari pihak pers sendiri lalu dengan pihak lembaga/instansi yang bekerja sama, karena bukan tidak mungkin dibalik kelapangan hati instansi lembaga untuk memberikan dana publikasi kepada sebuah lembaga pemberitaan, tentunya ada harapan yang terselip agar pemberitaannya positif. Memang secara idealnya mereka seharusnya berusaha menjaga konflik kepentingan yang terjadi. Perlu kita ketahui juga dana itu bersumber dari anggaran yang sah, APBD lalu ada dasar hukumnya.

**b) Srie Rosmilawati, M.I.Kom**

Nama : Srie Rosmilawati, M.I.Kom  
Jabatan : Anggota Komisi Informasi (KIP) kalteng  
Umur : 39 Tahun  
Alamat : Jalan Raden Patah Nomor 1 Palangka Raya  
Wawancara : - 30 Maret 2022 Pukul 09.02 – 11.00 WIB  
- 5 April 2022 Pukul 13.30 - 14.50 WIB

Rosmilawati, M.I.Kom Sampit 8 Januari 1984, Jalan Raden Patah Nomor 1 Palangka Raya, S2 Magister Ilmu Komunikasi UNISKA (Universitas Kalimantan) Kalimantan selatan Tahun 2011, S1 Ilmu Komunikasi UNILA (Universitas Negeri Lampung) Lampung Tahun 2007, D3 Komunikasi/ Public Relations UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta Tahun 2004, Sebelumnya menjadi Komisisioner Komisi Informasi (KI ) Kalteng Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE), dia juga Dosen Tetap Yayasan Fakultas Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun 2008-sekarang. Kemudian Direktur PT Betang Multi Talenta (Betang.TV Online) 2018-sekarang.

Sebagai Dosen Luar Biasa Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Palangka Raya 2008 – 2017, Wakil Ketua KPID Provinsi Kalimantan Tengah Periode I 2007-2012, kemudian komisioner /Koorbid Pengawasan Penyiaran KPID Provinsi Kalimantan Tengah Periode II 2012-2015. Sebelumnya Staf Pelaksana Hubungan Partisipasi Masyarakat di sekretariat KPU, Buntok Barsel, 2009-2011. Sebelumnya sebagai ty76Account Executive dan Public Relations/ Humas Off Air PT Radio Patrol Radika( Radio Manajemen Qolbu 'MQFM" Lampung) pada Tahun 2006-2007.

Srie Rosmilawati juga aktif di beberapa organisasi seperti Ketua II dan Ketua Bidang Komunikasi Informasi Humas Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Kalteng sebagai, Fasilitator Bencana Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB)/ Muhammadiyah Disasster Management Center (MDMC), Bendahara Umum DPD KNPI Provinsi Kalteng, Bendahara Umum Karang Taruna Kota Palangka Raya, Wakil Ketua bidang Muslimat Kerukunan Umat Islam Kota Palangka Raya, Ketua Srikandi Kota Palangka Raya, Sekretaris Bawi Dayak Kota Palangka Raya, Humas Gerakan Mandau Talawang (GMTPS) Kalteng, Sekretaris Bidang Ekonomi Umat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Palangka Raya dan Wakil Ketua bidang Humas Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Kota Palangka Raya.

Menurutnya, media cetak saat ini mulai terkalahkan dengan media online. Media cetak banyak berpindah ke online. Kalau kita melihat dari konten-konten berita masing-masing media polanya sebenarnya masih sama sebenarnya. Samanya dalam artian begini informasi yang disampaikan lebih ke Kalteng Pos, Palangka Post dan Tabengan untuk hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mereka memang sudah punya slot-slot sendiri.

Cuma terkait dengan pemberitaannya. Kalau dilihat dari sudut pandang komunikasi dari freeming. Masing-masing media mempunyai perbedaan. Itu semua kalau saya lihat dipengaruhi

kepemilikan ada, kerjasama media, yang ada punya kerjasama dengan kontrak pemerintah daerah atau tidak, itu mempengaruhi.

Pandangan sebagai komisi informasi sebagai Komisi Informasi yang pertama pemberitaan Tentang Pemda saja dan kedua baik-baik saja. Kerjasama yang dilakukan Pemprov dengan media menurut saya suatu langkah baik. Untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi terutama informasi pembangunan.

Yang terpenting dalam kerjasama itu sesuai aturan yang berlaku dan dilakukan secara proporsional dan berazaskan keadilan. Selain itu tidak ada informasi yang direkayasa tapi benar-benar fakta tentang apa yang telah dikerjakan oleh Pemrov. Dengan kerjasama diharapkan tidak ada informasi yang tersumbat. Tidak saja berita yang baik-baik saja tetapi juga kritik juga perlu dimuat oleh media.

Bagaimana yang kontrol apakah sudah terakomodir. Kalau KIP tidak sampai ke konten tetapi untuk pemantau standarisasi keterbukaan informasi itu ada Undang-Undang nomor 14 /2008 bahwa setiap badan public punya pemerintah maupun swasta tetap dibiayai pemerintah harus mendapat informasi yang jelas kepada masyarakat dan ada kriteris informasi yang disampaikan maupun yang tidak disampaikan.

**c) Hakim Syah, M.I.Kom**

Nama : Hakim Syah, M.I.Kom  
Jabatan : Dosen Ilmu Komunikasi Iain Palangka Raya  
Umur : 44 Tahun  
Alamat : Jalan G.Obos VI Gang 8 Nomor 23  
Palangka Raya  
Wawancara : 26 Maret 2022 Pukul 10.30 -11.30 Wib  
-1 Mei 2022 Pukul 09.00 -10.30 Wib

Hakim Syah, M.A, tempat tanggal lahir Kebumen, 24 Februari 1979, Alamat rumah: Jln. G. Obos VI Gang 8 No. 59A RT 03/12

Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, pendidikan terakhir S2 Ilmu Politik (Konsentrasi Ilmu Komunikasi) UGM 2010, pengalaman pekerjaan Dosen ASN IAIN Palangka Raya (2006-sekarang), Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah 2012-2015, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (2015-2019), Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalteng 2018, Tenaga Ahli Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah (2019-2022). Aktif di beberapa organisasi Pengurus ASPIKOM Kalselteng 2018-2021, Pengurus Cabang KAGAMA Kota Palangka Raya 2019-2024, PCNU Kota Palangka Raya 2012-2017, PWNU Kalteng 2014-2019, LAKPESDAM NU Kalteng 2016-2021 dan 2021-2026 dan PW ISNU Kalteng 2020-2025.

Peran media cetak di Kalteng sebagian besar masih bersifat informative karena eksistensi dan kehadiran pemberitaannya sebagian besar terkait dengan informasi pembangunanisme maka cenderung menunjukan berfatner dengan Pemerintah Provinsi Kalteng tentu juga dengan stakeholder yang lain.

Sehingga fungsi-fungsi idealnya misalnya control sosialnya agak lemah. Artinya pemberitaan di media cetak lokal sekedar diketahui oleh public terkait dengan dinamika atau hal ikhwal terkait dengan pembangunan saja. Sementara hak masyarakat untuk mendapatkan informasi edukatif dan kritik membangun masih kurang. Terkesan pemberitaan di media cetak lokal itu seperti humas pemerintah karena ketika kita baca di surat kabar lokal dari halaman muka terkait dengan pemerintahan. Semestinya surat kabar lokal harus ada keberanian sih sebenarnya. Walaupun tidak meninggalkan aspek ekonomi juga secara langsung.

Apakah dibenarkan untuk melakukan kontrak halaman. Menurut saya secara pribadi sebagai warga masyarakat maupun sebagai orang yang menggeluti dunia kampus tidak sepakat ya kalau kemudian media untuk eksis harus “mendapat suplay” dari pemerintah daerah karena tetap ada inters dan tidak bisa men-

gontrol. Misalnya ada isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan public. Pengelola media pasti berpikir dalam konteks internal mediana.

Apakah selama ini ada sesuatu yang tidak pernah diungkap media. Misalkan ada isu-isu berkaitan public maka pembritaannya alandai-landai saja dan tidak bisa mengkirtisi secara detail apalagi kalau sebagai koran harian agak sulit melakukan investigasi karena diperlukan kecepatan penyajian berita kebanyakan berita hard news saja.

Kalau dalam penguatan ekonomi media itu seharusnya memperkuat iklan. Bukan kontrak halaman yang terkesan membranding sehingga agak sulit mengidealkan jurnalisme kritis dalam konteks Hard News atau control sosial yang lebih kepada kepentingan publik.

Sebagai pengkaji media melihat, kadang-kadang antara informasi dan foto lebih dominan foto, tapi sepertinya bukan kehabisan berita tapi kemampuan menerasikan suatu peristiwa melalui Bahasa berita. Seyogyanya tidak semua foto seakan dipaksakan dimuat menjadi berita foto

Semestinya dewan pers itu ada sampai ke daerah. Jangan hanya dipusat sehingga bisa melakukan pengawasan kepada pelanggaran kode etik oleh pers lokal. Masa masyarakat harus lapor ke Dewan Pers di Jakarta kalau ada pelanggaran. Ini yang seharusnya turut dipikirkan dewan pers maupun praktisi media maupun pengurus organisasi pers.

**d) Dr. H. M. Riban Satia, S.Sos., M.Si**

Nama : Dr. H. M. Riban Satia, S.Sos., M.Si  
Jabatan : Tokoh Masyarakat/Pengamat Sosial  
(Walikota Palangkaraya 2008-2013  
dan 2013-2018)  
Umur : 60 Tahun

Alamat : Jalan G. Obos Nomor 333 Palangka Raya  
Wawancara : - 5 November 2022 Pukul 9.15 – 10.30 Wib  
-12 Desember 2022 Pukul 13.30 – 12.45 Wib

HM Riban Satia, tempat tanggal lahir Kapuas, 5 Maret 1964, Alamat Jalan G. Obos Km 5 No. R. 999 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, pendidikan terakhir Doktor (S3-FISIPOL UGM). Pengalaman pekerjaan calon pegawai di Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalteng, 1986, Kasi Pemerintahan Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalteng, 1997, Kepala Sub Bagian Pengadaan, Setda Kalteng, 2008, Walikota Palangka Raya, Kalteng, 2008-2013 dan 2013-2018 serta dosen S2 Magister Adiministrasi Publik (MAP) Fisipol Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Pengalaman organisasi OSIS, PMI,. Pramuka, Menwa, Mapala, HMI, KAHMI dan Ketua Kagama Kalteng.

Fungsi kerjasama Pemprov dan media saling menguntungkan dari visi dan misi, masing-masing pihak yang kerjasama itu. Karena memang kebutuhan secara regulasi, kita kalau mengeluarkan biaya harus ada payung hukumnya. Ada hak dan kewajiban, kami melihat dari sisi pemerintah, kepetingan pemerintah adalah media ini sebagai tempat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, media juga ada kepentingannya untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang sumbernya dari masyarakat, kami sering mengatakan apa kelemahan pemerintah nah media bisa komunikasi sama para ahli.

Setelah itu dilaksanakan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan apa diharapkan masyarakat, sehingga kekurangannya dimana, tergantung siapa mengevaluasi. Pemeirntah berharap kepada media untuk mencari koreksi pemerintah ini sehingga bisa ditanyakan layak kah atau tidak, sehingga perlu open management, kontrak halaman itu hanya sebagai tuntutan. Kalau itu dikatakan layak, itu kami tidak bisa mengomentari, kalau segi manfaatnya itu sangat bermanfaat. Itu hanya bagaimana mengkomunikasikan

agar merasa nyaman. Ada juga yang sudah kontrak, tapi yang diinginkan tapi tidak terpenuhi. Kita tidak anti kritik, tapi maunya pemda itu apa, jangan kalau adnformasi itu tidak ditanya kebenarannya. Jangan bicara sembarangan, harus orang yg kompeten dan professional.

Perkembangan terakhir, untuk memenuhi masyarakat itu belum. Kepentingan pemerintah itu bisa disalurkan baik dengan media. Harapan kita pemda, setiap hari mengisi halaman, komunikasi dengan badan dinas. Kewajiban mereka untuk tanggung jawab dengan anggaran, SOPD. Disitulah para ahli itu hadir disitu. Media itu para tokoh silahkan membuat evaluasi melalui kolom yang sama dengan ini.

**e) Dr. Mambang I Tubil, S.H., M.Si**

Nama : Mambang Tubil, S.Sos., M.Si  
Jabatan : Tokoh Masyarakat (Pengurus Dewan Adat Dayak Kalteng)  
Umur : 58 Tahun  
Alamat : Jalan Manjuhan no.05 RT 02 RW 06 Kelurahan Bukit  
Wawancara : - 20 Juni 2023 Pukul 10.15 – 11.50 Wib  
- 09 Juli 2023 Pukul 15.30 – 16.59 Wib

Informan ini sebagai tokoh masyarakat. Lahir di Hurung Bunut 28 Oktober 1965. Mambang Tubil adalah pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah. Sehari-hari sebagai pengacara dan dosen tetap yayasan (DTY) sebuah perguruan tinggi. Mambang juga selama ini dikenal baik oleh para jurnalis yang bertugas di Palangka Raya. Terutama sejak beliau sebagai anggota DPRD Kota Palangka Raya sejak 2004 s/d 2014. Setelah selesai mengemban amanah sebagai wakil rakyat, diakuinya menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Kalteng Sejak Tahun 2015 s/d 2019.

Selama menjadi anggota dewan, maupun sebagai Ketua KIP hubungan dengan media massa sangat baik. Dia merasa terbantu dengan rekan-rekan media ini dalam penyebaran informasi kepada masyarakat karena sebagai anggota dewan waktu itu, ketika reses ke daerah pemilihan (dapil) banyak menyerap aspirasi masyarakat setelah itu pihaknya bahas bersama eksekutif untuk ditindaklanjuti. Dalam tindak lanjut ini pihaknya sampaikan kepada masyarakat melalui rekan-rekan media bahwa aspirasi mereka yang disusulkan sudah terealisasi dan ditindaklanjuti.

Mambang juga aktif di sejumlah organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi. Misalnya menduduki jabatan sebagai Ketua III Bidang Pertahanan dan Keamanan Adat DAD Provinsi Kalteng Periode 2022 s/d 2027 merangkap juga sebagai Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, sejak Tahun 2009 s/d 2024. Sejak 2018 juga dipercaya sebagai Ketua Forum Bela Negara Kota Palangka Raya sejak Tahun 2018 s/d 2025, Ketua Umum perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia Kalteng sejak Tahun 2019 s/d 2024, Ketua Yayasan Pendidikan Purnama Kalteng tahun 2008 sampai sekarang, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi provinsi Kalimantan tengah.sejak 2012 sampai dengan sekarang.

Selain itu Mambang Tubil selama ini telah mengikuti beberapa kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan kapasitas diri yaitu seperti bimbingan teknis, pelatihan dan pendidikan. Seperti

Lemhenas RI angkatan XX di Jakarta Tahun 2008, pendidikan mediator bersertifikat di Universitas Gajah Mada Tahun 2018, pendidikan advokat PKPA di Palangka Raya Tahun 2019.

Pernah juga mengikuti pelatihan perspektif HAM dalam penanganan konflik etnis di Jakarta tahun 2003, pelatihan penerapan pedoman teknis pelaksanaan anggaran pusat/daerah di Jakarta tahun 2005.

Dia juga menyebutkan pernah mengikuti bintek penyusunan RPJMD, RPJPD, RTRW, RTRK di Jakarta Tahun 2007. Selain itu diklatsus pencegahan tindak pidana korupsi di Jakarta Tahun 2010 serta pelatihan pemantau peradilan di- Jakarta tahun 2011.

Menurutnya, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membangun kemitraan dengan media massa yang dikonsumsi masyarakat cukup baik. Namun perlu didorong kembali karena media sebagai media informasi yang menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk menyampaikan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

**f) Dr. Asep Setiawan, M.Si**

Nama : Asep Setiawan  
Jabatan : Anggota Dewan Pers  
Umur : 60 Tahun  
Alamat : Alamat Jalan Kebon Sirih No-32 RT 11/RW 2  
Gambir Jakarta Pusat  
Wawancara : - 19 Mei 2023 Pukul 13.11 – 14.00 Wib

Asep Setiawan adalah anggota Dewan Pers. Lahir Lahir Tasikmalaya 16 Desember 1963 dan berkantor di Dewan Pers Alamat Jalan Kebon Sirih No-32 RT 11/RW 2 Gambir Jakarta Pusat.

Dia sebelum menjadi anggota Dewan Pers adalah seorang jurnalis. Diawali pada tahun 1989 setelah lulus kuliah S1 pada jurusan hubungan internasional Universitas Padjadjaran dia sebagai wartawan Harian Kompas 1989-1999, kemudian Editor Kompas. Com 1999-2000. Setelah dua tahun berkarir di media nasional Kompas, karir jurnalistiknya terus menanjak cepat menjadi Produser BBC Indonesia di London 2000-2011. Selama 11 tahundi London Kembali ketanah air sebagai Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV 2012-2013 dan terakhir menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Kajian Metro TV selama enam tahun 2013-2019.

Selain menjadi jurnalis dia juga aktif juga sebagai dosen jurusan hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada tahun 1996-1999, kemudian diangkat menjadi Ketua Jurusan Ilmu Politik UMJ tahun 2000-2012. Kemudian Ketua Program Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta 2021-Maret 2023.

Ketika berada di Kota Palangka Raya dalam rangka acara mengukur indeks kebebasan pers di Kalteng 19 Mei 2023, peneliti berkesempatan melakukan wawancara terkait relasi pers dengan Pemerintah Provinsi Kalteng.

Menurutnya, salah satu sumber untuk menghidupi perusahaan media adalah iklan. Ada iklan swasta, BUMN dan pemerintah yang salah satunya melalui kerjasama. Di media itu ada dua bagian yaitu sales marketing perusahaan dan satunya ruang redaksi. Sebagai sebagai badan usaha yang di dalam UU 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan salah satu fungsi pers ini adalah sebagai lembaga ekonomi maka disitulah berlakunya hukum ekonomi berlaku. Oleh karena itu sebagai perusahaan pers bisa mencari pendanaan itu dari mana saja. Salah satunya dari relasi dengan pemerintah daerah.

Tetapi begitu masuk ruang redaksi pemberitaan, kata dia, berlaku lah kaidah-kaidah pers itu seperti kode etik jurnalistik. Ruang redaksi itu independen oleh karena itu terkait dengan pemberitaan pemasangan iklan dan lain-lainnya sangat tergantung dari ruang redaksi.

Kalau ruang redaksi kumpulan orang-orang yang memiliki profesi di bidang jurnalistik, tentu seyogyanya mereka juga memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik. Oleh karena itu dia menyakini bahwa ruang redaksi memiliki independensi terhadap ruang pemberitaan atau sales marketing. Di beberapa perusahaan besar sudah ada garisnya.

Bahkan, di dalam peraturan Dewan Pers juga sudah ditetapkan bahwa seorang pemimpin redaksi itu tidak boleh merangkap sebagai pemimpin perusahaan. Disitulah rambu-rambu sudah ada. Dengan pembagian ini diharapkan adalah tidak ada intervensi dan pengaruh terhadap ruang redaksi.

Dia mengatakan, kalau ada pemasang iklan atau pemasang berita di dalam kontrak tidak ada perjanjian larangan pemberitaan. Oleh karena itu ada beberapa pilihan di ruang redaksi. Manakala dia memberitakan bertentangan dengan pemasang iklan, kemudian pemasang iklan menegur maka pilihannya apakah dia independen atau terpengaruh dan mengikuti keinginan pemasang iklan. Disitulah independensi media itu dimunculkan, sehingga ketika bertentangan dengan pemasang iklan maka konsekuensinya kalau dia melanjutkan idealismenya maka bisa jadi kerjasamanya dibatalkan. Disitulah dinamika namanya kemerdekaan pers.

“Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua pemasang iklan mempengaruhi pers atau media sebab dalam pengelolaan redaksi sudah ada prinsip-prinsip dasar pengelolaan redaksi. Kalau pengaruh itu ada dalam bentuk apapun, media tidak hidup dalam ruang hukum tetapi pengaturan ada itu biasanya berkaitan dengan kaidah-kaidah misalnya Sara. Tidak boleh membesar-besarkan sara, fitnah dan lain-lain,”

Menurutnya, sekarang ini tidak ada larangan-larangan seperti orde baru. Jangan ini dan jangan itu. Sekarang itu sifatnya imbauan, konfirmasi dulu kalau ada masalah. Di Dewan Pers banyak yang mengadu bahwa mereka yang dirugikan oleh pemberitaan pers mekanisme tidak melakukan seperti pemutusan hubungan.

Biasanya kalau ada tokoh atau lembaga yang merasa dirugikan akibat pemberitaan dari media besar, mereka mengadu ke Dewan Pers kalau mengadu ke medianya tidak mendapat tangga-

pan. Bahkan pernah ada yang mengadu ke redaksi tapi dimuat sedikit tidak seperti pemberitaan awal. Akhirnya mengadu ke Dewan Pers. Distulah mekanisme pertama etika berlaku, aturan berlaku, kemudian mekanis interaksi antara para pihak dengan media.

Kalau nanti ada pengaruhnya kerjasama dengan pemberitaan ini mungkin studi kasus. Secara umum pengalaman pihaknya tidak ekstrem. Jarang ada ancaman-ancaman. Kasus-kasus berita terkait pemasangan iklan tidak se- ekstrem seperti dulu. Pemerintah juga sepanjang saya sebagai anggota Dewan Pers jarang mencabut.

### **C. Relasi Media Cetak Lokal dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

Relasi media cetak lokal khususnya media cetak dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dalam branding kepemimpinan kepala daerah akan digambarkan secara detail. Kondisi relasi pers saat setelah pasangan H Sugianto – H Habib Ismail ditetapkan pemenang Pilkada 2016 oleh KPU Kalteng dan dilantik oleh Presiden pada 25 Mei 2016, maka Gubernur H Sugianto dan Wakil Gubernur H Habib Ismail mulai melaksanakan program pembangunan sesuai dengan visi dan misinya yang telah disampaikan kepada masyarakat saat kampanye.

Seiring dengan mulainya menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan maka Gubernur sadar betul bahwa dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa hanya bersama wakil gubernur saja, tetapi harus melibatkan semua kalangan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, pengurus ormas, lembaga adat, pemuda, guru, pimpinan parpol, TNI-Polri, instansi vertikal, BUMN dan yang tidak kalah penting adalah perlu dukungan dengan kerja sama dengan pers yang ada di Kalimantan Tengah.

Secara khusus dukungan pers terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini, sebagai bentuk relasi Pemprov dengan

media. Relasi ini dilakukan antara lain dalam bentuk kerjasama di bidang pemberitaan, iklan maupun langganan koran. Selain itu dalam bentuk hubungan sosial yang harmonis dengan dukungan struktur sosial tertentu dengan petinggi media. Dalam kajian ini supaya lebih fokus khusus meneliti media cetak lokal khususnya media massa cetak Harian Kalteng Pos, Harian Tabengan dan Harian Palangka Post yang terbit di Palangka Raya.

## 1. Media Cendrung Menjadi “Corong Pemerintah”

Adanya relasi media cetak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini mendapat sorotan dari dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Palangka Raya, Hakim Syah, MA. Dia menyebutkan, secara umum peranan keberadaan beberapa media cetak lokal terutama yang mengadakan kontrak halaman dengan pemerintah daerah bersifat informatif karena eksistensi kehadirannya lebih banyak kepada berita pembangunan.

Menurutnya, jika dilihat secara keseluruhan sampai hari ini memang pemberitaannya tidak lebih dari informasi terkait dengan pembangunan cendrung ada berpatner dengan pemerintah daerah, para pengambil kebijakan di daerah.

“Tentu saja, fungsi-fungsi ideal pers aspek control sosialnya agak lemah. Artinya informasi yang disampaikan oleh media lokal cendrung sekedar untuk diketahui oleh public terkait dinamika hal ikhwal pembangunan saja. Sehingga yang bersifat edukatif dan kontrol kurang. Akhirnya media tertentu itu ada kecendrungan semacam corong pemerintah ketika kita baca”.

Di halaman muka berita pemerintahan. Begitu juga di halaman belakang. Harus ada kebermanian sebenarnya. Sebagai pribadi atau dunia kampus, menurutnya, sebenarnya agak tidak sepakat kalau media untuk bisa hidup harus mendapat suplai dari pemda karena sarat konplik kepentingan. Bagaimana pun tetap tidak bisa

mengontrol. Misalnya ada isu-isu menyangkut kepentingan publik oleh pemda dalam konteks itu pasti akan berfikir dalam internal medianya dan beritanya landai-landai saja. Tidak mengkritisi secara detail.

Sementara menurut Wakil Gubernur Kalteng periode 2016-2021 H. Habib Ismail diwawancarai sejak awal dirinya bersama Gubernur Sugianto Sabran menyatakan mencalonkan diri, kampanye hingga ditetapkan sebagai kepala daerah, peran media sangat dirasakan sekali. Sehingga ketika memulai pemerintahan sudah bertekad untuk melakukan relasi dengan pers dalam mewujudkan pembangunan Kalteng berkah sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang dicanangkan sejak awal pemilihan.

Peran media sangat bermanfaat untuk mewujudkan pembangunan-pembangunan di pemerintahan. Pihaknya menginformasikan tentang kinerja Pemprov, tentang program-program dan juga tentang himbauan serta peraturan-peraturan yang diproduksi diproduksi oleh pemerintah, dan juga lewat media juga kita bisa mengetahui tentang keadaan Kalteng secara keseluruhan.

“Jadi kita sadar juga bahwasanya pers ini sangat penting, karena lewat pers juga kita mengetahui apresiasi masyarakat tentang kinerja-kinerja yang telah dihasilkan dari pemerintahan ini”.

Oleh sebab itu, tentunya pemprov ini juga sangat mendukung dan sangat open terhadap media-media, baik itu wartawan maupun perusahaan-perusahaan media itu sendiri, karena kita sadar bahwasanya pers ini juga gagasan-gagasan yang dikeluarkan atau dicantumkan di media-media massa itu adalah sebagai pilar demokrasi, kebebasan berpendapat, dan juga informasi-informasi akurat, yang tentunya informasi itu bukan informasi abal-abal dan persnya juga bukan abal-abal.

Makanya, menurut Habib Ismail, pemprov selama pihaknya menjabat 2016-2021 juga sangat selektif sangat selektif dalam memilih media-media yang dijadikan mitra di pemerintahan.

Relasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi dengan media ini salah satunya dengan cara melakukan kerjasama dengan media massa. Baik itu cetak, elektronik, maupun online. Termasuk dengan Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post. Karena Gubernur sadar betul bahwa peran media massa sangat besar dalam menyampaikan informasi keberhasilan pembangunan kepada masyarakat sampai kepada yang berada di pelosok. Seperti diungkapkan Wakil Gubernur Kalteng periode 2016-2021, H Habib Ismail .

“...Kami menyadari bahwa peran media ini sangat penting. Baik saat kami menyatakan mencalonkan diri hingga ditetapkan sebagai kepala daerah peran media sangat signifikan. Sehingga ketika memulai bekerja sebagai pimpinan daerah kerjasama kami lanjutkan.”

Menurutnya, peran pers sangat bermanfaat untuk mewujudkan pembangunan di pemerintahan Sugianto-Habib Ismail. Terutama menginformasikan tentang pasangan ini, tentang program-program, imbauan serta peraturan-peraturan yang diproduksi oleh pemerintah. Melalui pers juga Pemprov bisa mengetahui tentang keadaan Kalteng secara keseluruhan.

Dalam melakukan kerjasama ini ada dasar hukumnya yang diusulkan oleh Pemprov Kalteng dalam APBD kepada pihak DPRD Kalteng untuk dibahas dan disetujui. Setelah disetujui baru dilakukan kerjasama dengan media. Anggaran kerjasama dalam bentuk kontrak terbatas dan harus dipertanggung jawabkan. Karena sudah melakukan Kerjasama maka Pemprov sering mengimbau dan meminta kepada pers atau media, untuk bisa menuangkan berita yang bisa mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik.

“Kita juga lewat media meminta juga dari media juga kita menyebarkan imbauan misalnya tentang prokes. Protokol kesehatan dari media juga kita juga menyematkan isi-isi suatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas....”

Pemprov kontrak dengan beberapa media berbeda-beda setiap tahun anggarannya. Berdasarkan data yang diperoleh nilai anggaran kerjasama kontrak halaman dengan media massa nilai ini cukup besar setiap tahunnya. Seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Anggaran Kerjasama Media Massa

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Tahun/Keterangan
1	Kontrak Media Massa	Rp. 5.080.900.000,-	APBD 2019
2	Kontrak Media Massa	Rp. 6.721.365.000,-	APBD 2020
3	Kontrak Media Massa	Rp. 16.447.745.814	APBD 2021

Sumber: Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD TA 2019/2020 -2020/2021 Diskominfisantik Kalteng.

Tabel 2. Media yang melakukan kerjasama dengan Pemprov Kalteng Tahun 2020

No	Media Online	Media Cetak	Media Elektronik
1	Borneo News	Kalteng Pos	TVRI
2	Mata Kalteng	Palangka Post	RRI
3	Berita Sampit	Radar	Dayak Tv
4	Media Dayak	Tabengan	Tv One
5	Ini Kalteng	Palangka Ekspres	Metro Tv
6	Dayak News	Introgator	Kompas Tv
7	Kalteng Ekspres	Media Kalteng	Jurnal Tv
8	Inovasi Borneo	Suara Kalteng	Kalteng Pos Fm (Radio)
9	Cakrawala.Com	Tabloid Tambun Bungai	Kalteng Tv

10	Kalteng Pos Online	Kompas	Sb Tv Pangkalan Bun
11	Kalteng Today	Republika	Hayat Tv Sampit
12	Lintas Berita 1	Media Indonesia	Kapuas Tv
13	Balanganews.Com	Koran Sindo	Batara Tv
14	Info Borneo	Tempo	Silva Tv Murung Raya
15	Bpknews.Com		
16	Kalimantan Pos		
17	Borneo Alam Kita		
18	Metro Kalimantan		
19	Fakta Kalimantan		
20	Gerak Kalteng		
21	Zona Kota		
22	Huma Betang		
23	Batang Voice		
24	Palangka News.Co.Id		
25	Kaltengterkini.Co.Id		
26	Beritakalteng.Com		
27	Kalamanthana.Id		
28	Jurnalborneo.Co.Id		
29	Kaltengnews.Co.Id		
30	Detik.Com		

Sumber : Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kaleng 2020

Media yang dirangkul Pemprov menurut Wakil Gubernur Habib Ismail dari yang besar menjadi corong utama Pemprov Kalteng maupun media-media kecil. Media ini terdiri dari media cetak, elektronik maupun online ini termasuk yang besar, media kecil pun ada dirangkul yang knotraknya mungkin yang Rp 500juta atau Rp300juta, bahkan ada media online juga, karena melalui media ini diharapkan komunikasi dengan antara pemerintah dengan masyarakat jadi positif.

Dia menyadari bahwasanya masyarakat dan pemerintah tidak bisa langsung ketemu leluasa. Apalagi daerah pelosok,

jadi lewat media pihaknya berkomunikasi. Masyarakat mungkin mengeluarkan statement-statementnya aspirasi-aspirasinya keinginan-keinginannya lewat media kita baca, setelah itu akan jawab permintaan masyarakat tersebut.

Kerjasama ini diawali dengan melakukan inventarisir media yang ada di Kalteng oleh Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kaleng serta Dinas Komunikasi dan Informasi Publik Kalteng. Setelah itu disampaikan kepada Gubernur untuk menentukan media mana yang ditetapkan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi serta menentukan jumlah besaran nilai kontrak dari kerjasama tersebut.

Gubernur dalam menentukan media untuk melakukan kerjasama, diantaranya juga mendengarkan masukan dari Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kaleng serta Dinas Komunikasi dan Informasi Publik Kalteng. Terutama terkait dengan rutinitas terbit cetak untuk media cetak, jangkauan dan penyeberannya untuk media online dan elektronik.

Menurut Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Sutoyo, S.STP pada 31 Agustus 2020 dalam sebuah acara kehumasan, salah satu dasar Pemprov melakukan kerjasama dengan media ini adalah UU 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 9 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan. Pemprov hanya melakukan kerjasama dengan media yang memiliki perusahaan pers berbadan hukum seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa perusahaan pers wajib berbadan hukum Indonesia. Selain itu adalah UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Provinsi menugaskan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah untuk menangani kerjasama dengan media massa ini. Sesuai dengan Tugas Biro PKP (Pergub 27/2016

Pasal 160) membina, mengkoordinasikan, dan mengembangkan penatausahaan administrasi serta komunikasi publik guna pemantapan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Sementara Fungsi Biro PKP (Pergub 27/2016 Pasal 161 menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penatausahaan administrasi dan hubungan kerjasama media, di samping pelaksanaan publikasi serta dokumentasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Namun seiring dengan perubahan nomenklatur dari Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah menjadi Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Daerah maka sejak 2022 tugas dan pokok fungsinya (tupoksi) diserahkan kepada Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian Kalimantan Tengah.

Seperti diketahui bahwa peran humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik ketika tupoksinya Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah menjadi Biro Sekretariat Pimpinan Sekretariat Daerah maka sejak 2022 tugas dan pokok fungsinya (tupoksi) diserahkan kepada Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian Kalteng antara lain mengkomunikasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta membangun persepsi dan imet positif (branding) pemerintah di mata publik. Sedangkan maksud dan tujuan melakukan kerjasama adalah sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, promosi potensi daerah, membangun persepsi dan image positif pemerintah serta menyanggah berita palsu / hoaks serta alat kontrol kinerja pemerintahan.

Adapun sebagai bahan pertimbangan melakukan kerjasama dengan beberapa media yang sudah ditetapkan antara lain, kecepatan penyampaian pesan luas jangkauan publikasi kemudahan akses informasi efek publikasi.

Kepala Seksi Kehumasan Diskominfoantik Kalteng Arbandi Gana saat diwawancarai 15 Desember 2021 Pukul 10.00

– 11.30 WIB, menyatakan pihaknya memberikan masukan kepada pimpinan untuk menentukan media yang dipilih untuk melakukan kerjasama.

Namun sebelumnya dalam kerjasama ini ada beberapa langkah yang dilakukan pihak Pemerintah Provinsi yaitu media menyampaikan penawaran, kemudian dilakukan verifikasi media tersebut oleh pihak Pemprov, dilakukan negosiasi baru kemudian penetapan. Walaupun demikian keputusan untuk menentukan nilai kontrak kerjasama ini terakhirnya ditentukan oleh sementara untuk menentukan sepenuhnya ditentukan oleh pimpinan.

Dalam melakukan kerjasama ini pun tidak semua media yang tahun sebelumnya mendapat kontrak akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Seperti media cetak harian di Kalteng yaitu Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post sebelumnya melakukan kerjasama tetapi tahun 2022 hanya dua media cetak saja yaitu Kalteng Pos dan Palangka Post. Sementara Harian Tabengan tidak melakukan kerjasama karena alasan non teknis.

Selain itu ada beberapa faktor lagi yang menentukan terjalannya kerjasama dengan media ini antara lain, adanya unsur kepemilikan yang masih terkait dengan histori pendirian perusahaan media karena masih ada hubungan kekerabatan dengan gubernur yang sudah ada sebelum menduduki jabatan sebagai gubernur. Dalam penentuan ini ada kecenderungan lebih bersifat subjektif terutama dari besaran nilai kontrak kerjasama tersebut. Dalam kondisi ini nilai kontrak tidak dilihat dari jumlah halaman yang terdapat dalam media massa dan bagus nya hasil percetakan sebagai output. Termasuk tidak melihat lagi tingkat penyebaran atau distribusi koran tersebut di beberapa daerah.

Ada juga kerjasama didasarkan yang berkaitan dengan kesamaan ideologi kepartaian pemilik media dengan partai politik yang mengusung gubernur saat maju dalam pemilihan gubernur.

Kemudian ada didasarkan profesionalisme media itu sendiri. Sebagian besar media yang disetujui kerjasama kontrak halaman adalah media yang sejak awal pencalonan dan masa kampanye pilgub sudah aktif memberitakan aktivitas calon gubernur bersifat branding.

“Saya minta kepada awak media, tolonglah bahwa kita ini sangat besar pengaruhnya suatu sikon terhadap opini, isu, karena itu terserat masyarakat, untuk menariknya kembali sulit. Sebelum itu terjadi harus dikonfrimasi sesuai kode edtik untuk cek dan ricek”.

Nilai manfaat yang harus diberitakan kepada masyarakat, kita melihat juga untuk sementara ini karena memang selama ini aman saja. Dalam internal senior bisa membina junior, dalam menyampaikan berita itu real dan fakta saja, kita juga tidak menghalangi apa-apa, karena kesepakatan kerja kita tidak mendoktrin mereka, maka dari itu pihaknya tidak ingin memakai bahasa kontrak akan tetapi kesepakatan kerja, artinya menghormati profesioalnya. Apa saja yang dikerjakan gubernur dan perangkatnya silahkan diberitakan, keterbukaan itukan ada Undang-Undang yang mengaturnya maka harus disampaikan.

Biasanya kalau ada yang perlu diklarifikasi, pihaknya mengadakan jumpa pers. Jadi yang menyampaikan bisa sekda, wagub, kadis, siapa saja yang terkait. Misalnya karena ada salah komunikasi yang disampaikan kepada media.

Dia juga menyebutkan, pihaknya tidak bisa menutup mata perputaran dalam politik media, ada beberapa media (diluar kesepakatan dengan pemprov) tetapi tetap berkomunikasi baik hanya saja untuk melakukan kesepakatan kerja itu belum dilakukan karena masih berproses, disatu sisi di media ini banyak tentunya dengan keterbatasan anggaran dana.

Inilah harapan kedepan tim anggaran bisa memasukan lebih besar lagi anggaran untuk media dalam APBD, untuk mendukung dana untuk kerjasama media ini.

Pihaknya juga melakukan komunikasi langsung juga dengan media yang belum berkesepatan kerja bukan berarti pihaknya tidak memperhatikannya, akan tetapi ini masih proses berjalan.

Media juga mempunyai karakter masing-masing, selama mereka memberitakan sesuai fakta tidak masalah tetapi dalam hal ini ada unsur keterkaitan Bagaimana pun juga dinamika politis tadi tidak terlepas. Unsur kedekatan itu juga ada pengaruhnya tetapi tidak mengesampingkan yang lain dan tetap dirangkul. Misalnya seorang pejabat ada awak media yang dekat dengan dia yang menyokong sejak awal, branding dari awal itu keliatan rekam jejaknya. Tetapi untuk diskominfo ini tetap professional.

“Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalteng dengan media massa maka segala informasi keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi bisa diketahui masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan hingga masyarakat yang ada di pelosok”

Tidak jauh berbeda juga disampaikan Menurut Jomangkar, SH Kasubag Penjaringan Informasi Biro Humas Pemprov, relasi antara Pemerintah Provinsi dengan media selama ini sudah cukup baik. Karena relasi antara pemerintah dan media ini sudah terbangun sejak awal yaitu sejak zaman orde baru dan saling punya kepentingan.

Media, kata Jomangkar, merespon tuntutan public akan hal informasi, dari segi isinya baik keberhasilan maupun kekurangan pemerintah. Ada juga beberapa media yang ingin independen tapi sulit, termasuk pada zaman reformasi pun media tidak bisa melepaskan diri dari pemerintah, meskipun dia mengakui independen tapi sangat sulit.

Untuk di Pemerintah Provinsi, menurutnya selama saya kurang lebih 8 tahun di bidang humas ini, relasi sudah berjalan dengan baik. Karena pemerintah menyampaikan informasi melalui media mengenai strategis pembangunan pada masyarakat. Sehingga media ini tidak bisa dilepaskan sama sekali baik dari segi pembangunan, politik, maupun pribadi.

Keuntungan akibat relasi ini banyak yang di dapat media. Misalnya seperti kerjasama sifatnya hibah, kontrak halaman. Selain dengan media lokal bermitra juga dengan media nasional. Dananya porposional secara variasi dalam hibah bentuk kontrak halaman. Ibaratnya seperti dua mata uang, saling membutuhkan. Tergantung media itu berkolaborasi dengan pihak manajemennya.

Selama menangani masalah pemberitaan di Biro Huimas menurutnya pernah kecewa karena pemberitaan, tapi tidak ekstrim. Karena ada dua hal yang berbeda, dari sisi pemberitaan media punya otoritas, apakah dia mau keras, lunak. Itu kan otoritas redaksi bersangkuan. Beda dengan kontrak, dia tergantung isi beritanya, kontennya. Itu kebijakan redaksi. Kita tidak bisa intrepensi, walaupun ada tidak sesuai mungkin secara persuasive dan komunikasi yang baik untuk mendinginkan suasana.

Humas selama ini dalam konteksnya kerjasama dengan media, secara spesifik untuk kontennya kami hampir tidak pernah melakukan klarifikasi, kami masih normal-normal saja, tidak gelolak.

“Mungkin ada satu-dua, tapi mungkin langsung pak Gubernur langsung klarifikasi tidak lewat humas, biar tidak bias. Humas memfasilitasi karna itu kewenangan humas, tapi pak gubernus yang menyampaikan,” katanya.

Kalau komitmen kerjasama ini tidak ada secara tertulis, kita serahkan kepada kebijakan media, karena menurut saya mereka paham saja. Untuk kontrak media itu tiap tahun, secara angka dia

menyatakan kurang tahu karena itu urusan keuangan. Untuk humas secara komunikasi saja. Humas tidak melibatkan diri, karena kebijakan diatas oleh kepala biro.

Hal itu juga diakui oleh Ketua PWI Cabang Kalteng yang juga Pemimpin Redaksi Harian Palangka Post, H. Haris Sadikin. Menurutnya kerja sama dengan pemerintah itukan selama inikan berjalan baik, memang ada keuntungan dari kedua belah pihak. Dari sisi pemerintah juga memanfaatkan keberadaan media untuk melanjutkan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakannya. Dari sisi media juga mendapatkan benefit dari perjanjian-perjanjian kerja sama itu, memang mekanisme kerja samanya itu yang memang kita perlu ada pembenahan-pembenahan lagi.

“Bentuk kerjasama ini memang itukan memang resmi di sahkan. Secara regulasi juga memungkinkan baik dari sisi undang-undang 40 maupun dari sisi sistem keuangan negara itu disahkan”.

Untuk kerjasama berita selama ini, menurut Haris Sadikin, tidak menjadi temuan BPK tetapi ada sempat menjadi temuan karena mekanisme pembelanjannya yang tidak dibenarkan, sehingga ada item-item yang dihapus. Item-item yang dihapus itu yang tidak diperbolehkan lagi itu seperti belanja iklan.

Haris Sadikin juga mengungkapkan, walaupun sudah melakukan kerjasama bukan berarti semua keinginan Pemprov juga dituruti oleh pihaknya. Dia mencontohkan, saat berita tentang disetujuinya rencana pemekaran Provinsi Kalteng dibagi menjadi Provinsi Kotawaringin oleh DPRD Kalteng yang mendapat dukungan gubernur, diberitakan hanya sekali saja. Setelah itu, tidak ada pemberitaan kelanjutan pada hari berikutnya. Untuk menjaga stabilitas di masyarakat. Karena ada sebagian masyarakat yang menolak rencana pemekaran tersebut.

Tokoh pers lainnya, mantan Ketua PWI Cabang Kalteng tiga periode, H. Sutransyah yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Cabang Kalteng, menilai relasi pers dengan Pemerintah Provinsi Kalteng dari tahun ke tahun mempunyai hubungan cukup harmonis. Dukungan yang diberikan misalnya dalam hal pemberitaan namun juga tetap dengan koridor dan bingkai yang ada mengacu UU no 40 tahun 1999 tentang Pers sendiri. Kemudian berita yang disajikan sesuai dengan kode etik jurnalistik, bukti nyata setiap media cetak online, televisi, radio itu selalu mendapat perhatian, mendapat dukungan dana, melakukan kontrak halaman. Ini sudah berjalan terus. Tentunya kontrak yang dilaksanakan itu sesuai dengan dasar hukumnya untuk menghidupkan media itu sendiri.

Sedangkan Pemimpin Redaksi Kalteng Pos, Husrin A Latif, mengungkapkan, Selama ini kerja sama Surat Kabar Harian Kalteng Pos sudah berjalan. Baik dengan Pemerintah Provinsi Kalteng maupun kabupaten/kota. Kita memberikan speech pemberitaan publikasi berjangka. Ada yang berbulan, pertriwulan, enam bulan maupun yang tahunan.

Jadi tergantung masing-masing kerjasamanya. Kita memberikan kontribusi berita kemudian Pemerintah Provinsi memberikan finansial ekonomi. Selama ini berjalan cukup fektif. Pertama karena di tengah pandemi selama menunjang keberlangsungan media. Kerjasamanya melalui MoU menyesuaikan anggaran yang disiapkan Pemrintah Daerah mereka sudah ada budget masing-masing. Misalnya satu halaman sekian ratus juta, seperempat halaman sekian puluh juta dan jumlah terbitnya berapa kali dan dihalaman berapa itu sudah ada hitungan sesusia kesepakatan. Misalnya Pemerintah Provinsi misalnya setengah halaman sudah ada dalam MoU itu.

Untuk tiga tahun terakhir kerjasama kita lakukan perspace. Jadi kita punya pekerjaan Rp100 juta misalnya. Cuma hitungannya

dinilai berapa sekali terbit dikalikan jumlah berita misalnya selama dua bulan. Terbitnya setiap hari Senin sampai Jumat.

Untuk lima tahun terakhir kerjasama Pemprov Kalteng dengan Kalteng Pos sudah berjalan dan kabupaten/kota sebagian daerah saja. Pemberitaan yang masuk dalam kerjasama adalah kegiatan-kegiatan gubernur, wakil gubernur, sekda maupun pejabat yang mewakili gubernur. Sementara kegiatan dinas/badan itu berada diluar dari kerjasama dengan Pemprov karena mereka mempunyai anggaran SOPD sendiri.

Kerjasama saling membantu. Kendala yang dihadapi selama ini yaitu ketika masa covid mewabah. Apa yang disepakati dalam kerjasama tersebut bisa terjadi pergeseran nilai. Bahkan ada juga kerjasama yang sudah berjalan dan selesai tahun ini dibayar pada tahun depan.

Dalam liputan berita kerjasama ini ditugaskan kepada seorang wartawan khusus yang pos di Pemprov Kalteng. Misalnya Kalteng Pos menugaskan kepada Annisa Bahril Wahdah. Menurutnya, setiap hari diwajibkan untuk membuat berita terkait berita Pemprov Kalteng. Kalau misalnya tidak ada agenda pemprov setiap harinya, maka dia akan menggali berita sendiri dengan melakukan wawancara kepada pejabat yang berwenang terhadap peristiwa atau fenomena baik yang ada di tengah masyarakat maupun terkait dengan tugas pokok dan fungsi pejabat tersebut baik secara teknis maupun kebijakan.

Dia mengungkapkan, untuk liputan pemprov biasanya terkadang di tempatkan di halaman utama hanya isu-isu pemprov yang menarik, baik narasumbernya gubernur atau jajaran di bawahnya. Selain itu ada halaman tersendiri sebagai kontrak kerjasama antara Pemprov dengan Kalteng Pos. Namun untuk gubernur tidak selalu halaman utama, apabila isu tidak terlalu menarik masuk di halaman kontrak.

Dalam meliput dia tidak ada mendapat arahan agar pemimpin redaksi atau redpel hanya berita-berita kegiatan gubernur yang positif saja. Sementara berita-berita miring untuk tidak diliput. Baginya hanya meliput dengan mengedepankan kode etik jurnalistik. Baik itu berita positif atau negatif. Untuk kewenangan penerbitan menjadi tanggungjawab redaksi.

Menurutnya dalam meliput di Pemprov kalau ada kejadian atau fakta yang bernada miring atau mengkritik Pemprov tetap diberitakan. Misalnya sedang ramai diperbincangkan yakni penonaktifan tenaga kontrak Pemprov Kalteng. Penonaktifan ini banyak dinilai tidak baik dan merugikan karena ada seribu lebih tekon kehilangan pekerjaan. Jika ini diberitakan maka tentu Pemprov juga akan dinilai tidak baik oleh masyarakat. Namun berita ini tetap diliput dan diterbitkan. Sementara sikap Pemprov Kalteng termasuk kepala dinas atau kepala badan terbuka dengan isu-isu yang ditanyakan wartawan.

Terkait hubungan Pemprov dengan Kalteng Pos menurut ibu dari satu anak ini, selama ini sudah berjalan dengan baik kerjasama yang terjadi dan citra Pemprov menurut yang saya dapatkan informasi dari masyarakat sudah bagus.

Dia menyarankan ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa dihadiri oleh media karena hal-hal tertentu. Tetapi, wartawan dituntut untuk tetap mendapat berita terlebih untuk isu-isu yang ada, sebaiknya diberikan fasilitas untuk jumpa pers dan tetap melayani media. Selama ini sudah berjalan demikian tetapi masih jarang dan terkadang hanya mendapat rilis tertulis, terkadang kurang puas karena ada beberapa hal yang biasa ingin ditanyakan untuk penggalian informasi lebih dalam.

Selama beberapa tahun pemerintahan Gubernur Sugianto telah menganggarkan untuk biaya kontrak kerjasama yang cukup besar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran

tersebut sebelum ditetapkan sudah dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif seperti yang diutarakan Wakil Ketua DPRD Kalteng Ir H Abdul Razak. Selama ini yang saya ketahui selama tiga periode sebagai Wakil Ketua DPRD, perhatian Pemprov Kalteng terhadap media sudah baik. Menyiapkan anggaran untuk sejumlah media melalui APBD. Begitu pun sebaliknya bantuan dari media cetak, elektronik terhadap upaya menyampaikan informasi keberhasilan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalteng kepada masyarakat itu sangat baik.

Sehingga dengan informasi yang diberikan masyarakat bisa mengetahui perkembangan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng, banyak membantu memberikan informasi yang benar, jadi masyarakat tahu apa yang dilakukan Pemprov yang berkaitan dengan legislatif DPRD Provinsi Kalteng, sehingga masyarakat tahu, dan bisa menilai pelaksanaan pembangunan kota.

“Saya kira secara umum control sosial itu objektif, artinya kalau memang perlu dikritik ya dikritik. Jadi media professional aja lah intinya”

Hal ini diakui juga oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng Sirajul Rahman, M.I.Kom, bersama anggaran lain yang telah ditetapkan di APBD oleh Gubernur bersama pimpinan DPRD Kalteng. Untuk menetapkan berapa besaran nilai kontrak kerjasama ada beberapa langkah yang dilakukan pihak Pemerintah Provinsi yaitu media menyampaikan penawaran, kemudian dilakukan verifikasi media tersebut oleh pihak Pemprov, dilakukan negosiasi baru kemudian penetapan.

Kerjasama media lokal ini mendapat tanggapan beragam dari sejumlah informan. Ketua Perwakilan Ombudsman RI Kalteng, Dr R Biroum Bernadianto, Msi menyatakan, banyak bermunculan fenomena perjanjian kerjasama antara lembaga pers dengan instansi pemerintah pelayanan publik. Namun Kita perlu

juga berhati-hati bahwasanya integritas instansi pers itu dipertaruhkan dengan fenomena kerjasama ini, karena pers sebagai lembaga informasi pemberitaan tentunya perlu modal dana finansial untuk keberlangsungan industri pers mereka, sedangkan pemerintah punya kepentingan juga untuk memberitakan hasil-hasil pembangunannya. Secara teori tidak hanya hasil pembangunan bahkan praktik-praktik pelayanan publik belum tentu sesuai aturan yang berlaku.

“Nah, fenomena ini akan menjadi titik yang krusial. Kalau saya boleh katakan agak berbahaya bagi integritas, kredibilitas pers karena secara logika saja, secara teori rasional kita berpikir seseorang yang berjasa kepada orang lain dan yang menerima jasa merasa berhutang budi, cenderung mereka tidak melakukan hal hal mungkin saja menyakiti rekan mereka yang telah memberikan keberuntungan finansial kepada seseorang”.

Dia mengatakan, kalau di administrasi publik itu ada teori tentang keterbukaan, keadilan dan lain-lain, tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah pers itu bisa menjaga kredibilitasnya ketika mereka dihadapkan dengan pemberitaan dari sebuah lembaga dalam tanda kutip kerjasama. Dibalik kerjasama itu terdapat keuntungan finansial untuk keberlanjutan industrinya, disinilah perlu pemahaman baik dari pihak pers sendiri lalu dengan pihak lembaga/instansi yang bekerja sama, karena bukan tidak mungkin dibalik kelapangan hati instansi lembaga untuk memberikan dana publikasi kepada sebuah lembaga pemberitaan, tentunya ada harapan yang terselip agar pemberitaannya positif. Memang secara idealnya mereka seharusnya berusaha menjaga konflik kepentingan yang terjadi. Perlu kita ketahui juga dana itu bersumber dari anggaran yang sah, APDB lalu ada dasar hukumnya.

Anggota Komisi Informasi Publik Kalteng, Srie Rosmilawati, M.I.Kom menyampaikan, Pandangan sebagai komisi informa-

si sebagai Komisi Informasi yang pertama pemberitaan Tentang Pemda saja dan kedua baik-baik saja. Kerjasama yang dilakukan Pemprov dengan media menurut saya suatu langkah baik. Untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi terutama informasi pembangunan.

Hal yang terpenting dalam kerjasama itu sesuai aturan yang berlaku dan dilakukan secara proporsional dan berazaskan keadilan. Selain itu tidak ada informasi yang direkayasa tapi benar-benar fakta tentang apa yang telah dikerjakan oleh Pemrov. Dengan kerjasama diharapkan tidak ada informasi yang tersumbat. Tidak saja berita yang baik-baik saja tetapi juga kritik juga perlu dimuat oleh media.

Bagaimana yang kontrol apakah sudah terakomodir. Kalau KIP tidak sampai ke konten tetapi untuk pemantau standarisasi keterbukaan informasi itu ada Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 (Republik, 2008) bahwa setiap badan publik punya pemerintah maupun swasta tetap dibiayai pemerintah harus mendapat informasi yang jelas kepada masyarakat dan ada kriteria informasi yang disampaikan maupun yang tidak disampaikan.

Sedangkan tokoh masyarakat, Dr. HM Riban Satia, M.Si, menyampaikan bahwa fungsi kerjasama Pemprov dan media saling menguntungkan dari visi dan misi, masing-masing pihak yang kerjasama itu. Dalam kerjasama tersebut, kebutuhan secara regulasi, kalau Pemprov mengeluarkan biaya harus ada payung hukumnya. Ada hak dan kewajiban. Dia melihat dari sisi pemerintah, kepetingan pemerintah adalah media ini sebagai tempat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, media juga ada kepentingannya untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang sumbernya dari masyarakat. Dia menyatakan sering mengatakan apa kelemahan pemerintah nah media bisa komunikasi sama para ahli.

Setelah itu, kata Walikota Palangka Raya dua periode ini, dilaksanakan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan seperti harapan masyarakat, sehingga kekurangannya dimana, tergantung siapa mengevaluasi. Pemerintah berharap kepada media untuk mencari koreksi pemerintah ini sehingga bisa ditanyakan layak kah atau tidak, sehingga perlu open management, kontrak halaman itu hanya sebagai tuntutan. Kalau itu dikatakan layak, itu dia tidak bisa tidak bisa mengomentari, kalau segi manfaatnya itu sangat bermanfaat. Itu hanya bagaimana mengkomunikasikan agar merasa nyaman. Ada juga yang sudah kontrak, tapi yang diinginkan tapi tidak terpenuhi. Pemprov diharapkan tidak anti kritik, tapi maunya pemda itu apa, jangan kalau adnformasi itu tidak ditanya kebenarannya. Jangan bicara sembarangan, harus orang yang kompeten dan profesional.

Informan selanjutnya dari tokoh masyarakat yang juga pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, Dr Mambang I Tubil, berpendapat bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membangun kemitraan dengan media massa yang dikonsumsi masyarakat cukup baik. Namun perlu didorong kembali karena media sebagai media informasi yang menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk menyampaikan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Karena itu, disamping kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat juga hak masyarakat untuk mengetahui sejauh mana sejauh pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Nah, dalam menginformasikan kepada masyarakat salah satunya itu adalah melalui media yang efektif, efisien dan akurat.

Media cetak ada tiga yaitu Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post yang cukup besar. Ini salah satu media yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat Kalteng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait informasi. Ini perlu diperkuatkan kem-

bali dan disinergikan lebih baik antara pemerintah dengan pihak media serta bantuan suntikan dana sebagainya. Sesuai dengan ketentuan dan berkeadilan. Melihat tiga media ini secara proporsional. Ini pemahaman sinergisitas antara pemerintah daerah dengan media cetak yang ada di Kalimantan Tengah.

Perhatian Gubernur itu bagus sebagai kewajibannya membantu media cetak dalam rangka menginformasikan pembangunan-pembangunan yang ada di Kalteng. Media tentu merasa terbantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyampaikan berita secara terukur dan kepada masyarakat.

Anggaran yang dibantu pemerintah kepada sangat membantu media dalam menjalankan operasionalnya maupun kesejahteraan karyawannya dan anggaran itu sah secara resmi dan mendapat persetujuan dari DPRD Kalteng serta aturan lain yang berlaku.

Kerjasama ini juga mendapat tanggapan dari anggota Dewan Pers yaitu Dr. Asep Setiawan. Menurutnya, salah satu sumber untuk menghidupi perusahaan media adalah iklan. Ada iklan swasta, BUMN dan pemerintah yang salah satunya melalui kerjasama. Di media itu ada dua bagian yaitu sales marketing perusahaan dan satunya ruang redaksi. Sebagai sebagai badan usaha yang di dalam UU 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan salah satu fungsi pers ini adalah sebagai lembaga ekonomi maka disitulah berlakunya hukum ekonomi berlaku. Oleh karena itu sebagai perusahaan pers bisa mencari pendanaan itu dari mana saja. Salah satunya dari relasi dengan pemerintah daerah.

Tetapi begitu masuk ruang redaksi pemberitaan, kata dia, berlaku lah kaidah-kaidah pers itu seperti kode etik jurnalistik. Ruang redaksi itu independen oleh karena itu terkait dengan pemberitaan pemasang iklan dan lain-lainnya sangat tergantung dari ruang redaksi.

Kalau ruang redaksi kumpulan orang-orang yang memiliki profesi di bidang jurnalistik, tentu seyogyanya mereka juga memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik. Oleh karena itu dia menyakini bahwa ruang redaksi memiliki independensi terhadap ruang pemberitaan atau sales marketing. Di beberapa perusahaan besar sudah ada garisnya.

Bahkan, di dalam peraturan Dewan Pers juga sudah ditetapkan bahwa seorang pemimpin redaksi itu tidak boleh merangkap sebagai pemimpin perusahaan. Disitulah rambu-rambu sudah ada. Dengan pembagian ini diharapkan adalah tidak ada intervensi dan pengaruh terhadap ruang redaksi.

Dia mengatakan, kalau ada pemasang iklan atau pemasang berita di dalam kontrak tidak ada perjanjian larangan pemberitaan. Oleh karena itu ada beberapa pilihan di ruang redaksi. Manakala dia memberitakan bertentangan dengan pemasang iklan, kemudian pemasang iklan menegur maka pilihannya apakah dia independen atau terpengaruh dan mengikuti keinginan pemasang iklan. Disitulah independensi media itu dimunculkan, sehingga ketika bertentangan dengan pemasang iklan maka konsekuensinya kalau dia melanjutkan idealismenya maka bisa jadi kerjasamanya dibatalkan. Disitulah dinamika namanya kemerdekaan pers.

“Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua pemasang iklan mempengaruhi pers atau media sebab dalam pengelolaan redaksi sudah ada prinsip-prinsip dasar pengelolaan redaksi. Kalau pengaruh itu ada dalam bentuk apapun, media tidak hidup dalam ruang hukum tetapi pengaturan ada itu biasanya berkaitan dengan kaidah-kaidah misalnya Sara. Tidak boleh membesar-besarkan sara, fitnah dan lain-lain,”

Menurutnya, sekarang ini tidak ada larangan-larangan seperti orde baru. Jangan ini dan jangan itu. Sekarang itu sifatnya im-

bauan, konfirmasi dulu kalau ada masalah. Di Dewan Pers banyak yang mengadu bahwa mereka yang dirugikan oleh pemberitaan pers mekanisme tidak melakukan seperti pemutusan hubungan.

Biasanya kalau ada tokoh atau lembaga yang merasa dirugikan akibat pemberitaan dari media besar, mereka mengadu ke Dewan Pers kalau mengadu ke medianya tidak mendapat tanggapan. Bahkan pernah ada yang mengadu ke redaksi tapi dimuat sedikit tidak seperti pemberitaan awal. Akhirnya mengadu ke Dewan Pers. Distulah mekanisme pertama etika berlaku, aturan berlaku, kemudian mekanis interaksi antara para pihak dengan media.

Kalau nanti ada pengaruhnya kerjasama dengan pemberitaan ini mungkin studi kasus. Secara umum pengalaman pihaknya tidak ekstrem. Jarang ada ancaman-ancaman. Kasus-kasus berita terkait pemasangan iklan tidak se- ekstrem seperti dulu. Pemerintah juga sepanjang dia sebagai anggota Dewan Pers jarang mencabut.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dalam melakukan kerjasama ini pun tidak semua media yang tahun sebelumnya mendapat kontrak akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Seperti media cetak harian di Kalteng yaitu Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post sebelumnya melakukan kerjasama tetapi tahun 2022 hanya dua media cetak saja yaitu Kalteng Pos dan Palangka Post. Sementara Harian Tabengan tidak melakukan kerjasama karena alasan non teknis.

## **2. Terjadi Perbedaan Pemberitaan Media Kontrak dengan Tidak Kontrak**

Dari hasil kajian ini ada terdapat perbedaan dalam pemberitaan antara media yang melakukan kerjasama dengan Pemprov Kalteng dengan media tidak melakukan kerjasama berupa kontrak halaman. Terutama dalam pemberitaan kontrol sosial. Hal ini akan terlihat dalam bagian hasil kajian hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai gambaran dibagian ini peneliti

sampaikan beberapa berita sebagai contoh berita kontrak merupakan hasil dari kerjasama di tiga media lokal di Kalteng.

**a. Kalteng Pos**

1. Halaman utama Selasa 20 Desember 2019 judul Pemprov peringkat lima nasional dalam renaksi pencegahan korupsi.
2. Halaman Utama Senin 17 Mei 2021 judul Gubernur menang di MA
3. Halaman utama 15 April 2023 judul Gubernur wujudkan Kalteng Makin Berkah.
4. Halaman Utama 4 April 2023 judul Gubernur dukung pelaksanaan reformasi agraria, wujudkan Kalteng Berkah.



Gambar 1 Pemberitaan Kontrak Pada Kalteng Pos

Sumber : Kalteng Pos, 28 November 2023

## b. Tabengan

1. Selalu terapkan prokes di berbagai kegiatan. Berita halaman dalam.



Gambar 2 Pemberitaan Kontrak Pada Tabengan

Sumber : Tabengan, 17 Oktober 2020

## c. Palangka Post

1. Halaman utama Sabtu 8 Mei 2021 judul jangan abaikan protokol kesehatan
2. Halaman utama Senin 3 Januari 2022 dengan judul Undang Vaname Primadona Kalimantan Tengah. Di penghujung 2021 Gubernur Sugianto bersama anggota DPRRI Agustiar Sabran meninjau perkembangan tambak udang Vaname di Sungai Damar, Kecamatan Sungai Luci, Sukamara.
3. Halaman utama Senin 24 Januari 2022 judul Gubernur: Perlu perhatian khusus layanan Kesehatan.



Gambar 3 Pemberitaan Kontrak Pada Palangka Post

Sumber : Palangka Post, 19 Januari 2021

## D. Media Massa Lokal Dalam Menjalankan Fungsinya

Pers lokal yang menjadi objek kajian ini adalah Surat Kabar Harian Kalteng Pos, Surat Kabar Harian Tabengan dan Surat Kabar Harian Palangka Post sesuai dengan amanat Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers pada Pasal (3) menyebutkan pers mempunyai fungsi yaitu fungsi informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial. Fungsi ini sangat penting tidak saja untuk publik, tetapi juga bagi sebuah pemerintahan seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan fungsi media massa ini menjadi amanat konstitusi kepada wartawan untuk dijalankan dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

### 1. Fungsi Informasi

Dalam menjalankan fungsi informasi dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi penting yang dalam pemberitaan kerjasama media dengan Pemprov ini, setiap harinya memberikan informasi penting terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi misalnya terkait dengan pemberhentian tenaga honor, kebijakan terkait dengan perekebunan sawit dan pertambangan yang ada di Kalteng dan lain-lain.

Dalam menjalankan fungsi ini ke tiga media massa cetak ini pasti memuatnya setiap hari. Menurut Pemimpin Redaksi Kalteng Pos Husrin A Latif, pihaknya setiap hari memuat berita yang mengandung informasi ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa berita informasi ini paling banyak kalau ditotal dari jumlah halaman Kalteng Pos.

Setiap berita yang diterbitkan, terutama dari Pemerintah Provinsi Kalteng hampir semuanya bersifat informasi. Selain itu dari berita-berita lain yang beragam sumbernya.

Hal senada juga diungkapkan Pemimpin Redaksi Tabengan Victor Giroth. Berita informasi selalu mendominasi setiap halaman yang ada di koran yang dipimpinya.

Berita informasi ini, menurutnya, berita yang paling umum. Baik itu berita daerah, nasional bahkan internasional. Di berita jenis inilah hal-hal yang penting disampaikan oleh nara sumber.

Sementara Pemimpin Redaksi Palangka Post, Haris Sadikin, mengakui, berita yang disampaikan oleh Pemprov Kalteng apakah itu disampaikan oleh gubernur, wakil gubernur maupun melalui dinas-dinas isinya adalah informasi-informasi apa yang telah dilakukan Pemprov maupun yang direncanakan.

Di sini peneliti hanya mengambil hanya salah satu contoh berita masing-masing dari Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post.

#### **a. Kalteng Pos**

- a. Halaman 1 pojok kanan Rabu 4 Desember 2019 memuat berita dengan judul Petani dan Peternak Ditanggung Pemerintah.
2. Halaman 1 terbit 2 Januari 2021. hal 1 kaki (bawah) dengan judul hari pertama 2021 Gubernur kunjungan kerja ke Kobar. Sub judul bergerak cepat memperbaiki jalan dan jembatan.

## **b. Tabengan**

Halaman 1 kaki Rabu 24 Februari 2021 dengan judul Pertamina meluncurkan Pertamina Turbo dan Trade In LPG di Barsel

## **c. Palangka Post**

1. Halaman 1 pojok bawah, terbit Sabtu 8 Mei 2021 dengan judul pemerintah siapkan program vaksinasi skema gotong royong.
2. Halaman 1 Pojok Bawah. Sabtu 8 Mei 2021 dengan judul Pemerintah siapkan program vaksinasi skema gotong royong.

## **2. Fungsi Pendidikan**

Fungsi pers berikutnya sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 1999 adalah fungsi pendidikan. Fungsi ini sangat penting untuk memcerdaskan masyarakat. Baik makna pendidikan secara makna harfiah maupun makna tersirat. Dalam media cetak lokal fungsi ini cukup banyak juga dan setiap hari terbit.

Terkait berita pendidikan ini Pemimpin Redaksi Kalteng Pos Husrin A Latif, menyatakan, berita jenis ini ada yang memang hasil liputan wartawan di lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah dengan berbagai macam kegiatan, tetapi ada juga berita nasional yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

Tetapi tidak jarang juga ada tulisan opini yang biasanya terbit sekali seminggu di setiap hari Sabtu atau Minggu yang ditulis oleh para guru, dosen, widyaswara seperti dari LPMP. Sedangkan Pemimpin Redaksi Tabengan Victor Giroth menyebutkan bahwa berita pendidikan di Tabengan itu mempunyai halaman khusus. Isinya beragam dari berita-berita tentang pendidikan dari yang formal, non formal dan informal.

Termasuk, kata Victor, tulisan yang menjadi karya para siswa seperti artikel maupun berita kegiatan disekolah seperti kegiatan

ekstra kurikuler Osis, Pramuka, PMI serta pengembangan minat dan bakat. Tidak jauh berbeda dengan dua media lainnya, Pimpin Redaksi Palangka Post, Haris Sadikin, menyebutkan, pihaknya setiap harinya wajib memasukan berita yang bersifat pendidikan ini. Karena pihaknya sadar berita ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Sekaligus, kata Haris, medianya mendukung kebijakan Pemprov Kalteng dalam bidang pendidikan ini. Misalnya menyampaikan berita atau tulisan-tulisan yang berkaitan misalnya dengan ujian nasional, selain menyampaikan kebijakan pemerintah pusat yang penting diketahui masyarakat.

Sebagai contoh fungsi pendidikan itu bisa dilihat dari berita di bawah ini.

#### **a. Kalteng Pos**

Terbit Senin 17 Mei 2021 halaman 4 dengan judul 1000 beasiswa disediakan untuk kuliah di universitas terbaik dunia.

#### **b. Tabengan**

Terbit Senin 2 November 2021 halaman 9 dengan judul anggota Pramuka UPR ikuti pelatihan agroforestry di PTP UPR.

#### **c. Palangka Post**

Terbit Sabtu 29 Januari 2022 Hal. 11 Judul: Mahasiswa punya kontribusi dalam Pembangunan.

### **3. Fungsi Hiburan**

Tidak kalah penting fungsi hiburan juga selalu diterbitkan oleh Kalteng Pos, Palangka Post dan Tabengan. Khususnya berita hiburan ini lebih banyak diterbitkan pada hari akhir pekan, Sabtu atau Minggu.

Dalam sebuah media massa tidak lengkap kalau tidak ada berita hiburan. Kalau beberapa jenis berita lebih kepada berita

penting seperti berita yang berisi informasi maupun kontrol sosial, untuk berita hiburan lebih kepada unsur menarik dari suatu kejadian dan bersifat ringan.

Untuk di koran Kalteng Pos menurut Pemimpin Redaksinya, Husrin A Latif, menjelaskan, berita hiburan sengaja pihaknya terbitkan hampir setiap hari. Bahkan kalau itu menyangkut seorang artis terkenal dan ada sebuah peristiwa menarik yang dialami artis tersebut, maka bisa di terbitkan di halaman satu.

Namun selama ini berita hiburan ini lebih banyak di tempatkan di halaman dalam atau halaman terakhir. Karena posisi halaman terakhir juga sangat strategis ketika pembaca membalik koran kebelakang maka langsung menemukan berita hiburan tersebut.

Dalam beita hiburan ini yang lebih banyak, menurutnya, adalah memberitakan artis dalam negeri karena mempertimbangkan unsur kedekatan. Sese kali bisa memberitakan artis luar negeri ketika artis tersebut memang akrab bagi masyarakat.

Begitu pun di koran Tabengan, menurut Pemimpin Redaksinya, Victor Giroth, di korannya berita hiburan ini tidak luput dari pemberitaan. Lebih-lebih ketika ada artis yang melakukan show baik itu di Kota Palangka Raya maupun di 13 kabupaten lainnya. Tidak terbatas hanya artis yang sudah punya nama saja tetapi juga artis lokal di daerah itu.

Berita hiburan ini, menurut Victor, cukup banyak juga peminatnya. Tidak hanya para remaja saja tetapi juga orang tua dan anak-anak. Seperti ketika idola mereka tampil di sebuah tempat kemudian diberitakan.

Untuk di Palangka Post, berita hiburan ada juga setiap hari. Menurut Pemimpin Redaksinya, Haris Sadikin, meskipun berita ini jarang di tampilkan di halaman satu tetapi selalu ada di halaman lain tetapi diletakan di tempat yang mudah dilihat oleh pem-

baca. Misalnya di *headline* dengan porsi yang cukup membuat orang tertarik.

Berikut ini contoh berita hiburan yang diterbitkan ke tiga media tersebut.

#### **a. Kalteng Pos**

Terbit pada 17 Mei 2021 halaman 9 dengan judul Harriet Robson Putus karena covid-19. Mason Greenwood pemain Manchester United putus dengan Harriet Robson.

#### **b. Tabengan**

Terbit 2 November 2020 halaman 20 judul Sean Connery actor pemeran James Bond meninggal dunia dalam usia 90 tahun.

#### **c. Palangka Post**

Terbit 31 Januari 2022 halaman 6 judul Bupati ikut meriahkan ajang music apresiasi Musisi Kobar.

### **4. Fungsi Kontrol Sosial**

Selain fungsi informasi, pendidikan dan hiburan, ada lagi fungsi kontrol social yang diamanahkan kepada media massa. Fungsi ini merupakan fungsi terberat yang harus dijalankan oleh media massa. Termasuk Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post. Khususnya berita yang bersifat kontrol sosial terhadap Pemerintah Provinsi. Berita kontrol sosial inilah yang sering dicari oleh masyarakat.

Pemimpin Redaksi Kalteng Pos, Husrin A Latif, pada prinsipnya mereka menjunjung tinggi berita control social namun dalam menyajikan berita ini, dia menekankan kepada wartawan harus hati-hati dan benar-benar harus memperhatikan aturan yang ada dalam UU 40 tentang Pers dan kode etik jurnalistik. Terutama untuk menghindari persoalan hukum.

Ketika ada berita-berita yang berbau negative, mengkritik maupun sifatnya bisa menyudutkan Pemerintah Provinsi, pihaknya harus cermat dalam pemberitaannya membuat ketersinggungan mitra kerja.

Menurut Husrin, sebelum berita kritik atau kontrol social itu dirurunkan dilakukan rapat terlebih dahulu dengan manajemen redaksi. Dari rapat itulah diputuskan apakah berita itu diturunkan, ditunda atau tidak diberitakan dengan melakukan analisa apa dampaknya kalau berita itu diturunkan dan bagaimana dampaknya kalau tidak kita terbitkan. Biasanya kalau sudah viral dan masyarakat luas sudah tahu maka berita itu sudah pasti diterbitkan. Tinggal kewajiban kita melengkapi berita itu dari sisi kode etik jurnalistiknya, di halaman berapa dan posisi mana. Untuk menjaga itu. Melalui ulasan atau redaksional yang kata-katanya halus. Bagi berita yang tidak diturunkan di media cetak, maka kita ada juga group-group media lain seperti online yang tidak ada kerjasamanya dengan Pemerintah Provinsi Kalteng maka berita diterbitkan disana. Ketika ada orang yang menanyakan kenapa di Kalteng Pos tidak terbit, maka kita bisa menjawab bahwa sudah diterbitkan di online group. Walaupun di MoU tidak ada yang memuat perjanjian bahwa berita-berita kritik atau miring untuk tidak dimuat.

Untuk wartawan yang meliput di Pemprov tidak kita larang untuk membuat berita apapun. Tapi berdasarkan SOP sebelum diedit oleh redaktur ada list-berita disitu kita melihat dan kita bedah apakah berita wartawan ini sudah memenuhi kaidah jurnalistik dan potensi kemitraan. Wartawan selama sudah mengerti berita yang harus mereka liput beritanya. Dalam perjalanannya di masa gubernur sebelumnya walaupun melakukan kritik tetap juga mendapat kerjasama walaupun dalam jumlah relatif lebih kecil dibandingkan media utama lainnya.

Sementara di Tabengan menurut Pemimpin Redaksinya, Victor Giroth, kontrol social tetap dilakukan lebih-lebih saat tidak

ada lagi kontrak. Pemberitaannya mengkritisi. Kalau bekerjasama berarti teman. Kalau teman harus saling menjaga. Kalau media miring redaksi harus konfirmasi dulu.

Tujuan dalam melakukan kontrol sosial kepada Pemerintah Provinsi Kalteng, menurutnya, bukan karena ada unsur lain, seperti tidak suka atau hal lain. Tetapi semata-mata menjalankan amanah yang disampaikan Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers.

Artinya, kata Victor, kalau ada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan, media hanya mengingatkan agar bisa sesuai aturan. Kontrol sosial yang dijalankan tidak hanya kepada Pemprov saja tetapi kepada semua pihak baik institusi negara maupun pihak swasta dan masyarakat.

Sementara Pemimpin Redaksi Palangka Post, Haris Sadikin, mengungkapkan, selain memnberitakan berbagai jenis pemberitaan informasi, pendidikan dan hiburan, Palangka Post juga memberitakan yang sifatnya kontrol sosial.

Dalam MoU pihaknya dengan Pemerintah Provinsi Kalteng, tidak ada membatasi masalah larangan pemberitaan yang bersifat control social kepada Pemerintah Provinsi Kalteng. Namun terlebih dahulu melalui pertimbangan rapat redaksi.

Kalau pun harus menyajikan pemberitaan control social maka kepada wartawan diwajibkan mentaati kaidah-kaidah jurnalistik yang terdapat dalam Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers dan kode etik jurnalistik. Seperti harus melakukan konfirmasi, praduga tak bersalah dan sejumlah aturan lainnya.

Fungsi kontrol sosial media ini mendapat tanggapan dari Dosen Komunikasi IAIN Hakim Syah, MA fungsi kontrol sosial inilah yang masih perlu ditingkatkan untuk disajikan kepada masyarakat. Karena menurut pengamatannya pemberitaan media yang melakukan kerjasama khususnya media cetak masih seba-

gian besar isi pemberitaannya adalah tentang keberhasilan pembangunan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Kalteng maupun oleh Pemkab/Kota se Kalteng. Dia menyarankan agar fungsi kontrol sosial ini lebih banyak lagi walaupun tidak melepaskan aspek ekonomi media dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan omsetnya. Jangan sampai media kontrak hanya menjadi corong pemerintah saja dan kontrol sosialnya lemah. Kalau kontrolnya lemah maka masyarakat mencari berita hanya melalui media sosial seperti FB, IG, twitter dan lain-lain yang kebenaran dan pertanggungjawabnya tidak ada yang menjamin.

#### **a. Kalteng Pos**

Jumat 13 Desember 2019 Halaman 1 Head Line judul Sekda dua kali diperiksa. Terkait proyek sumur bor. (Tidak ada kontrak halaman)

#### **b. Tabengan**

1. Terbit halaman 1 Jumat 16 Oktober 2020 judul ratusan massa kembali tolak omnibus law.
2. Terbit halaman 1 Kamis 3 Juni 2021 judul Dagut gunakan 4 alat bukti lawan Gubernur.
3. Terbit halaman 1 Kamis 3 Juni 2021 judul ada berita Pemprov Kadisdik H Saipudi. Raelisasi Vaksinasi Tenaga Guru Masih di Bawah 50 persen.
4. Terbit halaman 1 Rabu 28 Juni 2021 judul Sekda Kalteng Dicipot. Gubernur Wajib Klarifikasi. Sumber praktisi Hukum Afridel Djinu. Sekda Jabatan tertinggi maka sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tidak ada berita Pemprov.
5. Terbit halaman 1 Jumat 25 Juni 2021 judul PLT Sekda Tak Boleh Cairkan anggaran. Sumber praktisi Hukum Afridel Djinu.

6. Terbit halaman 1 Senin April 2021 judul hentikan Food Estate. Disebutkan program ambisius pemerintah pusat dalam mengembangkan pangan di Indonesia melalui Food Estate merupakan pengajuan gubernur Kalteng. Diminta cabut oleh WALHI Kalteng, Save Our Borneo (SOB) dan Pantau Gambut.
7. Terbit halaman 1 Selasa 27 April 2021 judul terdakwa sumur bor bebas. Jaksa daftar kasasi ke MA. Pihak Kejaksaan Negeri Palangka Raya gerak cepat usai putusan bebas Pengadilan Tpkor Palangka Raya terhadap terdakwa Arianto terkait korupsi pengadaan sumur bor . Jaksa ngotot kasasi ke MA.
8. Terbit halaman 1 Selasa 27 April 2021 Kondisi H Sabran Ahmad Menurun. Tidak ada perhatian Pemerintah Provinsi Kalteng.
9. Terbit halaman 1 Kamis 29 April 2021 judul sistem pendidikan Kalteng gagal? Banyak peserta didik tak lolos SB-MPTN. Sumber ketua komisi 3 DPRD Kalteng Duwel Rawing. Gubernur Tak Hadir Pemakaman H Sabran Ahmad..
10. Terbit halaman 1 Rabu 21 April 2021 judul terdakwa korupsi sumur bor divonis bebas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Arianto bebas.
11. Rabu 26 Oktober 2022. Berita Utama Geram Bakar Foto Gubernur dan Wagub Kalteng. Puluhan Mahasiswa UPR dan IAIN Palangka Raya tergabung dalam Gerakan rakyat Merdeka (Geram) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur, Selasa (25/10). Pengunjuk rasa menyampaikan rasa kekecewaan terhadap kepemimpinan gubernur dan wagub yang dinilai tak mampu menyejahterakan dan tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dirasakan rakyat. Di Kalteng Pos halaman 6 tanggal 26 Oktober 2022. Di Palangka Post tidak terbit tanggal 26 Oktober 2022.

### **c. Palangka Post**

Sabtu 8 Mei 2021 halaman 12 Oknum perawat mengaku terdesak ekonomi Sub Judul: Kasus surat rapid test antigen palsu. Kontrol sosial bukan terkait berita Pemprov.

## BAB IV

# RELASI PERS DENGAN PEMERINTAH PROVINSI

### A. Relasi Pers dengan Pemerintah Provinsi Kalteng

**K**erjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan media massa merupakan terobosan yang tidak semua Pemerintah Provinsi di Indonesia. Kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak ini mempunyai sisi negatif dan positifnya sebagai bentuk pertukaran sosial.

Berdasarkan hasil kajian yang dimulai dengan observasi terhadap media massa cetak yang menjadi objek kajian, kemudian wawancara terhadap subjek kajian dan informan serta dokumentasi, kerjasama dengan media yang dilakukan pihak Pemerintah Provinsi Kalteng melalui sebuah proses yang cukup panjang. Namun karena pemberitaan Pemprov Kalteng ini hampir ada setiap hari dan terbit di halaman satu serta terkadang ditambah pada halaman dalam lengkap dengan foto gubernur dan wakil gubernur serta lambang daerah sehingga ada informan menilai bahwa media cetak tertentu khususnya yang melakukan kontrak halaman terkesan sebagai “corong pemerintah”. Selain itu ketika dikaitkan dengan teori pers otoriter secara tersirat posisi media tersebut

terkesan “tidak berdaya” khususnya ketika ingin melakukan fungsinya melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah. Karena sudah melakukan kesepakatan untuk memberitakan sesuai dengan kepentingan pemerintah. Walaupun tidak dipungkiri terkadang pada kasus tertentu media ini memberitakan kontrol sosial ketika media merasa tertekan oleh publik dan beban moral karena di media sosial tersebar secara luas.

Relasi media ini juga sesungguhnya punya andil dalam pemberitaan positif saat diawali pelaksanaan pemilihan gubernur dan adanya komunikasi antara lain manajemen media atau paling tidak dengan wartawan yang meliput di lapangan kemudian wartawan ini menyampaikan komitmen antara tim sukses dengan manajemen redaksi masing-masing. Upaya ini bagian dari strategi komunikasi politik waktu pasangan Sugianto Sabran-Habib Ismail mulai menyatakan maju dalam Pilkada 2016 lalu. Pasangan ini sangat paham bagaimana efektifnya melakukan komunikasi menggunakan media. Komunikasi politik adalah ialah urusan menyangkut para politisi membujuk publik melalui rapat dan media massa agar tujuan politik mereka tercapai, pada saat yang tepat dan dengan cara yang efisien (Nugroho, 2011).

Hal diakui Kepala Seksi Kehumasan Diskominfoantik Kalteng Arbandi Gana bahwa media utama yang saat ini bekerja sama menjadi relasi Pemprov Kalteng adalah sebagian besar media yang saat pencalonan sudah melakukan peliputan terhadap pasangan calon Sugianto-Habib Ismail.

Saat itu, menurut pengakuannya, media yang meliput pasangan calon Sugianto-Habib Ismail, belum ada kerjasama secara kelembagaan karena memang keduanya masih merupakan calon belum menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Hal ini diakui Wakil Gubernur Habib Ismail. Berdasarkan wawancara peneliti pihaknya saat maju sebagai calon gubernur

dan wakil gubernur meminta bantuan kawan-kawan media untuk meliput setiap kegiatan. Baik saat mendeklarasikan sebagai pasangan calon, mendaftar di KPU, kampanye hingga penetapan KPU Kalteng sebagai pemenang Pilkada 2016.

Melalui media salah satunya pihaknya sebagai pasangan calon membentuk dan meningkatkan citra sebagai pasangan calon dan dipilih masyarakat dengan cara membentuk opini publik. Menurut Iswandi (Syahputra, 2018) opini merupakan *expressed statement* yang bisa diucapkan dengan kata-kata juga bisa dinyatakan dengan isyarat atau cara-cara lain yang mengandung arti dengan isyarat atau cara-cara lain yang mengandung arti dan segera dapat dipahami maksudnya.

Setelah melalui perjalanan dan proses “pengawalan” berita dari calon gubernur, kampanye hingga tahapan penetapan pemenang Pilkada, maka ketika pasangan Sugianto Sabran-Habib Ismail sudah dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Tengah – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, maka media-media ini menjadi media utama dalam kemitraan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun berdasarkan pengakuan Wakil Gubernur Kalteng periode 2016-2021 Habib Ismail, pihaknya berupaya menjalin relasi dan memberdayakan semua media yang ada di Kalimantan Tengah. Termasuk tiga media lokal yaitu harian Kalteng Pos, harian Tabengan dan harian Palangka Post.

Setelah dilantik, menurut Habib Ismail, menjadi komitmen dirinya dengan Gubernur Sugianto membangun relasi sosial dengan semua komponen masyarakat Kalteng. Tanpa harus membedakan mana pendukung dan mana yang bukan saat pilkada. Setelah terpilih semuanya adalah rakyat Kalteng yang mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Sugianto dan Wakil Habib Ismail.

Begitu juga dengan media relasi ini terus dibangun. Kalau sebelumnya saat pencalonan hanya beberapa media yang menjadi relasi, tetapi setelah terpilih semua dirangkul dan menjadi mitra.

Relasi ini sangat penting. Menurut Spradley dan Mc Curdy (Arifin, 2021) menjelaskan bahwa relasi sosial yaitu terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama yang akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi sosial yang terdiri dari dua macam yaitu relasi sosial asosiatif dan disosiatif. Lebih lanjut, menurut Abdullah (Arifin, 2021) relasi sosial adalah hubungan antar individu yang timbul karena adanya interaksi sosial.

Pengertian lain juga menjelaskan relasi sosial merupakan interaksi sosial yang didasari oleh rasa simpati, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Bagaimanapun relasi sosial juga merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain dan juga saling mempengaruhi yang didasarkan pada kesadaran setiap individu untuk saling menolong. Relasi sosial merupakan proses mempengaruhi diantara dua orang atau lebih.

Relasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi antara lain dengan media ini dalam bentuk kerjasama dalam pemberitaan berupa yang awalnya menggunakan istilah kontrak halaman. Menurut Pemimpin Redaksi Palangka Post, Haris Sadikin, istilah kontrak halaman tidak digunakan lagi tetapi memakai istilah kerjasama pemberitaan, advertorial atau iklan. Pergeseran istilah ini, menurutnya, mempunyai makna yang berbeda juga. Kalau kontrak halaman maka halaman yang dikontrak tidak boleh diisi oleh berita selain berita Pemprov Kalteng. Tetapi kalau kerjasama pemberitaan sifatnya tidak membeli halaman tapi menempatkan berita pada halaman tertentu yang disepakati.

Dalam kerjasama ini lah terjadi pertukaran sosial yang sifatnya saling menguntungkan. Pertukaran sosial, yang digunakan

dalam kajian ini, membuat asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh hasil kontak sosial dengan individu lain yang menawarkan kemungkinan penghargaan, atau hukuman. (Monge et al., 2003).

Dalam kerjasama ini Kepala Seksi Kehumasan Diskominfosantik Kalteng Arbandi Gana, diawali para pemimpin media mengajukan permohonan penawaran kerjasama pemberitaan itu. Dalam penawaran itu maka dilengkapi dengan produk pemberitaan yang ditawarkan. Misalnya untuk pemberitaan media cetak halaman 1 satu berita dan satu halaman dalam penuh yang terdapat bagian atasnya berlogo lambang Provinsi Kalimantan Tengah serta dilengkapi foto gubernur dan wakil gubernur dengan terbit setiap hari. Pada penawaran itu dilengkapi dengan biaya yang harus dibayarkan pihak Pemprov Kalteng sebagai pengganti jasa pemberitaan.

Setiap media menawarkan besaran biaya yang berbeda. Tergantung keputusan manajemen masing-masing. Setelah semua penawaran dari sejumlah media tersebut terkumpul baik dari media cetak, online dan eletronik di Dinas Kominfo dan Persandian Kalteng, kalau sebelumnya di Biro Humas Setda Kalteng, maka baru dilakukan rapat pembahasan di Dinas Kominfo untuk memutuskan berapa media yang disetujui bekerjasama, kemudian menentukan besarnya anggaran yang disetujui masing-masing media. Untuk menetapkan jumlah media berikut anggarannya, kalau diperlukan pihak Dinas Kominfo meminta pertimbangan Sekda sebagai ketua tim anggaran Pemprov Kalteng maupun Gubernur Kalteng.

Setelah Pemprov sudah menyetujui maka diundanglah pihak manajemen media masing-masing untuk melakukan penandatanganan kesepakatan atau MoU. Mulai saat itu maka semua media yang telah melakukan relasi dan kerjasama melakukan pertukaran sosial, termasuk Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post. Media se-

tiap harinya memberitakan semua berita dari Pemerintah Provinsi Kalteng sesuai dengan isi kesepakatan masing-masing.

Kalteng Pos sebagai media cetak harian pertama dan terbesar, menurut Pemimpin Redaksinya, terkadang memuat berita Pemerintah Provinsi Kalteng dengan nara sumber langsung dari Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di halaman satu. Apakah itu posisi berita open atau headline atau berita utama tergantung konten berita. Kalau itu berita itu kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak maka diletakan di halaman headline atau berita open.

Selain ada berita kerjasama di halaman satu. Ada juga berita halaman dalam berwarna yang dilengkapi lambang Kalimantan Tengah dan foto Gubernur dan Wakilnya. Supaya pemberitaan tentang sekitar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terbit setiap hari, Kalteng Pos menempatkan satu wartawan khusus di kantor tersebut.

Begitu juga dengan di Harian Palangka Post untuk berita Gubernur Kalteng setiap hari terbit di halaman satu dan sering diletakkan di berita utama atau open. Kebijakan ini sudah menjadi kesepakatan pihak manajemen Palangka Post dan bersifat wajib.

Selain pemberitaan di halaman utama, berita tentang Pemerintah Provinsi juga ada di halaman dalam satu halaman penuh di bagian atas dilengkapi lambang Pemrpov Kalteng dan foto gubernur dan wakil. Di halaman ini selain ada berita gubernur juga ada berita pejabat di lingkungan pemerintah provinsi seperti berita dinas, badan maupun kantor.

Pemberitaan di harian Tabengan dibagi dua. Ada saat harian ini melakukan kerja sama dan setelah berakhirnya kerjasama. Saat periode pertama kepemimpinan Gubernur Sugianto 2016-2021 harian ini melakukan kerjasama sama seperti dengan Kalteng Pos dan Palangka Post. Pada saat itu berita gubernur diterbitkan di

halaman satu. Walau pun tidak setiap hari. Tetapi setiap hari berita Pemprov ada di halaman khusus halaman yaitu halaman Pemerintah Provinsi Kalteng yang ada di bagian dalam dan dilengkapi dengan lambang Pemprov serta foto gubernur dan wakil gubernur. Di halaman ini juga diterbitkan selain berita gubernur dan wakil gubernur juga berita dari instansi yang berada di bawah lingkungan Pemprov Kalteng.

Namun setelah memasuki periode kedua pemerintahan Gubernur Sugianto, Tabengan tidak lagi melanjutkan kerjasama karena alasan non teknis, maka sejak saat itu Tabengan tidak lagi menerbitkan berita Pemerintah Provinsi Kalteng. Kecuali ada berita yang memang sangat penting untuk masyarakat. Selebihnya Tabengan lebih banyak kepada berita-berita yang bersifat kontrol sosial.

Sebagai pertukaran bentuk dari relasi sosial antara media dengan Pemprov Kalteng, pada satu sisi media menyajikan berita kegiatan-kegiatan, pernyataan gubernur maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Kalteng yang terbit setiap hari dan dengan halaman yang sudah ditentukan, sesuai kesepakatan selama periode tertentu.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi akan menyiapkan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng yang akan dibayarkan kepada setiap media sesuai dengan kesepakatan.

Pembayaran ini melalui pagu anggaran Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian kepada sejumlah media yang melakukan kerjasama. Menurut Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, anggaran untuk pembayaran akibat dari kerjasama itu resmi. Artinya, diajukan sesuai mekanisme anggaran. Dari Pemprov mengajukan Rancangan APBD termasuk di dalamnya termasuk anggaran Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Dis-

kominfo) Kalteng yang antara lain, memuat anggaran kerjasama dengan media. Kemudian dibahas oleh komisi yang membidangi bersama pihak Diskominfo. Setelah sepakat antara legislatif dan eksekutif maka APBD Kalteng ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur dan Ketua DPRD Kalteng. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2021(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, 2021).

Jumlah yang dibayarkan setiap media berbeda. Ada yang berdasarkan kesepakatan berdasarkan jumlah halaman dan ada juga yang didasari dari perhitungan jumlah berita. Dengan demikian terjadi pertukaran di antara Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post. Dengan menyebarkan informasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalteng ke seluruh masyarakat Kalteng, sehingga meningkatkan branding yang menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya.

Sedangkan media mendapatkan imbalan finansial yang sangat berarti dalam mengganti biaya produksi semakin hari semakin tinggi seperti biaya kertas, maintenance mesin cetak, listrik, pajak serta operasional kantor. Termasuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

## **B. Media Cetak Lokal dalam Menjalankan Fungsinya**

Media massa mempunyai fungsi yang sangat strategis. Menurut (Nurudin, 2007), menyatakan antara komunikasi massa dan media massa tidak terpisahkan. Ketika berbicara komunikasi massa maka tidak lepas dari media massa tersebut.

Fungsi pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 2 butir 1 dan 2 disebutkan bahwa: Pasal 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial,

2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

### 1. Fungsi Informasi

Dalam fungsi pers, hak masyarakat memperoleh informasi menjadi fungsi sosial yang penting diperhatikan. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi atau untuk tahu merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh media massa. Seperti yang tertuang dalam UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya, bangsa dan umat manusia” (Republik, 39 C.E.)

Bahkan hak untuk tahu atau memperoleh informasi ini adalah hak yang dijamin Hak ini termaktub dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia.

Menurut anggota Komisi Informasi Publik (KIP) Kalteng Srie Rosmilawati bahwa hak masyarakat untuk memperoleh segala macam informasi kecuali yang memang menurut UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dilarang seperti yang berkaitan dengan keamanan negara. Dalam (McQuail, 2011) menyatakan fungsi informasi dan media mencakup tiga aspek yaitu menyediakan informasi mengenai peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia. Kedua, menunjukkan adanya hubungan kekuasaan. Ketiga, memberikan sarana bagi inovasi, adaptasi dan pertumbuhan.

Informasi yang disampaikan dalam media massa lokal dalam konteks relasi dengan Pemprov Kalteng adalah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan di lingkup Pemprov mau-

pun informasi berisi kebijakan Pemprov yang disampaikan gubernur.

Berdasarkan hasil kajian dan wawancara dengan subyek kajian, ternyata fungsi informasi ini merupakan fungsi yang terbanyak di dalam media Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post. Dibandingkan fungsi lainnya seperti hiburan, pendidikan dan kontrol soaial.

## **2. Fungsi Pendidikan**

Begitu fungsi-fungsi yang lainnya, fungsi pendidikan media massa juga berperan dalam memajukan pendidikan di Kalimantan Tengah melalui kebijakan Pemerintah Provinsi yang dengan moto “Kalteng Berkah”. Seperti kebijakan bea siswa dan lain-lain.

Selain itu dalam rangka meningkatkan wawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan penguasaan wawasan yang luas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah penting pembentukan karakter generasi muda yang berahlak dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Fungsi ini terdapat dalam halaman media cetak menjadi satu kesatuan dalam berita Pemerintah Provinsi Kalteng. Dalam memberitakan fungsi pendidikan disampaikan juga kebijakan Pemprov Kalteng dalam kebijakan pembangunan bidang pendidikan.

Berita tentang pendidikan ini di Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post pernah mempunyai halaman khusus. Termasuk memuat karya-karya siswa sebagai tempat penyaluran minat dan bakat.

Menurut informan, mantan Walikota Palangka Raya dua periode, H. Riban Satia, pemberitaan yang ada dalam media menjadi sumber belajar. Tidak hanya bagi siswa dan mahasiswa tetapi juga masyarakat secara umum. Karena siapa saja bisa membaca berita atau informasi yang disajikan media.

Kemudian tidak kalah penting, media seperti Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post, memberikan ruang khusus untuk masyarakat atau siapapun untuk menyampaikan pendapatnya melalui tulisan berbentuk opini. Dengan demikian, selain memperoleh kognitif, psikomotor maupun efektif dari informasi yang disampaikan media juga masyarakat bisa menyampaikan buah pikirannya kepada publik melalui media tersebut.

Media juga seyogyanya dalam menjalankan fungsi pendidikan ini, bisa memahami kebijakan pemerintah dalam bidang penyelenggaraan pendidikan ini seperti tertuang dalam UU nomor 20 Tahun 2003 (Republik, 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 antara lain menyebutkan pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Berdasarkan kebijakan pemerintah melalui undang-undang tersebut, maka redaktur halaman pendidikan menyelaraskan isi halaman pendidikan ini dengan konten yang bisa menarik pembaca.

### **3. Fungsi Hiburan**

Pada dasarnya manusia membutuhkan hiburan dan kegembiraan untuk dapat memertahankan kehidupannya (Freud, dalam Martin 2007). Dalam mencapai kegembiraan, kesenangan, ataupun hiburan yang diinginkannya, manusia mencari cara. Antara lain seperti membaca berita atris di surat kabar, menonton di televisi atau di radio, menulis cerita pendek maupun kegiatan yang bersifat hobi.

Di media massa untuk fungsi hiburan seperti yang tertuang dalam Pasal (3) UU 40/99, memenuhi hak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rohani yang menjadi hak setiap individu. Adanya kerjasama ini tidak menghalangi tiga media cetak ini untuk menerbitkan berita yang berisi hiburan. Berita hiburan terbit

biasanya pada hari Sabtu dan Minggu seperti berita-berita artis, karya sastra maupun cerita-cerita rakyat maupun cerita anak-anak yang sifatnya mendidik serta menghibur. Berita menghibur ini menurut Pemimpin Redaksi Kalteng Pos Husrin A Latif ini tetap mengacu kepada etika atau tidak melanggar nilai moral, menjunjung tinggi kearifan lokal, Hak Asasi Manusia, nilai agama serta regulasi lainnya yang ada di Indonesia.

Dengan membaca berita hiburan di media cetak, masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk membuat hatinya bahagia dan tidak perlu mengeluarkan anggaran. Seputar kehidupan artis idolanya bisa didapat melalui media tersebut. Supaya berita hiburan ini mempunyai daya tarik tersendiri maka halaman hiburan di surat kabar seperti Kalteng Pos, Tabengan dan Palangka Post dibuat berwarna.

Menurut Burton (Graeme, 2012) menyatakan fungsi hiburan yang diamanahkan kepada media yaitu pertama, hiburan berfungsi untuk menghasilkan kesenangan yang sehat dan kepuasan bagi audiensi. Kedua, hiburan berfungsi mengalihkan perhatian audiensi dari sejumlah isu serius dan tidak ketidaksetaraan.

Sementara (McQuail, 2011) hakikat hiburan adalah sesuatu yang menyediakan kesenangan, pengalihan, alat rekreasi dan mengurangi tekanan sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan ini, menurut Pemimpin Redaksi Tabengan Victor, pihaknya selalu memberikan arahan kepada redaktur agar berita hiburan yang diterbitkan adalah berita hiburan yang terbaru, artis yang memang dikenal masyarakat serta fakta yang menarik.

#### **4. Fungsi Kontrol Sosial**

Fungsi media massa terakhir dan tidak kalah penting adalah kontrol sosial yang di dalamnya mengkritik yang sifatnya memba-

ngun dan menjadi pengawas jalanya roda pembangunan dan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan kebijakan, KKN maupun penyimpangan kewenangan.

Dari tiga fungsi pers sebelumnya yaitu fungsi informasi, pendidikan dan hiburan, maka fungsi kontrol sosial inilah yang terberat. Seperti diakui Pemimpin Redaksi Kalteng Pos, Husrin A Latif, unjuk memberikan kontrol sosial misalnya ada pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Maka tidak serta merta langsung diberitakan, tetapi benar-benar mengecek kebenaran berita itu, melakukan konfirmasi kepada pejabat yang diberitakan tersebut dan dampak hukum dari berita tersebut.

Berdasarkan hasil kajian fungsi pers sebagai media informasi dan fungsi hiburan pendidikan dan kontrol sosial yang dijalankan media cetak yang melakukan kerjasama dengan Pemprov Kalteng sudah berjalan dengan baik. Namun menurut informan kajian ini fungsi kontrol sosial yang perlu lebih ditingkatkan dan tidak didominasi oleh informasi keberhasilan pembangunan saja. Jangan sampai justru masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi itu dari media sosial seperti FB, Instagram, twitter dan media sosial lainnya yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menurut Nengah Bawa Atmadja dan Luh Putu Sri Ariyani (Atmadja, 2018) fungsi kontrol sosial melihat kegiatan yang ada media massa untuk melakukan pemberitaan kejadian-kejadian krusial ketengah masyarakat agar dapat dipahami dan ada umpan balik. Kontrol sosial pada hakikatnya tidak hanya menyampaikan sebuah fakta melalui surat kabar dalam bentuk berita tetapi lebih untuk mendapat tanggapan terhadap sesuatu yang tidak sesuai aturan berlaku. Keadaan ini sangat perlu, kalau dibiarkan akan berdampak kepada masyarakat tidak sehat. Kontrol sosial seperti kegunaan anjing penjaga. (Pawito, 2009:94).

Tabel 3. Relasi Media Cetak Lokal dengan Pemprov Kalteng dalam Meningkatkan Branding.

No	Konsep Pokok	Teori Goerge C Homans dalam Proposisi Keberhasilan	Hasil Kajian
1	Tindakan	Meskipun secara umum benar bahwa reward-reward yang semakin sering menyebabkan tindakan-tindakan yang juga semakin sering, resiprokasi tersebut tidak dapat berlanjut secara tidak terbatas. Pada titik tertentu para individu benar-benar tidak dapat bertindak seperti yang sering dilakukan.	Tindakan media melakukan pemberitaan diawali dengan panggilan hati nurani untuk menjalankan tugas. Ditindaklanjuti dengan tindakan didasari relasi yang direncanakan dan mempunyai tujuan. Tindakan itu sejalan dengan keinginan Pemprov Kalteng.
2	Penghargaan/ Reward	semakin singkat jarak antara perilaku dan reward, semakin mungkin seseorang mengulangi perilaku itu. Sebaliknya, semakin lama jarak antara perilaku dan reward semakin lebih berkurang kemungkinan pengulangan perilaku itu.	Tindakan media melakukan pemberitaan sesuai kesepakatan diharapkan oleh Pemprov dengan memberikan anggaran kepada media dan tidak dipengaruhi oleh jarak antara tindakan dengan reward.

3	Pengulangan Tindakan	Reward yang sewaktu-waktu lebih mungkin mendatangkan perilaku yang berulang daripada reward yang teratur. Reward yang teratur mengakibatkan kebosanan dan kejenuhan, sementara reward pada jarak yang tidak teratur sangat mungkin mendatangkan perilaku yang berulang.	Reward yang diberikan ke dua belah pihak antara Pemprov Kalteng dengan media diberikan secara teratur. Reward teratur mengakibatkan perilaku yang berulang untuk melakukan kerjasama.
---	----------------------	---	---

# BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Rangkaian hasil kajian yang telah diungkapkan sebelumnya terkait hubungan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Relasi sosial antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjalan berdasarkan keuntungan kedua belah pihak dan dilakukan secara terus menerus sepanjang salah satu pihak tidak melakukan pengingkaran dalam komitmen yang tertuang dalam kerjasama.
2. Fungsi pers sebagai media informasi, hiburan, dan pendidikan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara fungsi kontrol sosial oleh media yang melakukan relasi khususnya pemberitaan yang menyangkut berita miring terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih ada yang belum terekspose. Sebagian lagi di ekspose melalui media lain yang tidak melakukan kerjasama tapi masih satu group.

3. Dalam pertukaran sosial dimana media mendapatkan keuntungan finansial melalui kontrak halaman dari pemerintah daerah, pada media tertentu membuat media “tidak berdaya” dan kecendrungan tidak netral.

## **B. Saran**

1. Relasi yang dibangun antara media cetak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sama-sama mendapatkan keuntungan. Pemprov dapat menyebarkan informasi keberhasilan pembangunan kepada masyarakat dan media pun mendapatkan profit mensejahterakan wartawan dan pengembangan perusahaan media. Namun relasi itu sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan proporsional dan profesional. Tidak berdasarkan kepentingan politik, kepemilikan dan ideologi politik.
2. Relasi media cetak lokal memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan berita, fungsi pers telah diamanatkan oleh perundang-undangan tentang Pers, yaitu dalam menjalankan tugasnya memberikan kabar, baik itu menyangkut keberhasilan pembangunan dan kegagalan pembangunan sebaiknya dilakukan secara seimbang.
3. Relasi yang dibangun bersama antara media dengan pemerintah provinsi yang selama ini menggunakan istilah kontrak halaman diganti dengan sistem per berita, supaya tidak ada kesan bahwa pihak kedua membeli halaman dan bisa memasukkan berita apa pun di halaman tersebut.

## **C. Implikasi Teoritik**

Setelah merumuskan tentang proposisi yang telah disusun di atas, maka peneliti meimpilkasikannya sendiri dalam relasi pers dengan Pemerintah Provinsi Kalteng. Proposisi ini merupakan divariasi dari teori pertukaran sosial Goerge C Homans yang merupakan dasar teori kajian.

Proposisi ini tersusun setelah memahami relasi pers dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan memahami pers dalam menjalankan fungsinya.

Menurut pendapat yang diungkapkan G.C Homans tentang sebuah relasi ada sebuah konsep menyatakan bahwa semakin sering seseorang diberi penghargaan atas tindakan tertentu, maka bertambah sering perilaku tersebut dilakukan lagi. Sedangkan pada kajian ini memiliki proposisi yang menyebutkan pertukaran sosial antara pemerintah dan media dalam bentuk kontrak halaman berdampak pada berkurangnya netralitas media dalam menilai kinerja pemerintah. Artinya, dengan adanya relasi tersebut menyebabkan media khususnya dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya terhadap pemerintah provinsi akan berkurang. Sehingga, sebagai media massa tidak lagi netral dalam mengemban amanat yang diberikan konstitusi negara kepada lembaga tersebut.

Kemudian proposisi keduanya menyebutkan, pada pertukaran sosial media berupaya memperoleh benefit (keuntungan) yang besar dengan menekan cost sekecil-kecilnya dalam mempertahankan keberlangsungan penerbitan. Media cetak selain sebagai mempunyai lima fungsi sebagai penyampai informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial dia juga mempunyai fungsi sebagai lembaga ekonomi. Dalam hal berlaku prinsip ekonomi yang mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan wartawan serta operasional produksi media tersebut dengan berupaya mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya.

Begitu pun dengan proposisi keteraturan pemberitaan media dan cost yang dikeluarkan pemerintah menentukan keberlangsungan pertukaran sosial antara media dengan pemerintah. Maksudnya, dengan konsistensi pemberitaan oleh media dan pembayaran kontrak halaman oleh pemerintah maka menjadi jaminan keberlangsungan pertukaran sosial tersebut.

## D. Keterbatasan Kajian

Dalam kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap Relasi Pers dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki keterbatasan dari segi waktu. Peneliti hanya meneliti teori Goerge C Homans hanya satu sisi yaitu proposisi Goerge C Homans dari proposisi keberhasilan. Proposisi ini mengungkapkan bahwa semakin sering seseorang diberi penghargaan atas tindakan tertentu, semakin cenderung mereka akan melakukan tindakan tersebut.

George C. Homans sebenarnya mengemukakan lima proposisi terkait pertukaran sosial lainnya. Kajian yang menyelidiki lima proposisi lainnya ini memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Sementara peneliti mempunyai kemampuan yang terbatas. Diharapkan ada peneliti lain pada saatnya untuk melanjutkan kajian ini dengan bersandar kepada lima proposisi Goerge C Homans tersebut. Sebagai kelanjutan dari kajian ini yang kemudian bisa digunakan oleh Pemprov Kalteng dan media massa dalam melakukan relasi lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, D. L., & Andung, P. A. (2022). Framing Media Barat terhadap Pemindahan Ibu Kota Nusantara. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 5(2), 182–193.
- Arifin, R. Z. (2021). *Relasi Sosial Pada Anggota Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto* [Universitas Muhammadiyah Purwokerto]. <https://repository.ump.ac.id/13022/>
- Atmadja, N. B. & P. S. A. L. (2018). *Sosiologi Media Perspektif Teori Kritis*.
- Bogdan, R. C., & Bikien, S. K. (1992). *Qualitative Reserch for Education: an Introduction to theory and methods*. Boston: Allyn dan Bacon.
- Buluamang, Y. M. O. (2017). Transparansi komunikasi dalam birokrasi pemerintahan. *Jurnal Kajian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 21(1), 49–57.
- Bungin, B. (2018). *Komunikasi Poltik Pencitraan. The Social Construction of Public Administration (SCoPA)*. Prenada Media.
- Creswell, J. W., & Inquiry, Q. (1998). *Research design: Choosing among five traditions*. Cet. II.

- Djuroto, T. (2002). *Manajemen Penerbitan Pers, PT Remaja Rosdakarya*. Bandung.
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: pengantar analisis teks media*. LKiS Yogyakarta.
- Ghassani, V. I., & Sukowati, P. (2016). Bentuk Hubungan Pers Dengan Pemerintah Terkait Dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2).
- Gobang, J. K. G. D. (2014). Konflik budaya lokal pada masyarakat di Pulau Flores (Sebuah analisis komunikasi lintas budaya). *Jurnal Komunikasi*, 9(1), 59–68.
- Graeme, B. (2012). *Media dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Jala-sutra.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayatullah, A. (2017). Perilaku Jurnalis Dalam Penyelenggaraan Pers Di Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 4(2), 45–68.
- Iqbal, I. (2020). Implementasi Teori Pers dalam Pemberitaan Harian Republika. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 3(1), 18–28.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Penerbit: Erlangga. Jakarta.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi*. Prenada Media.
- Lasswell, H. D. (2009). *Structure an function of communication in societ*. Urbana: University of Illinois Press.
- Mahmud, T. A. (2020). *Pers Lokal Bagian Pilar Pembangunan Daerah*. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-59622019/pers-lokal-bagian-pilar-pembangunan-daerah?page=3>
- McQuail, D. (2011). *Teori komunikasi massa*. Salemba Humanika.

- Monge, P. R., Contractor, N. S., & Contractor, P. S. (2003). *Theories of communication networks*. Oxford University Press, USA.
- Mulyadi, A. (2017). Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Sukabumi Dalam Menjalinkan Relasi Dengan Media. *UMMI: Jurnal Kajian Dan Pengembangan Sains Dan Teknologi*, 11(3), 45–50.
- Neumeier, M. (2003). *The Brand Gap: How to Bridge the Distance Between Business Strategy and*. Sigongsa Inc., Seoul, Korea.
- Ngadino, A. (2010). Pergeseran Relasi Negara dan Media Massa dalam Kerangka Demokrasi. *Simbur Cahaya*, 42, 1929–1952.
- Novlizal, R. (2017). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24 (Doctoral dissertation)*.
- Nugroho, A. A. (2011). *Etika Komunikasi Politik*. Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya.
- Nurudin, M. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Pawito. (2009). *Komunikasi politik: media massa dan kampanye pemilihan*. Jalsutra.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (2021) Nomor 9 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. .
- Poloma Margaret, M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharjo, Y. B. (2023). *Relasi Media Dalam Pelaksanaan Tugas Humas Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*.
- Rahmi, R. (2019). Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 6(1), 78–85.
- Republik, I. (39 C.E.). *Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

- Republik, I. (1999). Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Lembaran Negara No. 52 TLN. 3387. *Jakarta: Sekretariat Negara.*
- Republik, I. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.*
- Republik, I. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.*
- Riadi, M. (2017). Pengertian, Jenis dan Pengukuran Nilai Perusahaan. *Diambil Dari: Www. Kajianpustaka. Com/2017/11/Pengertian-Jenis-Dan-Pengukuran-Nilai-Perusahaan. Html* (10 Mei 2019).
- Risnawati, R. (2020). Media Online di Indonesia dalam Kajian Teori Four Theories of the Press. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 3(1), 10–17.
- Ritzer, G. (2014). *Sosiologi: ilmu pengetahuan berparadigma ganda.*
- Ritzer, G., & Stenisky, J. (2019). *Teori Sosiologi Klasik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sobur, A. (2002). Bercengkerama dengan semiotika. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 3(1), 31–50.
- Soraya, H. N., RIFA, D. R. H. A., & PHIL, M. (n.d.). *PENGGUNAAN MEDIA MASSA OLEH WAKIL RAKYAT (Studi Relasi DPRD Kabupaten Temanggung dan Media Massa).*
- Suhandang, K. (2023). *Pengantar jurnalistik.* Nuansa Cendekia.
- Suharyanto, A. (2016). Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 123–136.
- Surbakti, D. (2016). Peran dan fungsi pers menurut Undang-undang Pers tahun 1999 serta perkembangannya. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1), 77–86.

- Suryana, D. (2012). *Provinsi-Provinsi Di Indonesia: Tempat-Tempat Di Provinsi Indonesia*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Suyanto, B. (2015). *Metode kajian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Prenada Media.
- Syahputra, I. (2018). *Opini Publik: Konsep, Pembentukan, dan Pengukuran*. Simbiosis Rekatama Media.
- Umanailo, M. C. B. (2019). Talcot Parson and Robert K Merton. *OSF Preprints*.
- Wahyudin, U., & Erlandia, D. R. (2018). Peran humas pemerintah dalam pemasaran city branding melalui media massa. *Jurnal Common*, 2(2).
- Waluyo, D. (2012). Membedah Pers Otoritarian pada Rezim Orde-baru. *Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 2(2), 169–180.
- Yin, R. K. (2008). *Studi kasus: Desain & metode*.
- Yin, R. K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*.
- Yusuf, I. A. (2011). Media lokal dalam konstelasi komunikasi politik di daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(3), 297–316.

**LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA**



**Ir. H. Abdul Razak**  
Wakil Ketua DPRD Kalteng



**Habib Ismail Bin Yahya**  
Wakil Gubernur Kalteng



**H. Haris Sadikin**  
Ketua PWI Kalteng - Pemimpin  
Redaksi Palangka Post



**H. Sutransyah**  
Ketua DKD PWI- SMSI Kalteng



**Jomangkar, SH** - Biro Protokol  
dan Komunikasi Publik Pemprov  
Kalteng



**Arbandi Gana**  
Kepala Seksi Kehumasan  
Diskominfosantik Kalteng



**Dr. R. Biroum Bernadianto, M.Si**  
Kepala Ombudsman RI Kalteng



**Husrin**  
Pempred Kalteng Pos



**Victor Giroth**  
Pempred Tabengan



**Sirajul Rahman, M.I.Kom**  
Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng



**Dr. Mambang I Tubil, S.H., M.A.P**  
Tokoh Adat



**Dr. H.M. Riban Satia, S.Sos., M.Si**  
Pemerhati Sosial



Hakim Syah  
Dosen Komunikasi IAIN Palangka  
Raya



Srie Rosmilawat, M.I.Kom  
Komisi Informasi Publik Kalteng



Anisa B Wahdah  
Wartawan Kalteng Pos



Asep Setiawan  
Dewan Pres



# Relasi Media Cetak DENGAN PEMERINTAH PROVINSI



**Dr. Junaidi.** Tujuan kajian buku ini

untuk memahami bagaimana relasi yang terjadi antara media cetak lokal khususnya *Surat Kabar Harian Kalteng Pos*, *Surat Kabar Harian Tabengan* dan *Surat Kabar Harian Palangka Post* melakukan relasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan memahami pers dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori pertukaran yang dirumuskan oleh Goerge C Homans dengan paradigma definisi sosial. Sedangkan untuk pendekatannya menggunakan kualitatif dan jenis kajian studi kasus dan melakukan langkah-langkah studi kasus berdasarkan pendapatnya RK Yin. Data yang diperoleh dalam kajian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari kajian diperoleh hasil bahwa tindakan media melakukan pemberitaan diawali dengan panggilan hati nurani untuk menjalankan tugas. Ditindaklanjuti dengan tindakan didasari relasi yang terbentuk berupa kerjasama kontrak halaman. Tindakan itu sejalan dengan keinginan Pemprov Kalteng dan pihak media.

Kemudian tindakan media melakukan pemberitaan sesuai kesepakatan dihargai oleh Pemprov dengan memberikan anggaran kepada media dan tidak dipengaruhi oleh jarak antara tindakan dengan *reward*. *Reward* yang diberikan ke dua belah pihak antara Pemprov Kalteng dengan media diberikan secara teratur dan sedikit banyak mempengaruhi kenetralan media dan pada sebagian sebagian media membuat "tidak berdaya". Terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. *Reward* teratur mengakibatkan perilaku yang berulang untuk melakukan kerjasama. Setelah melakukan analisa hasil penelitian dan pembahasan kajian ini dengan bersandar pada teori pertukaran George C Homans maka peneliti menyusun beberapa proposisi yaitu, *pertama*, pertukaran sosial antara pemerintah dan media dalam bentuk kontrak halaman berdampak pada berkurangnya netralitas media dalam menilai kinerja pemerintah. *Kedua*, pada pertukaran sosial media berupaya memperoleh benefit (keuntungan) yang besar dengan menekan *cost* sekecil-kecilnya dalam mempertahankan keberlangsungan penerbitannya. Dan *ketiga*, keteraturan pemberitaan media dan *cost* yang dikeluarkan pemerintah menentukan keberlangsungan pertukaran sosial antara media dengan pemerintah.

**Bidung**  
+6281227475754  
f Bildung  
@sahabatbidung  
bidungpustakautama@gmail.com  
www.penerbitbidung.com

